

TESIS

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BIMA STUDI KASUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BIMA



Oleh :

AFIFAH HADIYATULLAH

NIM: 1162300029

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

TESIS
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI
KOTA BIMA STUDI KASUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BIMA



Oleh:

AFIFAH HADIYATULLAH
NIM. 1162300029

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2025

TESIS
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI
KOTA BIMA STUDI KASUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BIMA



Oleh:

AFIFAH HADIYATULLAH

NIM. 1162300029

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini telah di setujui pada tanggal 21 Desember 2024

Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Bambang Kusbandrijo, MS
NPP. 20110.92.0239


Dr. Joko Widodo, MS
NPP. 20110.93.0306

Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mengetahui:
Dekan

Mengetahui:
Kapordi



Prof. Dr. Ayin Madiwinarti, MP
NPP. 20120.87.0103


Prof. Dr. Agus Sukristyanto, MS
NPP. 20120.90.0203

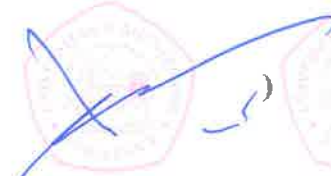
HALAMAN PENGESAHAN

**Dipertahankan di depan Sidang Dewan Penguji
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya dan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh Gelar
Magister Pada Tanggal 11 Januari 2025**

Panitia Penguji

Oleh

**Dr. Bambang Kusbandrijo, M.Si
NPP. 20110.92.0239**

()

**Dr. Endang Indartuti, M.Si
NPP. 20110.94.0402**

()

**Dr. Merry Frida Tri Palupi, M.Si
NPP. 20150.18.0789**

()

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**


**Prof. Dr. Agus Sukristyanto, MS
NPP. 20120.90.0203**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Afifah Hadiyatullah

NIM : 1162300029

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Judul Tesis : Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bima Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima

Menyatakan :

1. Bahwa karya ilmiah (Tesis) yang saya buat merupakan benar-benar karya ilmiah saya sendiri melalui proses bimbingan dengan dosen pembimbing, bukan hasil plagiat dari karya ilmiah orang lain yang telah dipublikasikan dan/atau karya ilmiah orang lain yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik tertentu.
2. Bahwa jika saya mengambil, mengutip atau menulis sebagian dari karya ilmiah orang lain tersebut akan mencantumkan sumber pada daftar pustaka.
3. Apabila kemudian hari ternyata tesis saya terbukti sebagian atau seluruhnya sebagai plagiat dari karya ilmiah orang lain tanpa menyebutkan sumbernya serta tidak mencantumkan dalam daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi berat pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan atas kesadaran saya yang sesadar-sadarnya.

Surabaya, 11 Januari 2025



Afifah Hadiyatullah



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. Semolowaru 45 Surabaya
Tlp. 031 593 1800 (ex.311)
Email: perpus@untag-sbv.ac.id

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afifah Hadiyatullah
NPM : 1162300029
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Jenis Karya : Tesis

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ***Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)***, atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN
SAMPAH DI KOTA BIMA STUDI KASUS DINAS LINGKUNGAN
HIDUP**

KOTA BIMA

Dengan ***Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)***, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 11 Januari 2025



Yang Menyatakan,

Afifah Hadiyatullah

1162300029

KATA PENGANTAR

Saya mengucapkan syukur kepada Allah subhanahu Wata'ala, Tuhan yang maha Rahman dan Rahim, yang memiliki segala puji dan kekuatan. Tuhan adalah tempat kami beribadah, meminta bantuan, dan meminta petunjuk ke jalan yang dimuliakan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul "Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bima Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima". Saya juga mengucapkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wasallam, yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai uswatun hasanah dan pemimpin sejati.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tugas akhir ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan yang terdapat baik dalam tata cara penulisan maupun dalam tata bahasa di dalamnya, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai pengalaman dan pengetahuan yang sangat berarti pada masa yang akan datang. Kemudian penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam proses pembuatan tesis ini, karena tanpa bantuan pihak-pihak tersebut Tesis ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM.,CMA.,CPAI selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Ayun Madiwinarti, MP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Prof. Dr. Agus Sukristyanto, MS selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dr. Bambang Kusbandrijo, M.S selaku Dosen, Pembimbing I serta sebagai Dewan Penguji yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.

5. Dr. Joko Widodo, MS, selaku Dosen dan Pembimbing II yang telah membimbing dan banyak memberi masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Dr. Endang Indartuti, M.Si dan Dr. Merry Frida Tri Palupi, M.Si selaku dewan penguji yang telah memberi kritik dan saran dalam penulisan tesis ini.
7. Dosen-dosen pengajar Prodi Magister Administrasi Publik FISIP UNTAG Surabaya yang memberikan inspirasi dan ilmunya, sehingga dapat membuka cakrawala dalam mengkaji penelitian pada tesis ini.
8. Kedua Orang tua ku tersayang, Drs.H.Abd.Syafi dan Dra. HJ.Rohani yang selalu memberi inspirasi, motivasi, doa, dan kasih sayang.
9. Serta semua pihak yang penulis tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungannya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan Tesis Magister Administrasi Publik ini.

Akhirnya sy berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit-tharii, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surabaya, 11 Januari 2025

Afifah Hadiyatullah

ABSTRAK

Permasalahan sampah di Kota Bima terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk Kota Bima. Munculnya PERDA Kota Bima No.3 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah merupakan bentuk upaya pemerintah Kota Bima dalam menunjukan keseriusannya untuk pengelolaan sampah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan dan Model Implementasi Kebijakan Pengelolaan sampah di Kota Bima melalui DLH Kota Bima. Metode penelitian ini adalah Kualitatif dengan tehnik pengumpulan data menggunakan observasi,wawancara dan dokumentasi serta hasilnya dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa:(1)Implementasi kebijakan pemerintah Kota Bima dalam pengelolaan sampah masih belum optimal disebabkan karena dari perencanaan dan pelaksanaannya masih ada yang belum dijalankan yaitu pengurangan sampah dimana belum dilakukan secara maksimal seperti pembatasan timbulan pendaauran ulang , pemanfaatan kembali sampah. Dalam hal penanganan sampah baru dilakukan dengan pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah, sedangkan untuk pemilahan dan pengolahan masih belum dilakukan oleh DLH Kota Bima.(2)Model implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bima menunjukan bahwa kinerja program belum berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan dikarenakan pertama belum ada kesesuaian antara program kebijakan pengurangan dan penanganan sampah dengan pemanfaat, disebabkan keinginan masyarakat Kota Bima untuk hidup bersih dan sehat belum terciptakan. Kedua belum ada kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana dikarenakan DLH Kota Bima dan masyarakat Kota Bima masih kurang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan sampah. Selain itu masyarakat belum siap menerima kebijakan ini. dilihat masih sangat rendahnya partisipasinya. Ketiga belum ada kesesuaian antara organisasi pelaksana dengan program dikarenakan DLH belum melaksanakan sepenuhnya tugasnya dalam mengimplementasikan program pengurangan dan penanganan sampah.

Kata Kunci: Analisis, Kebijakan, Sampah, Pengelolaan Sampah.

ABSTRACT

The waste problem in Bima City continues to increase along with the increase in the population of Bima City. The emergence of the Bima City Regional Regulation No.3 of 2018 concerning waste management is a form of the Bima City government's efforts to show its seriousness in waste management. The aim of this research is to describe and analyze Policy Implementation and the Waste Management Policy Implementation Model in Bima City through DLH. This research method is qualitative with data collection techniques using observation, interviews and documentation and the results are analyzed using descriptive qualitative. The research results show that:(1) The implementation of the Bima City government's policy in waste management is still not optimal because in terms of planning and implementation there are still things that have not been implemented, namely waste reduction which has not been carried out optimally, such as limiting the generation of recycling and reusing waste. In terms of waste handling, it has only been carried out by collecting, transporting and final processing the waste, while the sorting and processing has not yet been carried out by DLH.(2) The model for implementing waste management policies in Bima City shows that the program performance has not been successful in accordance with what was expected because firstly there has been no compatibility between the waste reduction and handling policy program and the users, because the desire of the people of Bima City to live a clean and healthy life has not been created. Secondly, there is no compatibility between the user groups and the implementing organizations because DLH and the people of Bima City still lack responsibility in terms of waste management. Apart from that, the public is not ready to accept this policy, participation is still very low. Third, there is no compatibility between the implementing organization and the program because DLH has not fully carried out its duties in implementing the waste reduction and handling program.

Keywords: *Analysis, Policy, Waste Management.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat secara Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat secara Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Review Jurnal	31
2.3 Kajian Teori.....	51
2.3.1 Grand Theory Administrasi Publik.....	51
2.3.1.1 Perkembangan Teori Administrasi Publik.....	52
2.3.1.2 Administrasi Publik dalam Konteks Desentralisasi.....	53
2.3.1.3 Pendekatan Partisipatif dalam Administrasi Publik	53
2.3.1.4 Administrasi Publik dan Pelayanan Berkelanjutan	53
2.3.1.5 Administrasi Publik dan Kebijakan Publik	54
2.3.2 Middle Theory Kebijakan Publik.....	54
2.3.2.1 Jenis Kebijakan.....	57

2.3.3.2	Pengambilan Keputusan Dalam Kebijakan Publik.....	58
2.3.2.3	Tantangan Kebijakan Publik	58
2.3.2.4	Tuntutan Kualitas Pembuatan Kebijakan Semakin Tinggi.....	60
2.3.2.5	Proses Pembuatan Kebijakan.....	62
2.3.2.6	Model-Model Kebijakan.....	63
2.3.2.7	Aspek -aspek Pelaksanaan Kebijakan Publik.....	64
2.3.2.8	Dimensi Pelaksanaan Kebijakan Publik.....	65
2.3.2.9	Unsur-unsur dalam Implementasi Kebijakan	67
2.3.3.	Aplied Theory Model Kesesuaian Implementasi Kebijakan Menurut David C. Korten	69
2.3.4.	Aplied Theory Model Implementasi Kebijakan Menurut George Edwards III.....	70
2.3.5.	Aplied Theory Model Implementasi Kebijakan Menurut Meter dan Horn.....	74
2.3.6.	Aplied Theory Model Implementasi Kebijakan Menurut Hoogwood & Gun.....	74
2.3.7.	Aplied Theory Model Implementasi Kebijakan Menurut Jan Merse.....	75
BAB IIIMETODE PENELITIAN		77
3.1	Landasan Filosofi dan Pendekatan Penelitian	77
3.2	Objek, Informan Penelitian dan Tehnik Pengambilan Sampel	77
3.2.1	Objek Penelitian.....	77
3.2.2	Informan Penelitian.....	78
3.2.3	Teknik Pengambilan Sampel	79
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	79
3.3.1	Teknik Pengumpulan Data	79
3.3.2	Uji Keabsahan Data.....	80
3.3.3.	Sumber Data.....	81
3.4	Teknik Analisis Data	82
BAB IVPENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN		85
4.1	Deskripsi Lokasi Penelitian.....	85
4.1.1.	Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.....	85
4.2.	Penyajian Data.....	90
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN		95
5.1.	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bima.....	95

5.2. Model Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bima	107
BAB VI PENUTUP	115
6.1 Kesimpulan.....	115
6.1.1 Kesimpulan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bima	115
6.1.2 Kesimpulan Model Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bima	115
6.2 SARAN	116
DAFTAR PUSTAKA.....	119

DAFTAR TABEL

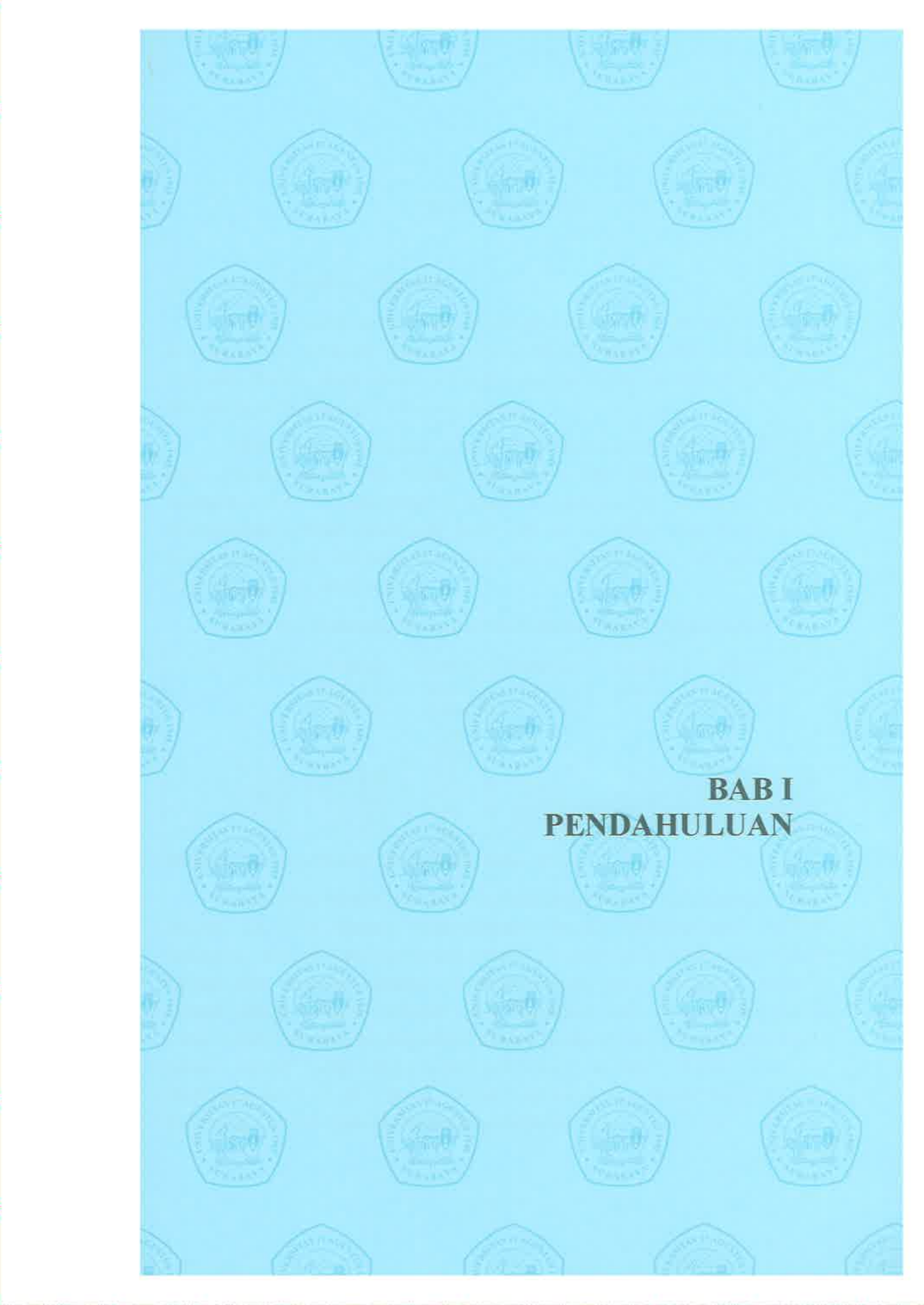
Tabel 1.1 Timbulan Sampah berdasarkan Jumlah penduduk	1
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 3.1 Tabel Informan	78
Tabel 4.1 Timbulan Sampah dan Jumlah penduduk.....	91
Tabel 4.2 Sarana Penanganan Sampah DLH Kota Bima	92
Tabel 4.3 Matriks Belanja pelayanan persampahan pada tahun 2021- 2023	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Tiga Elemen Sistem Kebijakan, Dunn, 2004.....	55
Gambar 2.2 Model Kesesuaian.....	69
Gambar 4.1 Peta Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima	85
Gambar 4.2 Kantor Dinas Lngkungan Hidup Kota Bima	85
Gambar 4.3 Struktur Organisasi DLH Kota Bima	89
Gambar 5.1 Pengumpulan Sampah di Rabadompu Barat	99
Gambar 5.2 Pengumpulan Sampah di taman paruga na'e.....	100
Gambar 5.3 Pengumpulan Sampah di Rabangodu Utara.	100
Gambar 5.4 Pengangkutan Sampah di Sadia.....	102
Gambar 5.5 Pengangkutan Sampah di BTN Santi	102
Gambar 5.6 Pengangkutan Sampah di Kelurahan Dara	103
Gambar 5.7 Pengangkutan Sampah di Kelurahan Paruga	103
Gambar 5.8 Kondisi Sampah di TPA Kota Bima.....	105
Gambar 5.9 Kondisi Sampah di TPA Kota Bima.....	106
Gambar 5.10 Kondisi Sampah di TPA Kota Bima.....	106
Gambar 5.11 Model Kesesuaian.....	107

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara dengan Kepala DLH Kota Bima	122
Lampiran 2 Wawancara dengan Sekertaris DLH Kota Bima.....	123
Lampiran 3 Wawancara dengan Kabid PSLB3 DLH Kota Bima	124
Lampiran 4 Wawancara dengan KUPT TPA DLH Kota Bima.....	125
Lampiran 5 Wawancara dengan Direktur BSI	126
Lampiran 6 Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kota Bima.....	127
Lampiran 7 Wawancara dengan pihak wartawan.....	128
Lampiran 8 Wawancara dengan Pihak Pegadaian.....	129
Lampiran 9 Wawancara dengan Pihak LSM.....	130
Lampiran 10 Kondisi Sampah Di Kota Bima.....	131
Lampiran 11 Kondisi Sampah Di Tpa.....	153
Lampiran 12 Isu Permasalahan Sampah Di Kota Bima	159
Lampiran 13 Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018.....	165
Lampiran 14 Pertanyaan Wawancara	171
Lampiran 15 Hasil Wawancara dengan Informan Penelitian	181
Lampiran 16 Hasil Wawancara Model Implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bima	190

The background of the entire page is a repeating pattern of the University of Indonesia (UI) logo. The logo is a circular emblem with a blue border. Inside the circle, there is a depiction of a traditional Indonesian building (Gedung Sate) and the text "UNIVERSITAS INDONESIA" and "YOGYAKARTA" around it.

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan sampah yang terjadi saat ini menjadi masalah yang serius di banyak kota, termasuk pada Kota Bima. Peningkatan jumlah penduduk dan konsumsi barang yang selalu meningkat menyebabkan volume sampah yang dihasilkan setiap tahunnya terus meningkat.

Jumlah penduduk yang ada di kota Bima ditahun 2023 berdasarkan data proyeksi BPS kota Bima sebesar 161.362 Jiwa. Jumlah tersebut meningkat 2,47 % dibandingkan tahun lalu sebesar 157.362 jiwa, dengan pertambahan jumlah penduduk pada saat ini sehingga membuat volume persampahan yang ada pada Kota Bima semakin meningkat dari tahun 2021-2023 dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Timbulan Sampah berdasarkan Jumlah penduduk

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Produksi Sampah/ Orang/ Hari (Kg)	Timbulan (Ton)	Terangkut (Ton)	Tidak Terkelola (Ton)	Ket
1	2021	156.224	0,5	78.112	538,65	77.573	Hari
2	2022	157.362	0,5	78.681	581,21	78.100	Hari
3	2023	161.362	0,5	80.681	581,21	80.100	Hari

Sumber : Bidang PSLB3 DLH Kota Bima, 2023

Pengertian Sampah terangkut adalah Sampah dari sumber sampah yang dibawa ke TPA dengan menggunakan Sarana pengangkutan sampah sedangkan sampah tidak terkelola adalah Sampah yang merupakan selisih sampah dari timbulan sampah dikurangi sampah yang terangkut. Timbulan sampah adalah sejumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu aktifitas dalam kurun waktu tertentu atau dengan kata lain banyaknya sampah yang dihasilkan dalam satuan berat (kg) gravimetri atau volume (liter) volumetri (Tchobanoglous et al, 2014). Dalam persampahan istilah yang lumrah digunakan adalah Timbulan dan bukan timbunan.

Tabel 1.1 tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan SNI 3242- 2008 tentang pengelolaan sampah di permukiman, Kota Bima termasuk dalam kategori Kota Sedang dimana produksi sampah per orang per hari sebesar 0,5 Kg per orang per hari. Angka produksi sampah per orang per hari ini dikalikan dengan jumlah penduduk (dalam jiwa) sehingga didapatkan angka timbulan sampah (dalam Ton).

Sampah tersebut dominan sampah domestik atau berupa sampah rumah tangga. Sampah-sampah tersebut dihasilkan dari wilayah pasar dan pusat pertokoan atau perbelanjaan serta di lingkungan warga Kota Bima. Sampah-sampah yang dihasilkan tersebut dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Yaitu TPA yang berada di Kelurahan Oi Mbo Kecamatan Rasanae Timur. Daya tampung TPA yang ada sekarang seluas 8 Ha. Jika dilihat daya tampung yang tersedia belum memadai atau belum mampu menampung timbulan sampah yang ada. Saat ini pemerintah Kota Bima sedang memproses penambahan luas area TPA. Pengangkutan hingga pembuangan sampah ke TPA menggunakan sistem pelayanan dari tingkat rumah tangga atau *door to door*. Sistem pelayanan tersebut yakni sampah dari wilayah Kelurahan akan diangkut menggunakan Kendaraan dump truck dan motor tiga roda. Setelah itu, akan dititipkan ke Tempat Pengolahan Sementara (TPS) yang sudah ditentukan yang nantinya akan diangkut atau disisir petugas kebersihan tingkat Kota. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima memiliki sarana layanan persampahan berupa 24 unit dump truck, 5 unit ambroll truck, 6 unit motor tiga roda, 37 unit kontainer, 2 unit mini loader, 1 wheel loader, 1 unit mobil *sweeper*, 1 unit mobil *compactor* dan 8 unit mobil pick up. Adapun sarana yang ada di TPA terdiri dari 1 unit Bangunan kantor, Garasi, Sumur Resapan, Kolam Lindi (Penampungan Air Limbah), Penampungan sampah (*Sanitary Landfill*) dan mobil excavator 2 Unit.

Pengelolaan sampah yang ada pada Kota Bima pada saat ini belum maksimal dilakukan disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang mengakibatkan terhambatnya pengelolaan sampah tersebut yaitu kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dalam memilah sampah organik dan non organik sebelum dibuang, sehingga sampah yang ada masih bercampur yang akhirnya menjadi sampah *residu* (yang tidak ada nilai) yang di angkut ke TPA, hal tersebut membuat pengelolaan sampah yang terjadi pada saat ini

belum sesuai prinsip 3R (*Reduce* , *Reuse* ,*Recycle*). Tanpa penerapan metode pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, hal ini dapat berpotensi membahayakan kesehatan dan merusak ekosistem seperti pemukiman, hutan, lahan pertanian, sungai, hingga lautan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Persampahan, pasal 9 berbunyi Pemilahan sampah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 huruf (a) dilakukan dengan cara mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya sedangkan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan non organik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus fasilitas umum dan fasilitas lainnya, Dalam Pasal 10 nomor 3 Tahun 2018 Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (b) dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampah ke TPA dengan tetap terjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah. Selain faktor di atas, faktor lain yang menghambatnya pengelolaan sampah di kota Bima yaitu banyaknya program dan inovasi – inovasi yang digagas oleh pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup kota Bima yang tidak berjalan secara efektif. Salah satu program yang sudah digagas adalah bank sampah Sesuai dengan pasal 15 nomor 2 bahwa bank sampah induk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bank sampah yang berdiri sendiri dan memiliki dasar keputusan dari pejabat berwenang setempat, memiliki struktur organisasi pengelola, memiliki nasabah bank sampah binaan, serta menjalankan bank sampah induk, namun bank sampah ini sudah tidak berjalan kembali. Selain itu dengan adanya surat edaran Wali Kota Bima No. 018/74/II/DLH/2023 yang menempatkan ASN sebagai duta pengelolaan sampah dengan memilah dan memilih sampah organik dan non organik yang ada di rumah dan dibawa ke kantornya masing – masing, program inipun tidak berjalan lagi. (tribun Lombok.com)

Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bima mencatat peningkatan volume sampah tiap tahunnya. Sistem pengelolaan sampah saat ini masih berorientasi pada mekanisme Kumpul-Angkut-Buang, sehingga sangat bergantung pada jumlah armada kebersihan yang dimiliki oleh pemerintah. Sedangkan jumlah armada kebersihan yang menangani masalah

persampahan sangat terbatas. Dari segi biaya, sistem pengelolaan sampah saat ini membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga perlu dicarikan alternatif lain.

Dunn menyatakan bahwa analisis kebijakan merupakan aktivitas yang melibatkan aspek intelektual dan praktis dengan tujuan menciptakan dan menilai secara kritis serta mengkomunikasikan pengetahuan dalam proses analisis kebijakan. Analisis kebijakan adalah proses yang menghasilkan informasi untuk membantu para pengambil keputusan dalam menilai pelaksanaan suatu kebijakan, yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan alternatif perbaikan. Proses ini bisa dilakukan secara formal dan terstruktur, biasanya melibatkan studi yang mendalam terkait isu-isu atau tantangan yang muncul dalam evaluasi program yang sudah berjalan. (Dunn 2018)

Oleh sebab itu, saya mengangkat penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bima Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang permasalahan di atas maka pada penelitian ini terdapat 2 rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bima?
2. Bagaimana Model Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bima?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi kebijakan Pengelolaan sampah di Kota Bima melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.
2. Untuk merumuskan model Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bima.

KERANGKA PIKIR

Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang hingga saat ini masih terjadi di kota-kota besar akibat pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi yang pesat. Ironisnya, permasalahan sampah yang sering muncul selama ini, tidak membuat seluruh stakeholder yang bertanggung jawab memiliki kepekaan untuk mengatasi masalah tersebut. Tidak jarang kita temukan di beberapa kota bahwa instansi yang bertugas dalam penanganan sampah kurang mampu mengatasi persoalan tersebut, sehingga pengelolaan sampah tidak berjalan secara efektif bahkan dapat memberikan dampak negative bagi kesehatan maupun lingkungan. Seperti yang terjadi di Kota Bima, bahwa pemerintah belum mampu mengatasi masalah sampah sehingga pengelolannya selama ini belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana yang dimiliki kurang memadai untuk pengoperasian pelaksanaan pengelolaan sampah, tidak adanya kegiatan pengurangan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) karena belum optimalnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pengurangan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), kinerja pelaksana implementasi kebijakan dalam penegakan Pengelolaan Sampah belum optimal. Oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi upaya pemerintah dalam menangani masalah tersebut.

Berdasarkan masalah yang diperoleh dari observasi serta landasan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kerangka pemikiran yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini yaitu :

1. Penanganan sampah masih berbasis pungut, angkut dan buang. Hal ini menyebabkan TPA yang tersedia sudah tidak mampu menampung sampah yang ada.
2. Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih sangat minim
3. Komitmen semua pihak dalam penanganan sampah masih jauh dari harapan
4. Adanya mindset yang salah, bahwa sampah merupakan tanggung jawab pemerintah.
5. Kemajuan industri digitalisasi dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang tinggi.

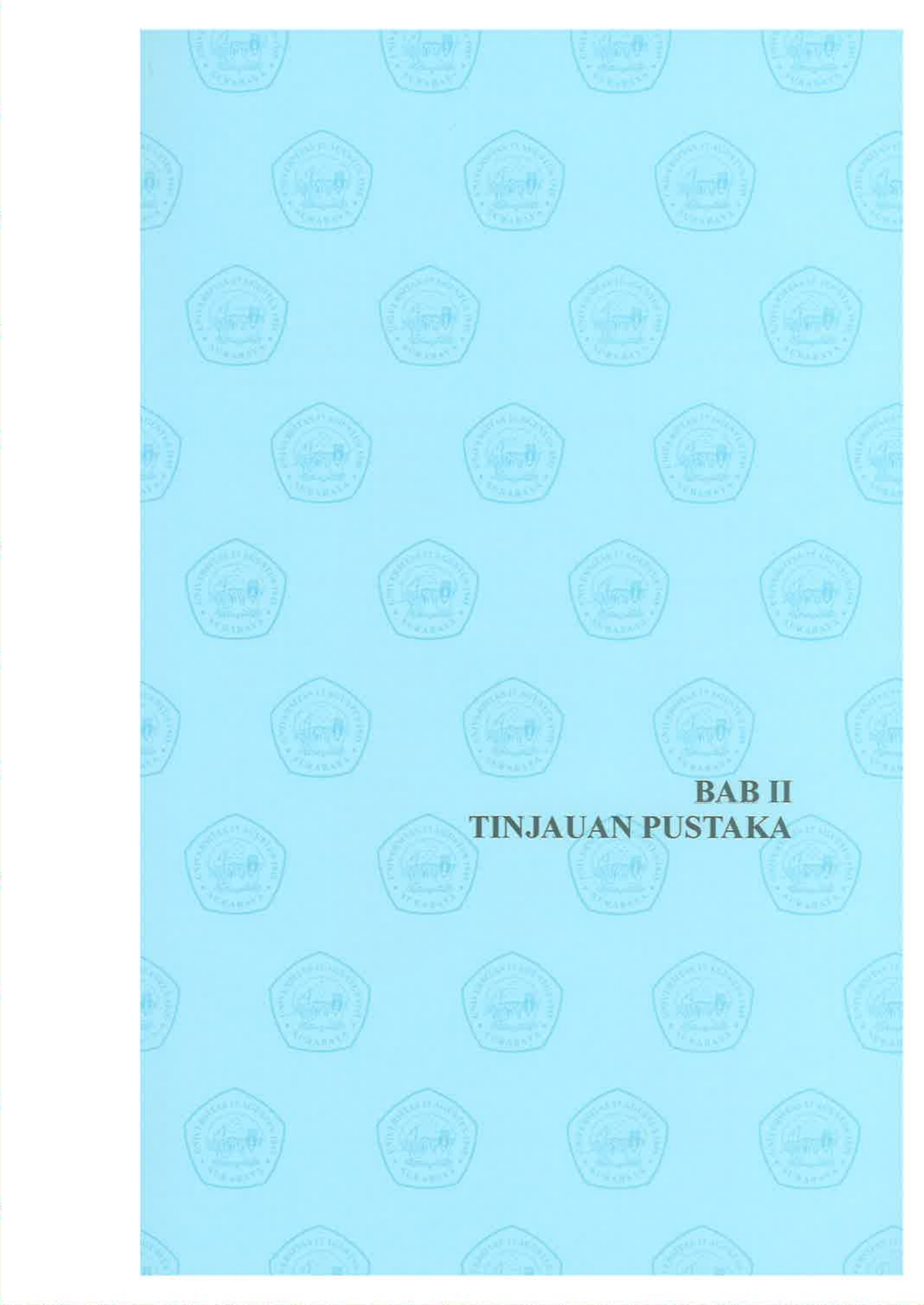
1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat secara Teoritis

Untuk pengembangan ilmu Administrasi dan kebijakan publik dan Analisis Implementasi kebijakan Pengelolaan sampah pada kota bima.

1.4.2 Manfaat secara Praktis

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian mengenai anal implementai kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bima melalui Di Lingkungan Hidup Kota Bima ini adalah agar masyarakat dapat mengeta bagaimana cara mengelola sampah yang dihasilkan dengan baik dan be melalui keterlibatan masyarakat dengan program – program dan inovasi y: telah dibuat oleh pemerintah Kota Bima. Manfaat yang diberikan t pemerintah daerah adalah untuk dapat memberikan informasi dan masul kepada Pemerintah Daerah Kota Bima sebagai bahan pertimbangan dal menentukan kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bima.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kebijakan pengelolaan sampah telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penulisan tesis ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Pertanyaan Kajian / Penelitian	Metode	Hasil (Rekomendasi)
1.	Linwei Du, Jian Zuo, Ruidong Chang, George Zillante, Liancheng Li, Anthony Carbone (2023)	Bagaimana efektivitas kebijakan pengelolaan limbah di Australia dalam meningkatkan tingkat daur ulang limbah dibandingkan dengan daerah yang tidak menerapkan kebijakan, dan bagaimana kebijakan tersebut mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)?	Penelitian ini menggunakan metode analisis varians pengukuran berulang (Anova) untuk menilai dampak kebijakan pengelolaan limbah padat. Metode ini dinilai inovatif karena mampu menilai efektivitas kebijakan dengan persyaratan data yang rendah dan mengatasi kompleksitas sosial serta lingkungan.	Artikel ini membahas efektivitas kebijakan persampahan di Australia dalam meningkatkan tingkat daur ulang limbah. Hasil studi menunjukkan bahwa daerah yang menerapkan kebijakan kombinasi memiliki tingkat daur ulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah tanpa kebijakan, yang justru mengalami penurunan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kebijakan yang fokus pada pengurangan limbah dan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Artikel ini memberikan wawasan tentang optimasi kebijakan pengelolaan limbah dan menjadi panduan bagi negara lain dalam merumuskan kebijakan serupa demi

No	Penulis (Tahun)	Pertanyaan Kajian / Penelitian	Metode	Hasil (Rekomendasi)
				keberlanjutan lingkungan.
2.	Lv, H., Li, Y., Yan, H. B., Wu, D., Shi, G., & Xu (2021)	Apa saja kebijakan pengelolaan limbah konstruksi yang diterapkan di daratan China, dan bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan limbah konstruksi?	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis kebijakan untuk mengevaluasi pengelolaan limbah konstruksi di China pada tingkat nasional, provinsi, dan municipal. Metode ini mencakup studi literatur untuk mengumpulkan dokumen kebijakan, analisis konten untuk menilai fokus kebijakan dan pergeserannya dari akhir ke awal rantai limbah, serta studi kasus pada empat kota: Beijing, Shenzhen, Xi'an, dan Changsha. Data dikumpulkan melalui tinjauan dokumen dan wawancara dengan pemangku kepentingan, sementara analisis tematik mengidentifikasi tema utama seperti penggunaan instrumen	Hasil riset ini menyoroti tantangan signifikan yang dihadapi dalam pengelolaan limbah konstruksi, yang mencakup sekitar 30% dari total limbah kota dan menjadi tantangan besar bagi pemerintah kota, terutama di negara-negara berkembang. Penelitian ini berfokus pada peningkatan kinerja pengelolaan limbah konstruksi di industri limbah konstruksi dan pembongkaran di Tiongkok melalui analisis kebijakan pada tiga tingkat pemerintahan: nasional, provinsi, dan kota. Empat kota utama yang dianalisis sebagai studi kasus adalah Beijing, Shenzhen, Xi'an, dan Changsha. Dari penelitian ini ditemukan beberapa hal penting: pertama, sekitar 44% kota di Tiongkok belum memiliki regulasi sendiri mengenai pengelolaan limbah konstruksi, sehingga perhatian lebih perlu diberikan. Kedua, fokus kebijakan telah bergeser dari tahap akhir rantai pengelolaan limbah konstruksi ke awal rantai tersebut, hingga mencakup seluruh rantai

No	Penulis (Tahun)	Pertanyaan Kajian / Penelitian	Metode	Hasil (Rekomendasi)
			keuangan dan teknologi serta komunikasi antar pemangku kepentingan.	Ketiga, instrumen keuangan dan teknologi terbukti dapat meningkatkan kinerja pengelolaan limbah. Keempat, teknologi dan instrumen baru berpotensi meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan, yang pada akhirnya dapat memperbaiki kinerja pengelolaan limbah konstruksi secara keseluruhan. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mengadopsi ekonomi sirkular di sektor konstruksi Tiongkok.
3.	Santana, L. R. B., Walchhütter, S., Slavov, T. N. B., & Russo, P. T (2022)	Bagaimana prinsip-prinsip dalam Kebijakan Nasional Limbah Padat Brasil diterapkan dalam pengelolaan limbah padat kota, dan sejauh mana kebijakan ini efektif dalam mencapai tujuan pengelolaan limbah yang berkelanjutan di tingkat municipal?	Metode yang digunakan adalah studi kuantitatif dengan analisis statistik terhadap 13 indikator yang disajikan dalam Sistem Informasi Nasional Brasil tentang Sanitasi untuk Limbah Padat selama periode 2010-2015.	Penelitian mengenai pengelolaan limbah padat kota (MSW) telah dilakukan di berbagai bidang untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan mengisi kekurangan pemahaman. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi praktik pengelolaan MSW atau sampah padat kota di 38 kota terbesar di Brasil (daerah dengan populasi lebih dari 500 ribu penduduk). Hasil analisis menunjukkan kepatuhan yang rendah terhadap prinsip-prinsip Kebijakan Nasional Brasil tentang Limbah Padat. Penelitian ini juga mengidentifikasi kesulitan dan peluang

No	Penulis (Tahun)	Pertanyaan Kajian / Penelitian	Metode	Hasil (Rekomendasi)
				dalam pengelolaan MSW. Misalnya, kota-kota yang menghasilkan volume limbah besar memiliki konsumsi populasi yang sebanding. Selanjutnya, studi ini mengamati efek positif dari penggunaan alat penyapu jalan terhadap jumlah total bahan yang dipulihkan dan didaur ulang. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menggaris bawahi perlunya perbaikan dalam kepatuhan terhadap kebijakan nasional dan peningkatan praktik pengelolaan limbah. Penekanan pada alat penyapu jalan menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan efisiensi dalam pemulihan dan daur ulang bahan, sementara penyesuaian dengan prinsip kebijakan dapat membantu mengatasi masalah yang ada dan memanfaatkan peluang dalam pengelolaan limbah padat di kota-kota besar di Brasil.
4.	Costa, I. D. M., Dias, M. F., & Robaina, M. (2022)	Bagaimana pengelolaan limbah padat perkotaan di kota-kota Brasil, dan faktor-faktor apa saja yang	Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil pengelolaan limbah padat kota (USWM) di 786 kota Brasil pada tahun 2018,	Penelitian ini mengevaluasi profil pengelolaan limbah padat kota (USWM) di 786 kota Brasil pada tahun 2018, dengan fokus pada proses pengumpulan limbah dan

No	Penulis (Tahun)	Pertanyaan Kajian / Penelitian	Metode	Hasil (Rekomendasi)
		mempengaruhi efektivitas pengelolaan limbah padat di berbagai kota tersebut?	dengan memanfaatkan data dari Sistem Informasi Sanitasi Nasional (SNIS) dan indikator sosio- ekonomi. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan kinerja kota-kota dalam hal kepatuhan terhadap NSWP, dengan fokus pada faktor-faktor seperti ukuran populasi, jenis model manajemen (Otoritas vs. Perusahaan Ekonomi Campuran), dan pembayaran oleh penghasil limbah. Temuan utama mencakup bahwa hanya 5,6% kota yang menunjukkan kepatuhan tinggi, umumnya terletak di wilayah lebih maju dengan GDP dan Indeks Pembangunan Manusia (MHDI) yang lebih tinggi.	kepatuhan terhadap Kebijakan Nasional Limbah Padat (NSWP). Studi ini menggunakan data dari Sistem Informasi Sanitasi Nasional (SNIS) dan indikator sosio-ekonomi untuk menganalisis perbedaan kinerja di tingkat negara, negara bagian, dan kota. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun ada konsensus tentang pentingnya daur ulang limbah, terdapat perbedaan signifikan dalam penerapan prinsip-prinsip manajemen limbah sirkular. Kota-kota dengan populasi besar (100.000 hingga lebih dari 500.000 jiwa) cenderung lebih patuh terhadap pedoman NSWP. Model manajemen seperti Otoritas dan Perusahaan Ekonomi Campuran menunjukkan kecenderungan lebih besar terhadap kepatuhan, dan pembayaran oleh penghasil limbah juga berpengaruh positif. Hanya 5,6% dari kota yang dinilai, yaitu 44 kota, menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap pedoman NSWP. Kota-kota ini umumnya berada di wilayah yang lebih maju

No	Penulis (Tahun)	Pertanyaan Kajian / Penelitian	Metode	Hasil (Rekomendasi)
				seperti Selatan dan Tenggara Brasil, memiliki GDP rata-rata yang lebih tinggi, dan Indeks Pembangunan Manusia (MHDI) yang sangat tinggi. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang tantangan dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pengelolaan limbah padat di Brasil.
5.	Fadlillah, F., Sofilda, E., & Sumiyarti, S (2024)	Seberapa efektif implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Jakarta Utara dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilannya ?	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dimulai dengan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk warga, operator, regulator, dan pejabat pemerintah terkait untuk memahami peran institusi, interpretasi, dan pelaksanaan kebijakan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara ini dianalisis menggunakan software Nvivo untuk	Penelitian ini menilai efektivitas kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Jakarta Utara. Dengan pertumbuhan populasi, sampah rumah tangga meningkat dan menyumbang 60% dari total sampah. Penelitian ini fokus pada peran institusi, interpretasi, pelaksanaan kebijakan, dan dampaknya. Kebijakan ini penting karena TPST Bantar Gebang sudah penuh. Menggunakan metode kualitatif, peneliti mewawancarai warga Jakarta Utara, operator, regulator, dan pejabat pemerintah terkait. Data dianalisis dengan software Nvivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor institusi dan interpretasi kebijakan mempengaruhi pelaksanaan program. Ditemukan juga adanya

No	Penulis (Tahun)	Pertanyaan Kajian / Penelitian	Metode	Hasil (Rekomendasi)
			mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola dalam pelaksanaan kebijakan serta dampaknya.	ketidakkonsistenan dan kurangnya kejelasan dalam sosialisasi peraturan, yang mempengaruhi efektivitas kebijakan.
6.	Berenjkar, P., Li, Y. Y., & Yuan, Q (2021)	Bagaimana penerapan dinamika sistem dalam berbagai praktik sistem manajemen limbah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan limbah, dan apa saja manfaat serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di berbagai konteks?	Penelitian ini menggunakan pendekatan sistem dinamis (SD) untuk menganalisis dan memahami struktur serta interaksi dalam sistem manajemen sampah global. Metode ini mencakup pengumpulan data dari studi literatur dan kasus-kasus internasional untuk membangun model SD yang mensimulasikan dampak berbagai kebijakan dan praktik pengelolaan sampah. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi efek dari variabel seperti pertumbuhan populasi dan tingkat daur ulang terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.	Penelitian ini membahas pentingnya manajemen sampah global untuk mengurangi dampak negatif ekonomi, sosial, dan lingkungan dari sampah, sambil mencapai tujuan keberlanjutan. Kompleksitas sistem manajemen sampah, yang melibatkan berbagai praktik, membuat sistem ini sulit dianalisis. Pendekatan sistem dinamis (SD) membantu dalam memahami dan menganalisis struktur, interaksi, dan perilaku sistem yang kompleks. Dengan menggunakan pendekatan ini, dampak komponen dasar dapat dievaluasi secara terintegrasi, dan dampak kebijakan yang mungkin diterapkan pada sistem dapat dipelajari untuk membuat keputusan yang tepat. Tinjauan ini merangkum berbagai aplikasi SD dalam praktik manajemen sampah di berbagai negara, termasuk pengelolaan sampah, pengurangan,

No	Penulis (Tahun)	Pertanyaan Kajian / Penelitian	Metode	Hasil (Rekomendasi)
				pemanfaatan kembali, daur ulang, dan pembuangan. Setiap studi mendukung target regional dalam lingkup lingkungan, sosial, dan ekonomi, seperti memperpanjang masa pakai tempat pembuangan akhir, menerapkan biaya pembuangan yang sesuai, mitigasi pemanasan global, dan penghematan energi. Variabel yang saling berinteraksi dalam sistem manajemen sampah (WMS) ditentukan berdasarkan masalah yang didefinisikan, tujuan akhir, dan jenis sampah. Secara umum, pertumbuhan populasi dan produk domestik bruto dapat meningkatkan jumlah sampah yang dihasilkan. Meskipun peningkatan pengurangan sampah, pemisahan sumber, dan tingkat daur ulang dapat mengurangi dampak lingkungan, hal ini belum tentu menguntungkan secara ekonomi. Insentif untuk memisahkan sampah dan pengetahuan tentang manajemen sampah selalu memiliki dampak positif pada sistem secara keseluruhan.
7.	Agovino, M., Cerciello, M.,	Bagaimana peraturan	Penelitian ini menggunakan	Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki

No	Penulis (Tahun)	Pertanyaan Kajian / Penelitian	Metode	Hasil (Rekomendasi)
	Musella, G., & Garofalo (2024)	pengelolaan limbah di Eropa mempengaruhi transisi menuju ekonomi sirkular, dan apa dampak dari perubahan regulasi terhadap pencapaian tujuan ekonomi sirkular berdasarkan analisis shift-and-share?	metode Analisis Shift-and-Share untuk mengevaluasi dampak peraturan pengelolaan sampah di negara-negara Uni Eropa terhadap pencapaian tujuan ekonomi sirkular, dengan mempertimbangkan karakteristik sosio-ekonomi dan demografis nasional. Data dari 28 negara UE antara 1995 dan 2018 digunakan untuk mengidentifikasi negara-negara seperti Estonia, Finlandia, Hongaria, Irlandia, Italia, Luksemburg, dan Slovenia yang berhasil menyelaraskan regulasi dengan arahan UE.	dampak peraturan pengelolaan sampah di Negara-negara Uni Eropa terhadap pencapaian tujuan ekonomi sirkular dengan mempertimbangkan karakteristik sosio-ekonomi dan demografis di tingkat nasional. Untuk itu, dengan menggunakan Analisis Shift-and-Share dengan data dari 28 negara UE antara 1995 dan 2018. Hasil temuan menunjukkan bahwa beberapa negara anggota, seperti Estonia, Finlandia, Hongaria, Irlandia, Italia, Luksemburg, dan Slovenia, berhasil menyelaraskan kerangka regulasi mereka dengan arahan UE dan menciptakan konteks sosio-ekonomi yang mendukung kerjasama antara warga negara dan badan pemerintah. Kerjasama ini, yang didorong oleh sikap pro-lingkungan yang luas di kalangan warga, pengelolaan sampah yang efisien oleh perusahaan khusus, dan pengawasan yang tepat terhadap kegiatan pengumpulan sampah oleh lembaga, memfasilitasi pencapaian tujuan ekonomi sirkular yang signifikan.

No	Penulis (Tahun)	Pertanyaan Kajian / Penelitian	Metode	Hasil (Rekomendasi)
8.	Thua Thien Hue, Vietnam. Penulis Nguyen, T., & Watanabe (2020)	Bagaimana motivasi otonom berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan limbah, dan bagaimana kerangka analisis dan pengembangan institusi yang telah disesuaikan dapat digunakan untuk mengkaji faktor- faktor ini?	Analisis konten dilakukan terhadap data kualitatif dan sekunder untuk menilai komponen relevan dari kerangka tersebut.	Penelitian ini mengkaji hubungan antara dukungan Pemerintah lokal, LSM, dan hasil proyek. Desain studi kasus diterapkan berdasarkan teori self determination dan kerangka analisis serta pengembangan institusi yang telah disesuaikan. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya upaya pemisahan sampah harus dilakukan oleh Pemerintah Lokal, yang disalurkan melalui kelompok bantuan yang terdiri dari pengumpul sampah dan kepala desa, serta atribut komunitas lainnya.
9.	Kala, K., & Bolia, N. B (2022)	Bagaimana pemodelan dinamika sistem dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami pengelolaan limbah informal, dan apa temuan utama terkait efektivitas serta tantangan dalam praktik pengelolaan limbah informal berdasarkan model ini?	Penelitian ini memperkenalkan model berbasis dinamika sistem menggunakan STELLA Architect untuk mengevaluasi dampak kebijakan dan strategi terhadap efektivitas pengelolaan sampah informal, dengan studi kasus di Delhi, India. Model ini menunjukkan bahwa memanfaatkan kekuatan sektor informal dapat memberikan	Penelitian ini memperkenalkan model berbasis dinamika sistem menggunakan perangkat lunak STELLA Architect untuk mengevaluasi dampak kebijakan dan strategi keputusan terhadap efektivitas pengelolaan sampah informal. Studi kasus di Delhi, India, digunakan untuk mendemonstrasikan model ini dan memberikan wawasan mengenai pengelolaan sampah perkotaan. Hasil model menunjukkan bahwa memanfaatkan kekuatan sektor informal dapat membawa manfaat ekonomi dan lingkungan

No	Penulis (Tahun)	Pertanyaan Kajian / Penelitian	Metode	Hasil (Rekomendasi)
			manfaat ekonomi dan lingkungan signifikan.	yang besar. Kebijakan yang efisien dapat mengurangi sampah yang dapat didaur ulang di tempat pembuangan akhir menjadi nol dan meningkatkan kapasitas daur ulang dari 39 persen menjadi 100 persen dalam 30 tahun. Peningkatan ini akan menguntungkan penggunaan lahan, mengurangi degradasi lingkungan, dan menurunkan biaya operasional dalam pengumpulan sampah formal.
10.	Khosravani, F., Abbasi, E., Choobchian, S., & Jalili Ghazizade, M. (2023)	Apa saja kriteria utama untuk sistem pengelolaan limbah perkotaan yang berkelanjutan, dan bagaimana analisis konten dapat mengidentifikasi serta mengevaluasi kriteria-kriteria tersebut dalam praktik pengelolaan limbah?	Studi ini dirancang untuk menganalisis secara menyeluruh pandangan para ahli dan konten dokumen yang berfokus pada tujuan dan kriteria sistem pengelolaan sampah berkelanjutan di Tehran, Iran. Menggunakan 27 dokumen bahan analisis nasional dan internasional serta 2 dokumen domestik terkait pengelolaan sampah dipilih dan dianalisis menggunakan analisis konten.	Tujuan pengelolaan sampah dibagi menjadi lima kategori umum: institusi (dengan penekanan pada integrasi dan inklusi elemen kunci sistem pengelolaan sampah perkotaan), teknis dan infrastruktur (dengan penekanan pada optimalisasi proses yang ada dalam penggunaan teknologi pengelolaan sampah perkotaan), lingkungan (dengan penekanan pada meminimalkan dampak kesehatan dan lingkungan yang merugikan), ekonomi (dengan penekanan pada keberlanjutan ekonomi dan finansial sistem pengelolaan sampah perkotaan), dan budaya-sosial (dengan

No	Penulis (Tahun)	Pertanyaan Kajian / Penelitian	Metode	Hasil (Rekomendasi)
			Selanjutnya, untuk merumuskan tujuan terkait kendala dan tantangan pengelolaan sampah dengan teknik focus group. Pada tahap ini, 24 ahli kunci di bidang pengelolaan sampah diwawancarai dalam 4 kelompok diskusi. Pengumpulan data dilakukan melalui perekaman audio, transkripsi percakapan secara verbatim, pencatatan, dan penulisan catatan lapangan hingga mencapai saturasi teoretis. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis konten dan pengkodean.	penekanan pada menarik partisipasi maksimal dari warga dan penerima layanan).
11.	Latifah Latifah, Fatmawati Fatmawati, Ilham Ilham, Abd Gafur, Purnomo Yustianto (2023)	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh mana Pemerintah Kabupaten Subang menerapkan kebijakan terkait	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif interpretatif dengan pendekatan fenomenologis untuk mengeksplorasi penerapan sistem	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan 5 Tahun 2018 belum berjalan optimal. Terdapat masalah seperti kurangnya fasilitas dan infrastruktur, seperti bank sampah milik pemerintah, sehingga

No	Penulis (Tahun)	Pertanyaan Kajian / Penelitian	Metode	Hasil (Rekomendasi)
		pengelolaan sampah.	e-performance pada pegawai pemerintah di Kabupaten Subang	manajemen layanan sampah masih rendah. Selain itu, sosialisasi yang belum maksimal menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah.
12.	Daka, M. (2019)	Bagaimana struktur dan fungsi jaringan tata kelola memengaruhi efektivitas manajemen sampah padat di Distrik Lusaka?	Studi ini menganalisis jaringan tata kelola dan tantangan dalam partisipasi publik dalam manajemen sampah padat. Dengan pendekatan metode campuran, melibatkan 121 responden, termasuk enam informan kunci dan 115 warga. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan kuesioner, lalu dianalisis menggunakan SPSS dan analisis konten.	Hasilnya menunjukkan bahwa perencanaan manajemen sampah dilakukan oleh berbagai aktor seperti Dewan Kota, perusahaan swasta, Komite Pengembangan Wilayah, anggota dewan, dan warga lokal. Namun, aktor yang memiliki pengaruh, seperti perusahaan swasta dan pejabat pemerintah, mendominasi keputusan, sementara pandangan warga sering diabaikan. Evaluasi dilakukan secara independen oleh berbagai aktor, tetapi warga terpinggirkan karena kurangnya struktur dan pertemuan untuk melibatkan mereka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jaringan tata kelola yang ada cenderung didominasi dan mengecualikan partisipasi warga.
13.	Galavote, T., Chaves, G. D. L. D., Yamane, L. H., & Siman, R. R. (2024).	Penelitian ini mengevaluasi dampak kebijakan publik terhadap potensi produksi listrik	Dengan menggunakan model Sistem Dinamis, penelitian ini memperkirakan produksi metana	

No	Penulis (Tahun)	Pertanyaan Kajian / Penelitian	Metode	Hasil (Rekomendasi)
		dari proyek gas landfill (LFG).	berdasarkan variasi jumlah dan komposisi sampah kota (MSW) seiring waktu.	
14.	Selepe, M. M. (2023).	Bagaimana mekanisme yang efektif dapat diterapkan untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan di sektor publik?	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat konseptual, dengan mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama. Penelitian ini juga mengevaluasi mekanisme desain kebijakan yang kuat dan mengidentifikasi risiko serta tantangan signifikan dalam kebijakan.	Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang sukses tergantung pada empat faktor utama: desain kebijakan, keterlibatan pemangku kepentingan, institusi dan konteks, serta strategi implementasi. Mempertimbangkan keempat aspek ini sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan publik untuk mengurangi kemungkinan kegagalan.
15.	Novato, V. D. O. L., Najberg, E., & Lotta, G. S. (2020).	Bagaimana persepsi birokrat tingkat menengah terhadap implementasi kebijakan publik, dan bagaimana persepsi tersebut memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan?	Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yang melibatkan penelitian dokumenter dan wawancara dengan MLB di UFG.	Hasil penelitian menunjukkan pentingnya dukungan institusional serta persiapan teknis dan emosional bagi MLB untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Secara empiris, penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun UFG gagal memenuhi tujuan global program REUNI, universitas ini berhasil mencapai sebagian besar pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Hal ini terutama terlihat dalam kebijakan

No	Penulis (Tahun)	Pertanyaan Kajian / Penelitian	Metode	Hasil (Rekomendasi)
				perluasan inklusi dan bantuan mahasiswa, yang mengubah UFG dari institusi yang awalnya hanya melayani kalangan elit menjadi institusi yang lebih inklusif. Semua birokrat tingkat menengah yang diwawancarai secara tegas mengakui pentingnya program REUNI bagi UFG, baik dari segi struktural maupun pendidikan. Mereka juga sepakat bahwa kinerja mereka bisa lebih optimal jika mereka mendapatkan dukungan dan persiapan yang memadai.
16.	Endah Ayu Kusuma, Nindya Christy Hamida, Nanda Widhianta, Qarra Salma Setiawan, Yudistira Widinugroho, 2024	Bagaimana mengetahui implementasi pengelolaan sampah rumah tangga di Kalurahan Baciro sebelum dan sesudah adanya kebijakan Program Gerakan Zero Sampah Anorganik, faktor-faktor yang berhubungan keberhasilan dan hambatan, serta relevansi penerapan pengelolaan sampah dengan	Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan mix method berupa penggabungan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kalurahan Baciro telah melaksanakan Surat Edaran dari Pj. Walikota Yogyakarta tentang Gerakan Zero Sampah Anorganik. Implementasi program ini berhasil mengurangi jumlah akhir sampah yang dibuang ke TPST Piyungan, menunjukkan efektivitas kebijakan dalam pengelolaan sampah. Program ini juga berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat, dengan adanya bank sampah yang terintegrasi ke dalam sistem JSS (Jogja Smart Service).

No	Penulis (Tahun)	Pertanyaan Kajian / Penelitian	Metode	Hasil (Rekomendasi)
		kondisi kesehatan di Kalurahan Baciro.		
17.	Tiwi Okhtafianny, Ria Ariani, 2023	Bagaimana menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen melibatkan pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pelaku usaha, dan masyarakat.	Hasil penelitian menunjukkan kendala utama dalam implementasi kebijakan ini. Komunikasi antara DLH dan masyarakat kurang optimal karena sosialisasi hanya saat Perda dikeluarkan dan tidak konsisten dalam waktu pelaksanaannya. Sumber daya manusia di DLH belum sesuai kebutuhan dan anggaran terbatas menjadi hambatan pelaksanaan kebijakan.
18.	Hasbi Shiddiq Fauzan, 2021	Bagaimana mengetahui strategi kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan imbas dari implementasi kebijakan terhadap efektivitas pengelolaan sampah	Metode yang dipergunakan pada penelitian ini merupakan metode kombinasi dengan pendekatan kualitatif dengan metode triangulasi, serta pendekatan kuantitatif memakai metode analisis regresi sederhana, informan dari kualitatif terdiri asal kepala Bidang Kebersihan. Sedangkan kuantitatif ialah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLH Kabupaten Garut telah menerapkan kebijakan pengelolaan sampah dengan baik, meskipun dampak dari implementasi kebijakan tersebut terhadap efektivitas pengelolaan sampah rumah tangga tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh pola sebaran data yang tidak sesuai dengan variabel yang diuji.

No	Penulis (Tahun)	Pertanyaan Kajian / Penelitian	Metode	Hasil (Rekomendasi)
			pengawas serta petugas kebersihan	
19.	Mutia Riksfardini, Qiqi Asmara, 2023	Bagaimana implementasi kebijakan penanganan sampah laut dan mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya ?	Dalam penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Hasil lingkungan implementasi yaitu indikator kekuasaan, strategi aktor terlibat, dilaksanakan oleh para aktor relevan sesuai program kebijakan penanganan sampah laut tetapi masih belum cukup karena masyarakat kurang peduli lingkungan serta belum optimalnya program punishment. Indikator kepatuhan pemerintah tanggap dalam merespons penanganan sampah laut dan masih perlu ditingkatkan kembali penanganannya.
20.	Aprilia Anggi Permatasari, Rutiana Dwi Wahyunengseh , 2022	Bagaimanakah cara mengidentifikas i pokok-pokok yang diatur dalam perda di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah serta mengetahui persamaan dan perbedaan setiap peraturan dan Keberhasilan suatu kebijakan menurut Grindle salah satunya dilihat dari isi kebijakan itu sendiri?	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian campuran, yakni kualitatif dengan pendekatan analisis data sekunder dan kuantitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam pokok- pokok yang diatur dalam peraturan daerah pengelolaan sampah di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dari tujuh aspek yang dianalisis, hanya aspek "Site of decision" yang menunjukkan kesamaan antara satu perda dengan lainnya, di mana posisi pengambilan keputusan selalu melibatkan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi dalam struktur pengambilan

No	Penulis (Tahun)	Pertanyaan Kajian / Penelitian	Metode	Hasil (Rekomendasi)
				keputusan, yang penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengelolaan sampah. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa seluruh peraturan daerah telah memenuhi indikator dalam Peraturan Presiden SDGs Nomor 59 Tahun 2017. Ini merupakan pencapaian yang signifikan, mengingat pentingnya integrasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam kebijakan lokal. Namun, meskipun metode pengelolaan sampah yang digunakan pada seluruh peraturan daerah menerapkan konsep 3R (reduce, reuse, recycle), penelitian ini mencatat bahwa penerapan konsep circular economy belum sepenuhnya terwujud. Konsep circular economy yang lebih komprehensif mencakup 5R (reduce, reuse, recycle, recovery, dan repair), dan hal ini menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan dalam kebijakan pengelolaan sampah di daerah tersebut.
21.	Rosecký, M., Šomplák, R., Slavík, J.,	Bagaimana faktor-faktor demografis,	Metode statistik tradisional seperti regresi linier dan	Hasilnya menunjukkan bahwa model regresi linier sering kali

No	Penulis (Tahun)	Pertanyaan Kajian / Penelitian	Metode	Hasil (Rekomendasi)
	Kalina, J., Bulková, G., & Bednár, J. (2021)	sosial-ekonomi, dan perilaku mempengaruhi tingkat produksi sampah perkotaan di berbagai tingkat wilayah dalam konteks penerapan kebijakan ekonomi sirkular?	model pembelajaran mesin berbasis pohon (seperti random forest) digunakan untuk menganalisis data.	memberikan keseimbangan yang baik antara akurasi dan interpretabilitas, sementara random forest adalah pilihan terbaik untuk akurasi tinggi. Namun, kualitas model menurun pada tingkat wilayah yang lebih rendah karena kualitas data yang lebih buruk dan variabilitas yang lebih tinggi. Struktur usia merupakan faktor penting di semua tingkatan wilayah, tetapi faktor lain seperti jumlah subjek ekonomi, pengeluaran, kepadatan penduduk, dan tingkat pendidikan juga signifikan.
22.	Ahmad Jamil Pasaribu, Muhammad Taslim, Abdur Rahim, 2024	Bagaimana menganalisis mitigasi sampah sesuai kebijakan di kota tangsel dengan menggunakan penelitian kepustakaan?	Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research). Metode ini melibatkan pencarian dan rekontruksi data dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di kota Tangerang belum efektif dalam mengurangi sampah yang di buang ke TPA Hal ini terjadi karena proses pengelolaan sampah tersebut belum di proses terlebih dahulu dan terbatasnya jumlah TPS3R. Oleh karna itu pemerintah Kota Tangsel harus mengembangkan strategi pengolahan sampah terlebih dahulu melalui TPS3R sehingga sampah yang di kirim di TPA berkurang.
23.	Maarifah Dahlan,	Bagaimana kebijakan	Jenis penelitian ini adalah	

No	Penulis (Tahun)	Pertanyaan Kajian / Penelitian	Metode	Hasil (Rekomendasi)
	Ahmad Al Yakin, Jumriana Angraeni Pajammari, 2024	pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar?	penelitian deskriptif kualitatif	
24.	Broto Susilo, A., Nabila, S. H., Negoro, H. A., & Utari, D. (2020).	Bagaimana tingkat partisipasi individu dalam komunitas memengaruhi efektivitas kebijakan pengelolaan sampah yang efektif?	Penelitian ini menggunakan metode regresi Ordinary Least Squares (OLS) dan data dari Survei Kehidupan Keluarga Indonesia untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang meningkatkan partisipasi individu dalam kebijakan pengelolaan sampah. Data partisipasi dan penanganan sampah dari 1.791 responden di Jakarta dianalisis, dengan fokus pada variabel yang mungkin mempengaruhi partisipasi mereka.	Hasilnya menunjukkan bahwa partisipasi dipengaruhi oleh frekuensi keterlibatan dalam kegiatan sosial, tingkat pendidikan, dan pengeluaran per kapita. Studi ini merekomendasikan peningkatan partisipasi melalui kegiatan sosial di tingkat akar rumput serta peningkatan pemberdayaan masyarakat.
25.	Lia Puspa Sari, Ju'im Thaap , Titi Darmi, 2021	Bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi kebijakan peraturan daerah Nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah telah menjalankan kebijakan sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan.

No	Penulis (Tahun)	Pertanyaan Kajian / Penelitian	Metode	Hasil (Rekomendasi)
				Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu telah sampai pada target grup, namun masih ditemukan kendala seperti kekurangan sarana dan prasarana, berimplikasi pada proses pengangkutan sampah. Simpulan penelitian ini bahwa analisis kebijakan pengelolaan sampah belum memberikan pengaruh sosial ekonomi untuk masyarakat
26.	Wahyu Pratama Tamba, Bambang Shergi Laksmmono, 2024	Bagaimana menganalisis pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Jakarta pada TPST Bantargebang sebagai bentuk kebijakan sosial	Metode studi dokumen digunakan untuk menelaah peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dengan analisis triangle	Hasil analisis konten kebijakan pengelolaan sampah Jakarta mengalami perubahan, namun belum teridentifikasi dengan jelas antara masyarakat Jakarta dan masyarakat terdampak. Adanya interaksi para aktor ditandai dengan sinergitas Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi, serta masyarakat selaku penerima kompensasi. Distribusi kompensasi dipengaruhi oleh empat konteks: situasional, struktural, budaya dan internasional. Peneliti merekomendasikan peninjauan kembali kebijakan dan peraturan Pengelolaan sampah dengan mengklasifikasikan tipologi masyarakat agar pengaturan hak dan

No	Penulis (Tahun)	Pertanyaan Kajian / Penelitian	Metode	Hasil (Rekomendasi)
				kewajiban semakin jelas, serta pengorbanan dan perlakuan hak masyarakat terdampak menjadi setara
27.	M Fajar Anugerah, Mhd Rafi Yahya, 2022	Bagaimana menggambarkan analisis rencana aksi bersih sampah Kota Pekanbaru yang dimaksudkan untuk merumuskan suatu konsep kebijakan Pemerintah terhadap	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif,	Hasil penelitian ini yaitu yang pertama dengan cara adanya dasar pemikiran perlunya rencana aksi daerah bersih sampah dengan dibuatnya peraturan daerah yang khusus mengatur tentang pengelolaan sampah di Pekanbaru. Kedua, keterlibatan terhadap kebijakan rencana aksi bersih sampah dengan melihat interegrasi yang terbangun antara konteks budaya dan sosial setempat. Ketiga, tersedianya konsep dan rencana untuk mewujudkan prosedur pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Keempat, strategi dasar yang meliputi penggalakkan kampanye dan edukasi pengelolaan sampah melalui 3R.
28.	Mohamad Iqbal, R. M. Mulyadin , Kuncoro Ariawan , & Subarudil, 2022	Bagaimanakah menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah DKI Jakarta menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah DKI Jakarta belum terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa kendala seperti anggaran yang besar namun belum digunakan secara optimal, kurangnya koordinasi antara pemerintah dan

No	Penulis (Tahun)	Pertanyaan Kajian / Penelitian	Metode	Hasil (Rekomendasi)
				swasta untuk membangun Intermediate Treatment Facilities (ITF) karena adanya faktor politik daerah. Beberapa program seperti bank sampah, 3R (reduce, reuse, recycle), dan Sampah Tanggung Jawab Bersama (Samtawa) diharapkan dapat mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta. Program-program ini perlu disampaikan melalui sosialisasi ke kelurahan, sekolah, dan PKK (Program Keluarga Sejahtera).
29.	Ahmad Rosandi Sakir, 2023	Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat di Kota Ambon	deskriptif kualitatif,	Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa aspek sumber daya, khususnya sarana penunjang seperti kendaraan pengangkut sampah, terindikasi belum optimal. Kendaraan tersebut dinilai masih kurang memadai bila dibandingkan dengan volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Secara khusus, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Mardika menunjukkan tingkat efektivitas pelaksanaan yang baik. Namun, terdapat kekurangan dalam segi efisiensi, terutama pada aspek

No	Penulis (Tahun)	Pertanyaan Kajian / Penelitian	Metode	Hasil (Rekomendasi)
				waktu penyelesaian yang masih belum sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan pada aspek- aspek tertentu, seperti manajemen sumber daya, guna meningkatkan efisiensi dan kesuksesan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Mardika Kota Ambon Provinsi Maluku.
30.	Muhammad Citra Husada Batubara, Muhammad Citra Husada Batubara, 2020	Bagaimana menganalisis pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong Kota Batam	Metode deskriptif dengan pendekatan	Hasil dari penelitian menunjukan secara umum bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong Kota Batam masih belum optimal. Pemerintah Kota dalam hal ini Kecamatan Bengkong dalam mengimplementasikan kebijakan belum berhasil membuat warga untuk memahami implementasi atau pelaksanaan 3R (reuse, reduce, recycle) yaitu menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang sampah. Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan informasi yang relevan dan mudah diterima oleh masyarakat agar pada pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh di Kota Batam khususnya

No	Penulis (Tahun)	Pertanyaan Kajian / Penelitian	Metode	Hasil (Rekomendasi)
				di Kecamatan Bengkong. Pelaksanaan implementasi kebijakan memerlukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat.

Sumber : Beberapa jurnal tersebar

2.2 Review Jurnal

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berjudul “*Effectiveness of Solid Waste Management Policies in Australia: An Exploratory Study*”, yang ditulis oleh Linwei Du, Jian Zuo, Ruidong Chang, George Zillante, Liancheng Li, dan Anthony Carbone, yang dipublikasikan dalam *Environmental Impact Assessment Review* (Scopus Q1, Impact Factor 9.8; citescore 12.6, ISSN Online: 1873-6432, ISSN Print: 0195-9255) pada tahun 2023.

Penelitian tersebut mengevaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Australia dan menemukan bahwa daerah dengan kebijakan kombinasi memiliki tingkat daur ulang yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah tanpa kebijakan. Studi ini juga menyoroti pentingnya kebijakan yang fokus pada pengurangan limbah dan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Berbeda dengan studi di Australia yang menggunakan metode analisis varians pengukuran berulang (Anova), penelitian ini berfokus pada Kota Bima, Indonesia, dengan konteks sosial dan lingkungan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat lokal, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti partisipasi masyarakat, kualitas infrastruktur, dan dukungan pemerintah daerah. Novelty dari penelitian ini terletak pada fokus pada konteks lokal dan penggunaan pendekatan kualitatif yang mendalam untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji indikator spesifik seperti partisipasi masyarakat dan dukungan infrastruktur, yang belum banyak dibahas dalam studi sebelumnya, memberikan wawasan baru tentang bagaimana faktor-faktor lokal mempengaruhi efektivitas kebijakan.

Penelitian berjudul "*Examining Construction Waste Management Policies in Mainland China for Potential Performance Improvements*" oleh Lv, H., Li, Y., Yan, H. B., Wu, D., Shi, G., dan Xu, Q, yang dipublikasikan dalam *Clean Technologies and Environmental Policy* (Scopus Q1 Volume 26, Issue 9; E-ISSN 1618- 9558, Print ISSN 1618-954X) pada tahun 2021, berfokus pada pengelolaan limbah konstruksi di Tiongkok.

Penelitian ini menyoroti tantangan signifikan dalam mengelola limbah konstruksi yang menyumbang sekitar 30% dari total limbah kota, terutama di negara berkembang. Penelitian ini menganalisis kebijakan di tingkat nasional, provinsi, dan kota, serta melakukan studi kasus di Beijing, Shenzhen, Xi'an, dan Changsha. Temuan utamanya mencakup kurangnya regulasi di sekitar 44% kota, pergeseran fokus kebijakan dari akhir ke awal rantai pengelolaan limbah, serta penggunaan instrumen keuangan dan teknologi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan limbah. Sementara itu, penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bima, Indonesia. Berbeda dengan studi Tiongkok, penelitian ini fokus pada dampak kebijakan terhadap daur ulang dan pengurangan limbah di tingkat kota, dengan pendekatan kualitatif yang mendalam. Novelty dari penelitian ini terletak pada penekanan pada konteks lokal, penggunaan indikator spesifik seperti partisipasi masyarakat dan dukungan infrastruktur, serta fokus pada pengurangan limbah dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pendekatan ini memberikan pemahaman baru tentang efektivitas kebijakan dalam konteks daerah berkembang, memperluas wawasan yang telah ada dari studi sebelumnya.

Selanjutnya Penelitian oleh Santana et al. yang berjudul "*Municipal Solid Waste Management: Analysing the Principles of the Brazilian National Solid Waste Policy*", yang dipublikasikan dalam *International Journal of Environment and Waste Management* (Volume 29, Issue 4, Tahun 2022, dengan Impact Factor 0.5, Scopus Q2), menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Kebijakan Nasional Brasil tentang Limbah Padat. Penelitian ini melakukan analisis statistik terhadap 13 indikator dari sistem informasi nasional, mengungkap rendahnya kepatuhan terhadap kebijakan serta menunjukkan manfaat spesifik dari penggunaan alat penyapu jalan dalam meningkatkan daur ulang. Di sisi

lain, penelitian tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bima, yang dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, fokus pada kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan tersebut. Menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi serta analisis data dengan model interaktif dari Miles dan Huberman, penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor penghambat seperti masalah komunikasi, keterbatasan sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kebaruan penelitian Kota Bima terletak pada analisis mendalam terhadap faktor-faktor penghambat di lapangan melalui metode kualitatif, memberikan wawasan yang lebih spesifik dan kontekstual mengenai tantangan dalam implementasi kebijakan.

Penelitian yang berjudul “*Analysis of the Solid Urban Waste Management Profile in Brazilian Municipalities*” oleh Costa, I. D. M., Dias, M. F., & Robaina, M, yang diterbitkan dalam *The Journal of Solid Waste Technology and Management* (Volume 48, Number 2, Mei 2022; Scopus Q4), memanfaatkan Sistem Informasi Sanitasi Nasional (SNIS) dan indikator sosio-ekonomi yang mencakup data statistik dari 786 kota Brasil untuk menganalisis proses pengumpulan limbah dan kepatuhan terhadap Kebijakan Nasional Limbah Padat (NSWP). Data ini memungkinkan analisis komparatif berdasarkan ukuran populasi, model manajemen, dan kepatuhan kebijakan di berbagai kota. Sebaliknya, penelitian di Kota Bima menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan lokal, observasi langsung, dan studi kasus. Pendekatan ini memberikan wawasan mendalam mengenai implementasi kebijakan secara lokal, faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi efektivitas kebijakan, serta tantangan dan peluang di lapangan. Dengan menggunakan data primer, penelitian ini memungkinkan analisis kualitatif yang lebih rinci tentang dampak kebijakan terhadap daur ulang dan pengurangan limbah, serta peran partisipasi masyarakat dan dukungan infrastruktur lokal, yang memberikan dimensi tambahan dalam pemahaman efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di konteks lokal.

Kemudian Penelitian yang berjudul “*Effectiveness of Implementation of Household Waste Management Policy in North Jakarta*”. Oleh Fadlillah, F., Sofilda, E., & Sumiyarti, S, Penelitian ini, yang diterbitkan dalam *The Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* (Vol 7 No 3, 2024; e-ISSN: 2621-606X; Sinta 3), menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan seperti warga, operator, regulator, dan pejabat pemerintah di Jakarta Utara. Data tersebut dianalisis dengan software Nvivo untuk mengidentifikasi tema- tema utama dan pola-pola dalam pelaksanaan kebijakan serta dampaknya. Kebaruan penelitian Kota Bima terletak pada analisis mendalam terhadap kebijakan-kebijakan dalam Implementasi pengelolaan persampahan nomor 3 tahun 2018 dengan proses pengumpulan data melalui wawancara dengan para informan kunci dan pendukung yang ada pada kota bima serta melihat hubungan antar tiga elemen sistem kebijakan yaitu pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan dan kebijakan publik dalam kolaborasinya untuk mengimplementasi perda nomor 3 tahun 2018.

Penelitian yang berjudul “*The application of system dynamics in local practices of a waste management system*” oleh Berenjkar, P., Li, Y. Y., & Yuan, Q, (Volume 23, Issn 1931801, H- INDEX 83,30 maret 2021, JMIR Publications). Penelitian ini menggunakan pendekatan dinamis (SD) untuk menganalisis dan memahami struktur serta interaksi dalam manajemen sampah global. Metode ini mencakup pengumpulan data dari studi literatur dan kasus- kasus internasional untuk membangun model SD yang mensimulasikan dampak berbagai kebijakan dan praktik pengelolaan sampah. Analisis yang dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi efek dari ini berupa pertumbuhan dan bagaimana interaksi tersebut memengaruhi efektivitas kebijakan pengelolaan sampah secara keseluruhan.

Sebagai pembaruan dari penelitian ini, studi di Kota Bima menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara mendalam. Wawancara ini berfokus pada implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengurangi jumlah sampah di Kota Bima, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai tantangan

dan keberhasilan yang dihadapi. Dengan pendekatan ini, diharapkan analisis yang dihasilkan dapat mengintegrasikan temuan dari penelitian sebelumnya dan memberikan rekomendasi yang lebih efektif untuk pengelolaan sampah yang berkelanjutan di daerah tersebut terkhususnya di Kota Bima

Penelitian yang berjudul “*European waste management regulations and the transition towards circular economy. A shift and share analysis*” oleh Agovino, M., Cerciello, M., Musella, G., & Garofalo (2024) (Volume 8 Issue 3, Pages 369-383, H-INDEX 83, Publication TYPE Journals, ISSN 21931801).

Penelitian ini menggunakan metode Analisis Shift-and-Share untuk mengevaluasi dampak peraturan pengelolaan sampah di negara-negara Uni Eropa terhadap pencapaian tujuan ekonomi sirkular, dengan mempertimbangkan karakteristik sosio-ekonomi dan demografis nasional. Data dari 28 negara UE antara 1995 dan 2018 digunakan untuk mengidentifikasi negara-negara seperti Estonia, Finlandia, Hongaria, Irlandia, Italia, Luksemburg, dan Slovenia yang berhasil menyelaraskan regulasi dengan arahan UE. Dengan hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak peraturan pengelolaan sampah di Negara-negara Uni Eropa terhadap pencapaian tujuan ekonomi sirkular dengan mempertimbangkan karakteristik sosio-ekonomi dan demografis di tingkat nasional. Untuk itu, dengan menggunakan Analisis Shift-and-Share dengan data dari 28 negara UE antara 1995 dan 2018. Hasil temuan menunjukkan bahwa beberapa negara anggota, seperti Estonia, Finlandia, Hongaria, Irlandia, Italia, Luksemburg, dan Slovenia, berhasil menyelaraskan kerangka regulasi mereka dengan arahan UE dan menciptakan konteks sosio-ekonomi yang mendukung kerjasama antara warga negara dan badan pemerintah. Kerjasama ini, yang didorong oleh sikap pro-lingkungan yang luas di kalangan warga, pengelolaan sampah yang efisien oleh perusahaan khusus, dan pengawasan yang tepat terhadap kegiatan pengumpulan sampah oleh lembaga, memfasilitasi pencapaian tujuan ekonomi sirkular yang signifikan. Pembaruan dari Penelitian yang dilakukan di Kota Bima mengadopsi metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan naturalistik. Wawancara dengan informan menjadi salah satu cara untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan mengidentifikasi hambatan yang muncul. Studi kasus ini terfokus pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, dengan tujuan untuk

mengevaluasi seberapa efektif pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018.

Penelitian yang berjudul “*Autonomous Motivation for the Successful Implementation of Waste Management Policy: An Examination Using an Adapted Institutional Analysis and Development Framework in Thua Thien Hue, Vietnam*” oleh Thua Thien Hue, Vietnam. Penulis Nguyen, T., & Watanabe (2020) (Scopus Q1, ISSN 20711050, H-INDEX 169).

Penelitian ini mengkaji hubungan antara dukungan pemerintah lokal, LSM, dan hasil proyek dengan menerapkan desain studi kasus berdasarkan teori self-determination serta kerangka analisis dan pengembangan institusi yang telah disesuaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemisahan sampah harus menjadi tanggung jawab pemerintah lokal, yang disalurkan melalui kelompok bantuan yang terdiri dari pengumpul sampah, kepala desa, dan atribut komunitas lainnya. Temuan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan komunitas dalam mencapai hasil yang efektif dalam pengelolaan sampah. Sebagai pembaruan dari penelitian ini, analisis selanjutnya berfokus pada implementasi kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 terkait pengelolaan dan pengurangan sampah. Dalam konteks ini, proses pemilahan dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan menjadi titik penekanan, dengan harapan agar pemerintah didorong untuk memperkuat penegakan kebijakan ini. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk mengurangi volume sampah di Kota Bima. Selain itu, perlu dilakukan eksplorasi lebih mendalam mengenai tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memilah serta mengelola sampah, untuk memahami kendala yang muncul di tingkat sumber. Dengan penekanan pada strategi jangka panjang, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan solusi berkelanjutan bagi pengelolaan sampah di Kota Bima dan mengintegrasikan temuan sebelumnya guna meningkatkan efektivitas kebijakan yang ada.

Penelitian yang berjudul “*Analysis of informal waste management using system dynamic modelling*” oleh Kala, K., & Bolia, N. B (2022) (Scopus Q1, ISSN 24058440, H-Index 88). Penelitian ini memperkenalkan model berbasis dinamika sistem menggunakan *STELLA Architect* untuk mengevaluasi dampak kebijakan dan strategi terhadap efektivitas pengelolaan

sampah informal, dengan studi kasus di Delhi, India. Model ini menunjukkan bahwa memanfaatkan kekuatan sektor informal dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan signifikan. Pembaharuan dari Penelitian di Kota Bima menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan naturalistik. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan informan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul. Studi kasus difokuskan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, dengan tujuan untuk mengevaluasi seberapa optimal pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018.

Penelitian yang berjudul *“A comprehensive study on criteria of sustainable urban waste management system: using content analysis”* oleh Khosravani, F., Abbasi, E., Choobchian, S., & Jalili Ghazizade, M. (2023) (Scopus Q1, H-INDEX 315, ISSN 20452322).

Studi ini dirancang untuk menganalisis secara menyeluruh pandangan para ahli dan konten dokumen yang berfokus pada tujuan dan kriteria sistem pengelolaan sampah berkelanjutan di Tehran, Iran. Menggunakan 27 dokumen bahan analisis nasional dan internasional serta 2 dokumen domestik terkait pengelolaan sampah dipilih dan dianalisis menggunakan analisis konten. Selanjutnya, untuk merumuskan tujuan terkait kendala dan tantangan pengelolaan sampah dengan teknik focus group. Pada tahap ini, 24 ahli kunci di bidang pengelolaan sampah diwawancarai dalam 4 kelompok diskusi. Pengumpulan data dilakukan melalui perekaman audio, transkripsi percakapan secara verbatim, pencatatan, dan penulisan catatan lapangan hingga mencapai saturasi teoretis. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis konten dan pengkodean hasil penelitian menggunakan teknologi pengelolaan sampah perkotaan), lingkungan (dengan penekanan pada meminimalkan dampak kesehatan dan lingkungan yang merugikan), ekonomi (dengan penekanan pada keberlanjutan ekonomi dan finansial sistem pengelolaan sampah perkotaan), dan budaya-sosial (dengan penekanan pada menarik partisipasi maksimal dari warga dan penerima layanan). Pembaharuan dari Penelitian yang dilakukan di Kota Bima dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif yang mengadopsi pendekatan naturalistik. Dalam studi ini, wawancara dengan informan digunakan untuk menganalisis pelaksanaan

kebijakan pengelolaan sampah dan mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul. Fokus studi kasus adalah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah, sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018, diterapkan secara optimal.

Penelitian yang berjudul “*Government Policy in Community Waste Management: A Case Study of Waste Management in Subang Regency*” oleh Latifah Latifah, Fatmawati Fatmawati, Ilham Ilham, Abd Gafur, Purnomo Yustianto (2023). (Scopus Q1, H-INDEX 315, ISSN 20452322)

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi Peraturan No. 5 Tahun 2018 belum berjalan optimal. Terdapat berbagai masalah yang diidentifikasi, seperti kurangnya fasilitas dan infrastruktur, termasuk bank sampah milik pemerintah, yang menyebabkan manajemen layanan sampah masih rendah. Selain itu, sosialisasi yang belum maksimal turut berkontribusi pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah dengan benar, sehingga menghambat efektivitas kebijakan pengelolaan sampah. Sebagai pembaruan dari penelitian ini, studi di Kota Bima menganalisis kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan No. 3 Tahun 2018 dengan melakukan kajian mendalam mengenai hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi sejauh mana implementasi kebijakan tersebut telah berjalan secara optimal, tetapi juga meneliti tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan ini. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang tantangan yang dihadapi serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Bima.

Penelitian yang berjudul “*Governance Networks and Public Participation In Solid Waste Management In Urban AREAS: The Case Of Lusaka District*” oleh Daka, M. (2019) (Scopus Q1, Impact Factor 9.8; citescore 12.6, ISSN Online: 1873-6432, ISSN Print: 0195-9255)

Hasilnya menunjukkan bahwa perencanaan manajemen sampah dilakukan oleh berbagai aktor seperti Dewan Kota, perusahaan swasta, Komite Pengembangan Wilayah, anggota dewan, dan warga lokal. Namun, aktor yang

memiliki pengaruh, seperti perusahaan swasta dan pejabat pemerintah, mendominasi keputusan, sementara pandangan warga sering diabaikan. Evaluasi dilakukan secara independen oleh berbagai aktor, tetapi warga terpinggirkan karena kurangnya struktur dan pertemuan untuk melibatkan mereka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jaringan tata kelola yang ada cenderung didominasi dan mengecualikan partisipasi warga. Dalam konteks ini, penelitian di Kota Bima menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan naturalistik untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan informan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dan berfokus pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018, dengan harapan dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai perlunya meningkatkan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian yang berjudul “*Barreiras que afetam a sustentabilidade financeira de sistemas de gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos*” Barriers that affect the financial sustainability of integrated management systems of urban solid waste oleh Galavote, T., Chaves, G. D. L. D., Yamane, L. H., & Siman, R. R. (2024). brumati d.v (Scopus Q1, ISSN 2175-3369).

Hasil menunjukkan bahwa semua skenario tidak layak secara ekonomi kecuali dengan pendapatan tambahan dari kredit karbon. Namun, semua skenario bisa menjadi layak jika tarif penjualan energi dinaikkan di atas 93,2 USD.MWh⁻¹. Alternatif lain adalah dengan menurunkan tingkat diskonto melalui insentif pemerintah hingga di bawah 10% dan mengurangi biaya investasi hingga di bawah 77% dari nilai aslinya. Elemen-elemen ini membantu dalam perencanaan jangka panjang dan memberikan gambaran kepada pengambil kebijakan tentang dampak kebijakan ini di masa depan penelitian ini Dengan menggunakan model Sistem Dinamis, penelitian ini memperkirakan produksi metana berdasarkan variasi jumlah dan komposisi sampah kota (MSW) seiring waktu. Sedangkan Metode yang digunakan dalam penelitian di Kota Bima adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan naturalistik. Penelitian ini melibatkan wawancara informan untuk

menganalisis pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dan mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul. Fokus dari studi kasus adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018, telah dilakukan dengan baik.

Penelitian yang berjudul *“The Evaluation Of Public Policy Implementation Failures And Possible Solurions”* oleh Selepe, M. M. (2023). (Scopus Q3, H-INDEX 16 ISSN 1697011X). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat konseptual, dengan mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama. Penelitian ini juga mengevaluasi mekanisme desain kebijakan yang kuat dan mengidentifikasi risiko serta tantangan signifikan dalam kebijakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang sukses tergantung pada empat faktor utama: desain kebijakan, keterlibatan pemangku kepentingan, institusi dan konteks, serta strategi implementasi. Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian di Kota Bima menggunakan pendekatan kualitatif dan metode naturalistik untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Proses penelitian dilakukan secara alami dengan menerapkan teknik purposive sampling dalam pemilihan informan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut telah diimplementasikan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi.

Penelitian yang berjudul *“Mid - level bureaucrats perception on the implementation of public policies”* oleh Novato, V. D. O. L., Najberg, E., & Lotta, G. S. (2020). (Scopus q2, H-INDEX 23 , ISSN 00347612, 19823134).

Hasil penelitian menunjukkan pentingnya dukungan institusional serta persiapan teknis dan emosional bagi MLB untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Secara empiris, penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun UFG gagal memenuhi tujuan global program REUNI, universitas ini berhasil mencapai sebagian besar pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yang melibatkan penelitian dokumenter dan wawancara dengan MLB di UFG. Penelitian di Kota Bima meneliti secara mendalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan No. 3 Tahun 2018, serta mengidentifikasi

berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling.

Penelitian yang berjudul “*Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Level Rumah Tangga di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta*”. Oleh Endah Ayu Kusuma, Nindya Christy Hamida, Nanda Widhianta, Qarra Salma Setiawan, Yudistira Widinugroho, (Volume 6, Issue 1, Tahun 2023, dengan Impact Factor 1.7, Sinta 4) dengan penelitian yang berfokus pada implementasi kebijakan Program Gerakan Zero Sampah Anorganik dan dampaknya terhadap pengelolaan sampah serta kesehatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Baciro telah melaksanakan Surat Edaran dari Pj. Walikota Yogyakarta tentang Gerakan Zero Sampah Anorganik. Implementasi program ini berhasil mengurangi jumlah akhir sampah yang dibuang ke TPST Piyungan, menunjukkan efektivitas kebijakan dalam pengelolaan sampah. Program ini juga berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat, dengan adanya bank sampah yang terintegrasi ke dalam sistem JSS (Jogja Smart Service). Adapun Kelebihan dari penelitian ini yang mendukung keberhasilan pengelolaan sampah di Kelurahan Baciro yaitu memiliki ketersediaan lahan yang cukup dan meningkatnya sosialisasi atau penyuluhan mengenai pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dan stakeholder dalam memberikan informasi dan fasilitas yang memadai untuk mendukung program pengelolaan sampah. Penelitian yang saya angkat dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan sampah pada Kota Bima studi kasus Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima” yang berfokus pada analisis kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir maka pembaharuan dari penelitian ini yaitu penelitian melakukan penelitian yang mendalam terhadap Analisis Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bima .

Penelitian yang berjudul “*Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Payakumbuh*” Oleh Tiwi Okhtafianny, Ria Ariani. (Volume 3, Issue 2, Tahun 2023, dengan Impact Factor 0.9, Sinta 5). Penelitian ini menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang lebih memadai

untuk mendukung pelaksanaan program pengelolaan sampah secara efektif. Tanpa anggaran yang cukup, upaya dalam mengelola sampah tidak akan dapat berjalan secara optimal. Penelitian ini juga menyarankan DLH untuk memperluas sosialisasi menggunakan berbagai media dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam program pengelolaan sampah. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, penelitian juga dapat melibatkan lebih banyak responden dari masyarakat untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pembaruan dari Penelitian di Kota Bima berfokus pada analisis implementasi kebijakan terkait Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 dengan tujuan mengidentifikasi hambatan dalam pengelolaan sampah yang diatur oleh peraturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan sampah sesuai dengan amanat Perda atau tidak. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana Perda ini dilaksanakan serta apakah terdapat kendala dalam penerapannya. Selain itu, peneliti mendorong semua pihak untuk berperan aktif dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah yang tertuang dalam Perda No. 3 Tahun 2018.

Penelitian yang berjudul “*Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Garut*” oleh Hasti Shiddiq Fauzan, (Volume 3, Issue 2, Tahun 2023, Factor impact 0.9, Sinta 5)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLH Kabupaten Garut telah menerapkan kebijakan pengelolaan sampah dengan baik, meskipun dampak dari implementasi kebijakan tersebut terhadap efektivitas pengelolaan sampah rumah tangga tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh pola sebaran data yang tidak sesuai dengan variabel yang diuji. Dengan demikian, jurnal ini tidak hanya memberikan analisis yang komprehensif tentang kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Garut, tetapi juga menyajikan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan di masa depan. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan sampah dan lingkungan. Pembaruan penelitian yang dilakukan di Kota Bima mencakup analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah

dengan mempertimbangkan dinamika masyarakat dan kondisi ekonomi lokal. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam terkait tantangan yang dihadapi serta bagaimana penerapan kebijakan dapat disesuaikan dengan karakter masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini juga menyajikan gambaran akurat mengenai kebijakan yang diterapkan di Kota Bima melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018.

Penelitian yang berjudul “*Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Laut di Wilayah Pesisir Muara Angke Jakarta Utara*” oleh Mutia Riksfardini, Qiqi Asmara (Volume 1, Issue 2, Tahun 2023; 217-236, Sinta 5).

Hasil Penelitian ini yaitu lingkungan implementasi yaitu indikator kekuasaan, strategi aktor terlibat, dilaksanakan oleh para aktor relevan sesuai program kebijakan penanganan sampah laut tetapi masih belum cukup karena masyarakat kurang peduli lingkungan serta belum optimalnya program punishment. Indikator kepatuhan pemerintah tanggap dalam merespons penanganan sampah laut dan masih perlu ditingkatkan kembali penanganannya. Penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut memiliki indikator kepentingan yang jelas. Kebijakan ini tidak didasarkan pada kepentingan individu, melainkan pada kepentingan bersama untuk mengatasi pencemaran laut. Dampak positif dari kebijakan ini dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah, meskipun derajat perubahan yang diinginkan masih belum cukup. Sedangkan dampak negatifnya yakni masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan menjadi faktor penghambat utama. Pembaruan penelitian yang dilakukan di Kota Bima melibatkan analisis terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018, dengan fokus pada kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasi, serta menawarkan solusi dan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu rekomendasinya adalah membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, sehingga kebijakan pengelolaan sampah dapat dijalankan secara konsisten dan lebih tegas oleh pemerintah daerah Kota Bima.

Penelitian yang berjudul “*Analisis Isi Kebijakan Perbandingan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah Tahun 2017-2021*” oleh Aprilia Anggi Permatasari, Rutiana Dwi Wahyunengseh (Volume 2, Issue 2, Tahun 2022, Factor Impact 2.0, Sinta 5)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam pokok-pokok yang diatur dalam peraturan daerah pengelolaan sampah di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dari tujuh aspek yang dianalisis, hanya aspek "Site of decision" yang menunjukkan kesamaan antara satu perda dengan lainnya, di mana posisi pengambilan keputusan selalu melibatkan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi dalam struktur pengambilan keputusan, yang penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengelolaan sampah. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa seluruh peraturan daerah telah memenuhi indikator dalam Peraturan Presiden SDGs Nomor 59 Tahun 2017. Ini merupakan pencapaian yang signifikan, mengingat pentingnya integrasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam kebijakan lokal. Namun, meskipun metode pengelolaan sampah yang digunakan pada seluruh peraturan daerah menerapkan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*), penelitian ini mencatat bahwa penerapan konsep circular economy belum sepenuhnya terwujud. Konsep circular economy yang lebih komprehensif mencakup 5R (*reduce, reuse, recycle, recovery, dan repair*), dan hal ini menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan dalam kebijakan pengelolaan sampah di daerah tersebut. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga mengenai bagaimana kebijakan lokal dapat beradaptasi dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembaruan penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan peraturan daerah dalam pengelolaan sampah di Kota Bima. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan kunci untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang pelaksanaan kebijakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor lokal yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bima.

Penelitian yang berjudul “*Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan*” oleh Ahmad Jamil Pasaribu, Muhammad Taslim, Abdur Rahim (Volume 18, Issue 10, Tahun 2022, Impact Factors 2.0, Sinta 5).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di kota Tangerang belum efektif dalam mengurangi sampah yang di buang ke TPA Hal ini terjadi karena proses pengelolaan sampah tersebut belum di proses terlebih dahulu dan terbatasnya jumlah TPS 3R. Oleh karna itu pemerintah Kota Tangsel harus mengembangkan strategi pengolahan sampah terlebih dahulu melalui TPS 3R sebelum sampah tersebut di kirim di TPA. Pembaruan penelitian ini berfokus pada analisis implementasi kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 mengenai pengelolaan dan pengurangan sampah. Penekanan diberikan pada pentingnya proses pemilahan dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Peneliti berupaya mendorong pemerintah untuk memperkuat penegakan kebijakan ini, serta menekankan perlunya kolaborasi dengan berbagai pihak terkait guna mengurangi volume sampah di Kota Bima. Selain itu, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memilah serta mengelola sampah perlu dieksplorasi lebih mendalam untuk memahami kendala di tingkat sumber. Dengan fokus pada strategi jangka panjang, penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi berkelanjutan bagi pengelolaan sampah di Kota Bima.

Penelitian yang berjudul “*Predictive modelling as a tool for effective municipal waste management policy at different territorial levels*” oleh Rosecký, M., Šomplák, R., Slavík, J., Kalina, J., Bulková, G., & Bednář, J. (2021) yang di terbitkan dalam *The Journal of Environmental Management* (Scopus Q1 , Volume 291)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model regresi linier sering kali memberikan keseimbangan yang baik antara akurasi dan interpretabilitas, sementara model random forest terbukti menjadi pilihan terbaik untuk mencapai akurasi tinggi. Namun, kualitas model mengalami penurunan pada tingkat wilayah yang lebih rendah, disebabkan oleh kualitas data yang lebih buruk dan variabilitas yang lebih tinggi. Selain itu, struktur usia diidentifikasi sebagai faktor penting di semua tingkatan wilayah, meskipun faktor-faktor lain seperti jumlah subjek ekonomi, pengeluaran, kepadatan penduduk, dan tingkat pendidikan juga menunjukkan signifikansi yang tinggi. Temuan ini

menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan berbagai variabel dalam analisis data untuk memastikan pemodelan yang lebih akurat di berbagai konteks regional. Sebagai pembaruan dari penelitian ini, studi di Kota Bima melanjutkan penelitian dengan fokus pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan No. 3 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut, serta bagaimana faktor-faktor yang diungkapkan dalam studi sebelumnya, seperti kepadatan penduduk dan tingkat pendidikan, dapat berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, studi ini melakukan wawancara mendalam dengan informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi dalam konteks lokal dan bagaimana variabel-variabel tersebut berinteraksi dalam pelaksanaan kebijakan di daerah tersebut.

Penelitian yang berjudul “*Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar*” oleh Maarifah Dahlan, Ahmad Al Yakin, Jumriana Angraeni Pajammari (Volume 6, Issue 1, Tahun 2024, Sinta 5).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa DLHK telah menerapkan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2018 dengan menyediakan TPS di berbagai wilayah di Kabupaten Polewali. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Analisis Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup. Telah mengikuti Perda nomor 04 Tahun 2018 secara optimal Pengelolaan sampah DLHK telah dilakukan secara maksimal untuk melakukan pengelolaan dengan menyediakan TPS di berbagai wilayah di Kabupaten Polewali Mandar. Pembaruan dari penelitian di Kota Bima menyoroti hambatan atau tantangan dalam implementasi kebijakan, seperti kendala finansial, infrastruktur, dan koordinasi antar pihak terkait yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018. Selain itu, peneliti juga memberikan solusi untuk mempertahankan inovasi yang telah dituangkan dalam perda tersebut. Mengingat beberapa inovasi dalam pengelolaan sampah tidak lagi berjalan, peneliti merekomendasikan langkah-langkah untuk memastikan inovasi tersebut dapat dipertahankan dan dioptimalkan kembali.

Penelitian yang berjudul “*The level of individual participation of community in implementing effective solid waste management policies*” oleh Brotosusilo, A., Nabila, S. H., Negoro, H. A., & Utari, D. (2020). (Scopus Q1, Volume 6 , H-INDEX 33 , ISSN 23833572).

Penelitian sebelumnya menggunakan metode regresi Ordinary Least Squares (OLS) dan data dari survei untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa partisipasi dipengaruhi oleh frekuensi keterlibatan dalam kegiatan sosial, tingkat pendidikan, dan pengeluaran per kapita. Studi ini merekomendasikan peningkatan partisipasi melalui kegiatan sosial di tingkat akar rumput serta peningkatan pemberdayaan masyarakat, sebagai langkah untuk mendorong keterlibatan yang lebih aktif dalam proses pengelolaan lingkungan. Sebagai pembaruan dari penelitian ini, studi di Kota Bima dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan naturalistik, yang melibatkan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Fokus penelitian ini adalah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018. Dengan memahami konteks lokal dan tantangan yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih spesifik dan relevan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di daerah tersebut.

Penelitian yang berjudul “*Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup*” oleh Lia Puspa Sari, Ju'im Thaap , Titi Darmi (Volume 2 , Issue 2 , Tahun 2021, Factor Impact 2, Sinta 5). Hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi kebijakan peraturan daerah Nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah telah menjalankan kebijakan sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu telah sampai pada target grup, namun masih ditemukan kendala seperti kekurangan sarana dan prasarana, berimplikasi pada proses pengangkutan sampah. Simpulan penelitian ini bahwa analisis kebijakan pengelolaan sampah belum memberikan pengaruh sosial ekonomi untuk masyarakat. Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 pada Kota Bima, dengan

penekanan pada identifikasi hambatan dalam penerapannya. Selain itu, penelitian ini mendalami dampak langsung dari implementasi kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kendala yang ditemukan, terutama terkait sarana dan prasarana, serta ditindaklanjuti dengan upaya mencari solusi konkret untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini juga menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penelitian yang berjudul “*Analisis Triagle Pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah DKI Jakarta di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat*” oleh Wahyu Pratama Tamba, Bambang Shergi Laksmono (Volume 4 , Issue 1 , Tahun 2024, Sinta 4).

Hasil Penelitian analisis konten kebijakan pengelolaan sampah Jakarta mengalami perubahan, namun belum teridentifikasi dengan jelas antara masyarakat Jakarta dan masyarakat terdampak. Adanya interaksi para aktor ditandai dengan sinergitas Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi, serta masyarakat selaku penerima kompensasi. Distribusi kompensasi dipengaruhi oleh empat konteks: situasional, struktural, budaya dan internasional. Peneliti merekomendasikan peninjauan kembali kebijakan dan peraturan Pengelolaan sampah dengan mengklasifikasikan tipologi masyarakat agar pengaturan hak dan kewajiban semakin jelas, serta pengorbanan dan perlakuan hak masyarakat terdampak menjadi setara. Penelitian ini menyajikan pembaruan dengan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018, khususnya dalam mengidentifikasi hambatan yang muncul selama proses pelaksanaannya. Selain itu, peneliti juga mengkaji kebijakan yang kemungkinan belum sepenuhnya berhasil diterapkan atau kurang sesuai dengan kondisi dan dinamika yang terjadi di lapangan.

Penelitian yang berjudul “*Analisis Rencana Kebijakan Aksi Bersih Sampah Kota Pekanbaru*” oleh M Fajar Anugerah, Mhd Rafi Yahya (Volume 5 , Issue 1 , Tahun 2022, Sinta 4).

Hasil penelitian ini yaitu yang pertama dengan cara adanya dasar pemikiran perlunya rencana aksi daerah bersih sampah dengan dibuatnya

peraturan daerah yang khusus mengatur tentang pengelolaan sampah di Pekanbaru. Kedua, keterlibatan terhadap kebijakan rencana aksi bersih sampah dengan melihat interegrasi yang terbangun antara konteks budaya dan sosial setempat. Ketiga, tersedianya konsep dan rencana untuk mewujudkan prosedur pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Keempat, strategi dasar yang meliputi penggalakkan kampanye dan edukasi pengelolaan sampah melalui 3R. Pembaruan dari penelitian ini membahas analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bima, yang berfokus pada bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan hambatan yang dihadapi dalam menerapkan peraturan terhadap kebijakan perda nomor 3 tahun 2018 bisa terlaksana dengan produktif.

Penelitian yang berjudul “*Analisis Rencana Kebijakan Aksi Bersih Sampah Kota Pekanbaru*” oleh M Fajar Anugerah, Mhd Rafi Yahya (Volume 5 , Issue 1 , Tahun 2022, Sinta 4).

Hasil penelitian ini yaitu yang pertama dengan cara adanya dasar pemikiran perlunya rencana aksi daerah bersih sampah dengan dibuatnya peraturan daerah yang khusus mengatur tentang pengelolaan sampah di Pekanbaru. Kedua, keterlibatan terhadap kebijakan rencana aksi bersih sampah dengan melihat interegrasi yang terbangun antara konteks budaya dan sosial setempat. Ketiga, tersedianya konsep dan rencana untuk mewujudkan prosedur pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Keempat, strategi dasar yang meliputi penggalakkan kampanye dan edukasi pengelolaan sampah melalui 3R. Pembaruan dari penelitian ini membahas analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bima, yang berfokus pada bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan hambatan yang dihadapi dalam menerapkan peraturan terhadap kebijakan perda nomor 3 tahun 2018 bisa terlaksana dengan produktif.

Penelitian yang berjudul “*Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Provinsi DKI Jakarta*” oleh Mohamad Iqbal,

R. M. Mulyadin, Kuncoro Ariawan, & Subarudi (Volume 19, Issue 2 , Tahun 2023, Sinta 2).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah DKI Jakarta belum terlaksana dengan baik. Terdapat

beberapa kendala seperti anggaran yang besar namun belum digunakan secara optimal, kurangnya koordinasi antara pemerintah dan swasta untuk membangun Intermediate Treatment Facilities (ITF) karena adanya faktor politik daerah. Beberapa program seperti bank sampah, 3R (), dan Sampah Tanggung Jawab Bersama (Samtawa) diharapkan dapat mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta. Program-program ini perlu disampaikan melalui sosialisasi ke kelurahan, sekolah, dan PKK (Program Keluarga Sejahtera). Pembaruan penelitian di Kota Bima dilakukan dengan menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. Penelitian ini mencakup analisis mendalam melalui wawancara untuk mengidentifikasi hambatan dalam kebijakan pengelolaan sampah, serta bagaimana penggunaan anggaran yang terbatas dapat dioptimalkan agar pengelolaan sampah berjalan secara efektif sesuai dengan peraturan tersebut.

Penelitian yang berjudul *“Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Pasar Mardika Kota Ambon”* oleh Ahmad Rosandi Sakir (Volume 3, Issue 2 , Tahun 2023, Sinta 2).

Hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa aspek sumber daya, khususnya sarana penunjang seperti kendaraan pengangkut sampah, terindikasi belum optimal. Kendaraan tersebut dinilai masih kurang memadai bila dibandingkan dengan volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Secara khusus, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Mardika menunjukkan tingkat efektivitas pelaksanaan yang baik. Namun, terdapat kekurangan dalam segi efisiensi, terutama pada aspek waktu penyelesaian yang masih belum sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan pada aspek-aspek tertentu, seperti manajemen sumber daya, guna meningkatkan efisiensi dan kesuksesan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Mardika Kota Ambon Provinsi Maluku. Pembaruan dari penelitian ini meliputi penegasan terhadap peraturan daerah yang berlaku di Kota Bima, khususnya melalui analisis mendalam tentang penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018. Penelitian ini juga mengkaji hambatan dalam implementasi peraturan tersebut dengan melakukan analisis kualitatif serta wawancara mendalam dengan informan terkait. Tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi atau

solusi yang dapat mengatasi masalah atau hambatan yang dihadapi dalam penerapan peraturan tersebut. Selain itu, peneliti juga memberikan gambaran terperinci tentang jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Bima dan bagaimana penanganannya. Partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah juga dianalisis untuk menilai potensi kekurangannya. Data kuantitatif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang dampak implementasi kebijakan penanganan sampah di daerah tersebut.

Penelitian yang berjudul “*Bagaimana menganalisis pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong Kota Batam*” oleh Muhammad Citra Husada Batubara, Muhammad Citra Husada Batubara (Volume 1, Issue 2, Tahun 2020, Sinta 5).

Hasil dari penelitian menunjukkan secara umum bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong Kota Batam masih belum optimal. Pemerintah Kota dalam hal ini Kecamatan Bengkong dalam mengimplementasikan kebijakan belum berhasil membuat warga untuk memahami implementasi atau pelaksanaan 3R (reuse, reduce, recycle) yaitu menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang sampah. Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan informasi yang relevan dan mudah diterima oleh masyarakat agar pada pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh di Kota Batam khususnya di Kecamatan Bengkong. Pembaruan dari penelitian di Kota Bima menyoroti kebijakan pengelolaan sampah dengan fokus pada seberapa aktif partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan tersebut di Daerah Kota Bima. Kebijakan pengelolaan sampah seharusnya menjadi bagian penting dalam analisis kebijakan, khususnya dalam konteks daerah. Penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada sosialisasi yang efektif kepada masyarakat.

2.3 Kajian Teori

2.3.1 Grand Theory Administrasi Publik

Administrasi publik adalah disiplin ilmu yang mempelajari kebijakan publik, manajemen, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks modern, administrasi publik tidak hanya terbatas pada kegiatan pemerintahan semata, tetapi juga mencakup bagaimana pemerintah bekerja sama dengan

sektor swasta dan masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Administrasi publik mencakup pengelolaan sumber daya publik secara efisien, transparan, dan akuntabel untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh negara atau pemerintah, (Frederickson, 2020). Administrasi publik tidak hanya mencakup manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan pelayanan publik, tetapi juga berhubungan erat dengan nilai-nilai demokrasi, etika, dan akuntabilitas (Menurut Denhardt & Denhardt, 2019).. Denhardt menekankan bahwa administrasi publik modern harus lebih bersifat "pelayanan publik baru" yang berfokus pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat

Kemudian, administrasi publik dalam konteks era digital menghadapi tantangan baru dalam hal pengelolaan data dan teknologi, di mana keterbukaan data dan efisiensi digitalisasi menjadi elemen krusial (Osborne, 2021). Peran teknologi dalam administrasi publik di masa kini memungkinkan terjadinya peningkatan transparansi dan partisipasi publik, sejalan dengan teori e-government yang diperkenalkan oleh Heeks, 2020.

Administrasi publik mengalami perubahan besar setelah 2019, terutama dengan adanya desentralisasi dan digitalisasi dalam pelayanan publik. Pendekatan "New Public Service" (Pelayanan Publik Baru) menekankan pentingnya keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan serta perlunya pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Denhardt dan Denhardt, 2021).

2.3.1.1 Perkembangan Teori Administrasi Publik

Setelah 2019, teori administrasi publik berkembang dengan penekanan pada inklusivitas, keberlanjutan, dan adaptabilitas. Salah satu teori yang menonjol adalah teori **New Public Governance (NPG)**, yang menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam kerangka NPG, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi penting untuk mengatasi permasalahan sosial yang kompleks (Osborne, 2019). Ini menandakan pergeseran dari pendekatan birokrasi tradisional ke arah tata kelola yang lebih kolaboratif. Selain itu, munculnya teknologi informasi dan komunikasi juga mendorong konsep e-governance, yang diartikan sebagai pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam

proses pemerintahan (Heeks, 2020). Teknologi digital memungkinkan interaksi yang lebih cepat dan efektif antara pemerintah dan warga negara.

2.3.1.2 Administrasi Publik dalam Konteks Desentralisasi

Desentralisasi merupakan aspek penting dalam perkembangan administrasi publik, terutama di negara berkembang. Di Indonesia, desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki otonomi dalam mengelola sumber daya dan membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Desentralisasi yang efektif memerlukan adanya keseimbangan antara kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dengan kemampuan mereka dalam mengelola kebijakan dan sumber daya (Turner, 2020). Ini juga mempertegas perlunya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

2.3.1.3 Pendekatan Partisipatif dalam Administrasi Publik

Pendekatan partisipatif dalam administrasi publik semakin mendapatkan perhatian setelah 2019, terutama dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas. Model administrasi partisipatif mengutamakan keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam perumusan kebijakan publik. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan legitimasi kebijakan serta mendorong pelayanan publik yang lebih efektif dan berkelanjutan (Menurut Fung, 2020).

Dengan meningkatnya keterbukaan informasi, masyarakat menjadi lebih kritis terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih partisipatif dan kolaboratif menjadi penting untuk memastikan kebijakan publik yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.3.1.4 Administrasi Publik dan Pelayanan Berkelanjutan

Seiring dengan meningkatnya perhatian global terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan, administrasi publik juga mulai mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pelayanan publik. Pemerintah harus mampu merancang kebijakan yang tidak hanya fokus pada efisiensi ekonomi,

tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Prinsip keberlanjutan ini menuntut adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial (Meadowcroft, 2021).

Dalam hal ini, administrasi publik berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan kebijakan yang mendorong partisipasi semua pihak untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

2.3.1.5 Administrasi Publik dan Kebijakan Publik

Sebagai bagian dari proses pemerintahan, administrasi publik tidak dapat dipisahkan dari pembuatan kebijakan publik. Administrasi publik berperan dalam implementasi kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti sumber daya, kapasitas birokrasi, serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat (Howlett & Ramesh, 2020). Proses implementasi kebijakan yang baik membutuhkan kapasitas administrasi yang efektif untuk memastikan kebijakan yang dirancang dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2.3.2. Middle Theory Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah Suatu kebijakan dihasilkan melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan para aktor kebijakan melalui proses kebijakan publik. Proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis dalam proses kebijakan publik tersebut menurut William N. Dunn melalui 5 tahap yang meliputi:

1. Tahap Perumusan Masalah Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.
2. Tahap Forecasting (Peramalan) Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.
3. Tahap Rekomendasi Kebijakan Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.

4. Tahap Monitoring Kebijakan Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.
5. Tahap Evaluasi Kebijakan Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

Teori sistem berpendapat bahwa pembuatan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan. 3 (tiga) elemen kebijakan: pelaku/aktor kebijakan, lingkungan kebijakan dan kebijakan publik (Dunn, 2004). Kebijakan publik lahir karena tuntutan tuntutan yang merupakan serangkaian pengaruh lingkungan, dan kemudian ditransformasikan ke dalam suatu system politik. Dalam waktu yang bersamaan ada keterbatasan dan konstrain dari lingkungan yang akan mempengaruhi pembuat kebijakan. Faktor lingkungan tersebut antara lain: karakteristik sosial ekonomi, sumberdaya alam, iklim, topografi, demografi, budaya dan sebagainya.



Gambar 2.1 Hubungan Tiga Elemen Sistem Kebijakan, Dunn, 2004.

Gambar 2.1 sekaligus menjelaskan bahwa, meskipun dari berbagai definisi tentang kebijakan publik menyiratkan bahwa pemerintah yang paling memiliki otoritas pembuatan kebijakan, akan tetapi pembuatan kebijakan tidak berlaku di ruang hampa. Salah satu peran pokok pemerintah adalah peran regulasi. Namun demikian, dalam lingkungan negara yang demokratis, peran ini tentunya tidak selalu menjadi peran dominan pemerintah. Seluruh aktor kebijakan, pemerintah dan non pemerintah secara kolektif bisa memberikan kontribusinya.

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu yang melibatkan banyak disiplin ilmu, seperti ilmu politik, ekonomi, dan psikologi. Definisi kebijakan publik yang paling awal dikemukakan oleh Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Howlett dan Rames yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang di proyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik tertentu. Senada dengan definisi dari George C. Edward III dalam Suwatri mendefinisikan kebijakan publik sebagai “suatu pencapaian sasaran dan tujuan”. dari definisi ini kita bisa melihat bahwa kebijakan publik memiliki kata kunci “tujuan”, nilai-nilai”, dan praktik”.

(Menurut Thomas R. Dye dalam Howlet dan Ramesh), kebijakan publik adalah “segala yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan pemberdayaan yang dihasilkan”. dalam pemahaman “keputusan” termasuk juga ketika pemerintah memutuskan untuk “tidak memutuskan” atau untuk “tidak mengurus” suatu isu, maka pemahaman ini juga menunjuk pada definisi (Thomas R. Dye dalam Tilaar dan Nugroho) yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan “segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah”. senada dengan definisi (R. Dye, George C. Edward III) dalam Suwitri juga menyatakan kebijakan publik merupakan:

“apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam policy statement yang berbentuk pidato-pidato wacana yang diungkapkan pejabat publik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program dan tindakan pemerintah”.

Dalam mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat maka dilakukan pembuatan kebijakan, kebijakan yang dibuat terkandung nilai yang berlaku dan selaras yang hidup di tengah masyarakat yang memberikan dampak baik dampak secara langsung maupun tidak secara langsung dari kebijakan tersebut, hal ini sesuai dengan penjelasan David Easton dalam Dye dalam Subarsono “ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat

2.3.2.1 Jenis Kebijakan

Untuk memahami instrumen kebijakan apakah yang dipakai oleh pemerintah untuk memecahkan suatu masalah, maka perlu diketahui jenis kebijakannya. Jenis kebijakan akan membantu pemahaman aktor kebijakan termasuk masyarakat, mengapa suatu kebijakan lebih penting dari kebijakan yang lain; siapa aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan dan pada tahap mana peran seorang aktor lebih penting dibanding dengan yang lain. Kategori jenis kebijakan sebagai berikut (Anderson, 1979) :

1. Kebijakan substantif dan kebijakan prosedural. Kebijakan substantif adalah jenis kebijakan yang menyatakan apa yang akan dilakukan pemerintah atas masalah tertentu, misalnya kebijakan pengurangan angka kemiskinan melalui kebijakan beras miskin. Kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan. Kebijakan ini bersifat lebih teknis, tentang standard dan prosedur (atau Standard Operating Procedure), kriteria warga masyarakat yang berhak mendapat bantuan.
2. Kebijakan distributif, kebijakan regulatif dan kebijakan re-distributif. Kebijakan distributif adalah kebijakan yang bertujuan untuk mendistribusikan atau memberikan akses yang sama atas sumberdaya tertentu, misalnya kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kebijakan regulatif adalah kebijakan yang mengatur perilaku orang atau masyarakat, misal kebijakan menggunakan sabuk pengaman jika mengendarai atau menjadi penumpang dalam mobil. Kebijakan redistributif adalah kebijakan yang mengatur pendistribusian pendapatan atau kekayaan seseorang, untuk didistribusikan kembali kepada kelompok yang perlu dilindungi untuk tujuan pemerataan, misal kebijakan pajak progresif, kebijakan subsidi silang, kebijakan subsidi BBM. Informasi kebijakan yang Peran analis kebijakan (Policy Analyst) Formulasi Kebijakan Peramalan Adopsi Kebijakan Implementasi Kebijakan Penilaian Kebijakan Kinerja kebijakan Pengamatan hasil kebijakan (Observed Policy Outcomes) Kebijakan yang dipilih Hasil yang diharapkan Permasalahan kebijakan (Policy Problems) Peran pembuat kebijakan (Policy Maker)

3. Kebijakan material dan kebijakan simbolis. Kebijakan material adalah kebijakan yang sengaja dibuat untuk memberikan keuntungan sumberdaya yang konkrit pada kelompok tertentu, misal kebijakan beras untuk orang miskin. Kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat dan penghormatan simbolis pada kelompok masyarakat tertentu, misalnya kebijakan libur Natal untuk orang beragama Kristen/Katolik, libur Waisak untuk menghormati orang beragama Budha, atau libur Idul Fitri untuk menghormati orang beragama Islam.
4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang publik (public goods) dan barang privat (private goods). Kebijakan barang publik adalah kebijakan yang mengatur tata kelola dan pelayanan barang-barang publik, seperti kebijakan pengelolaan ruang publik/fasilitas umum, jalan raya. Kebijakan barang privat adalah kebijakan yang mengatur tatakelola dan pelayanan barang-barang privat, misalnya pengaturan parkir, penataan pemilikan tanah.

2.3.3.2 Pengambilan Keputusan Dalam Kebijakan Publik

Gambar 2.1 memperlihatkan berbagai ragam sumber kebutuhan kebijakan untuk memenuhi permasalahan publik yang kompleks. Penetapan jenis intervensi ditentukan oleh keberhasilan aktor kebijakan dalam mengidentifikasi permasalahan publik yang mendapat perhatian besar dari masyarakat. Tidak ada satu aktor kebijakan yang mampu menangani semua isu/masalah. Isu/masalah mendapat perhatian karena menyangkut kepentingan orang banyak, mencapai titik kritis, berdampak luas, berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat, dan berimplikasi pada anggaran public (Fischer, 2007). Sumber masalah bisa dari masalah lama atau baru, sisa persoalan sebelumnya, atau kegagalan implementasi kebijakan. Aktor kebijakan juga bertanggung jawab untuk memperjuangkan isu/masalah tersebut menjadi agenda pembahasan formal. Agenda juga mencakup strategi penyelesaian masalah dan pilihan tindakan pemerintah.

2.3.2.3 Tantangan Kebijakan Publik

Lingkungan dimana kebijakan publik dikembangkan bersifat dinamis, kompleks, penuh yang memiliki kemudahan dalam mendapatkan informasi

menyebabkan munculnya harapan yang semakin tinggi, memiliki permasalahan yang semakin kompleks, dan menuntut peran pemerintah yang semakin tinggi pula. Untuk mensikapi hal tersebut, berbagai agenda perubahan sektor publik dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas berbagai penyelenggaraan publik. New public management, akuntabilitas, good governance, managerialism, sound-government, reformasi birokrasi adalah berbagai upaya perbaikan pemenuhan tuntutan masyarakat dan pembangunan.

Pembuatan kebijakan yang baik merupakan salah satu indikator kehandalan sebuah pemerintahan. Tantangan kebijakan publik adalah menciptakan sebuah lingkungan yang memungkinkan proses kebijakan publik (pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan) dapat berlangsung secara fleksibel, interaktif, adaptif, transparan dan akuntabel serta sesuai dengan dinamika lingkungan yang sangat kompleks. Jika lingkungan ini dapat diciptakan baik secara politik maupun teknis, tuntutan akan partisipasi, transparansi, keterbukaan, produktivitas serta actionable policy dapat diwujudkan (GeurtsT, 2015).

Empat tantangan yang menjadi perhatian dalam menciptakan lingkungan proses perumusan kebijakan yang kondusif meliputi: Proses: Model Dominan Proses Pembuatan Kebijakan Tidak Realistik (Hallsworth dkk, 2001).

Terdapat berbagai teori dan model yang memberikan gambaran mengenai tahapan pembuatan kebijakan dengan berbagai variasinya. Tahapan tersebut dalam kondisi nyata sering tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan. Terkadang masalah kebijakan dan solusi muncul secara bersamaan, evaluasi dan implementasi dilakukan bersamaan, siklus kebijakan dimulai dari implementasi atau evaluasi dan lain-lain. Kondisi ini seringkali memunculkan permasalahan tersendiri yang berakibat pada kualitas kebijakan yang tidak baik misalnya hubungan solusi/keputusan kebijakan/kebijakan yang tidak jelas dengan masalah kebijakan. Di satu sisi proses kebijakan harus dilakukan sesuai dengan standar tertentu, namun juga akomodatif terhadap berbagai perubahan dan resiko yang muncul. Kesadaran akan adanya phase transisi dan adanya keterkaitan antar tahapan dalam kebijakan perlu menjadi perhatian dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas proses kebijakan. Bagaimana hubungan

antara proses utama pembuatan kebijakan, dinamika politik dan aspek legal kebijakan memberikan ruang bagi proses kebijakan untuk semakin obyektif.

Dalam kondisi nyata kita juga sering menjumpai proses pembuatan kebijakan yang mengabaikan hubungan antar tahap dalam siklus proses kebijakan. Misalnya tahap pembuatan produk hukum yang langsung pada tahap pembuatan rancangan kebijakan (draft kebijakan), tanpa adanya tahapan lain yang mendasari mengapa kebijakan tersebut dibuat. Proses komunikasi dan konsultasi kebijakan sebagai bagian dari tahapan pembuatan kebijakan tidak dilakukan dengan baik. Berbagai fakta dapat dengan mudah kita temukan bahwa proses kebijakan sering kali tidak menjadi perhatian penting dalam perumusan kebijakan. Bahkan terdapat variasi proses perumusan kebijakan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, masing-masing memiliki aturan dan prosedur tersendiri. Keterbatasan waktu, beban kerja, pengaturan institusi yang tidak kondusif, hubungan antar lembaga yang tidak harmonis adalah beberapa penyebab minimnya kepedulian terhadap ‘perbaikan’ proses perumusan kebijakan. Pembenahan terhadap proses pembuatan kebijakan ini menawarkan sebuah kebijakan yang ‘logis’ dimana permasalahan sudah dianalisis dengan baik dan juga alternative sudah diuji kelayakannya untuk diterapkan.

2.3.2.4 Tuntutan Kualitas Pembuatan Kebijakan Semakin Tinggi.

Model profesional dalam pembuatan kebijakan dengan karakteristik yang baik sebagai berikut (Hallsworth dkk, 2001):

- Memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan kebijakan atau dengan kata lain memperhatikan faktor- faktor eksternal dalam proses pembuatan kebijakan (outward looking).
- Terbuka terhadap ide dan solusi yang baru (inovatif, kreatif dan fleksibel).
- Menggunakan data-data dan fakta-fakta dari berbagai sumber dan melibatkan stakeholders kunci dalam pembuatan kebijakan (evidence-based).
- Selalu memperhatikan dampak kebijakan terhadap semua pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung (inclusive).
- Membangun sistem evaluasi dari awal proses kebijakan (evaluasi).

- Selalu melakukan review terhadap kebijakan untuk memastikan keterkaitannya dengan masalah yang diselesaikan dan mengenali masalah serta dampak sejak awal (review).
- Belajar dari pengalaman kebijakan yang berhasil dan yang gagal (learns lessons).

Selain karakter di atas kebijakan publik yang baik harus juga memiliki karakter forward looking (mengarah pada outcome dan mempertimbangkan dampak jangka panjang), joined up (proses perumusannya dikelola dengan baik, holistic view, berkoordinasi dengan institusi yang lain), serta communication (dalam proses perumusan juga mempertimbangkan strategi mengkomunikasikan kepada publik (the First Minister and Deputy First Minister, 2015).

Kebijakan yang sekedar menjelaskan atau imitasi dengan kebijakan sebelumnya (kebijakan instansi lain), menimbulkan kontroversi karena keberpihakannya pada kelompok tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas kebijakan kita masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Dalam kondisi ini peran Analisis Kebijakan sangat vital untuk memperjuangkan terciptanya kebijakan publik yang berkualitas.

Keberadaan institusi yang bertanggung jawab terhadap kualitas kebijakan publik juga menjadi perhatian untuk menjawab tantangan kebutuhan kebijakan publik yang baik. Duplikasi kebijakan, tumpang-tindih, dan ketidakjelasan adalah beberapa indikasi ketidakjelasan struktur yang mendukung upaya pembuatan kebijakan yang baik. Disharmoni kebijakan adalah wujud nyata tantangan proses pembuatan kebijakan. Beberapa permasalahan terkait organisasi dan struktur ini antara lain: keberadaan berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan menyebabkan kesulitan tersendiri untuk mengelola karena fungsi, kepentingan, dan koalisinya yang berbeda; dan kecenderungan institusi untuk menggunakan kebijakan/ solusi lama (rutin) yang menyebabkan frustrasi dan ketidakpercayaan (Geurts, 2015). Meskipun beberapa upaya sudah dilakukan untuk memperbaiki struktur ini misalnya dengan keberadaan jabatan fungsional analisis kebijakan, pembentukan berbagai unit kerja yang secara khusus dibentuk untuk mendukung upaya pembuatan kebijakan yang baik, kejelasan hirarki perundang-undangan, namun berbagai strategi terkait dengan perbaikan

struktur yang mendukung upaya peningkatan kualitas proses perumusan kebijakan juga harus selaludilakukan.

Pembuatan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan. Kebijakan publik lahir karena tuntutan- tuntutan yang merupakan serangkaian pengaruh lingkungan, dan kemudian ditransformasikan ke dalam suatu sistem politik. Transformasi ini dilakukan oleh berbagai aktor negara, dimana negara menjadi aktor utama. Namun demikian, dalam lingkungan Negara yang demokratis, peran ini tentunya tidak selalu menjadi peran dominan pemerintah. Seluruh aktor kebijakan, pemerintah dan non pemerintah secara kolektif bisa memberikan kontribusinya. Kebijakan memiliki berbagai jenis seperti; kebijakan substantif dan kebijakan prosedural, kebijakan distributif, kebijakan regulatif dan kebijakan re-distributif, kebijakan material dan kebijakan simbolis, dan kebijakan yang berhubungan dengan barang publik(public goods) dan barang privat (private goods). Berbagai jeniskebijakan tersebut dibuat dan disesuaikan dengan jenispermasalahan yang timbul di masyarakat dan pembangunan. Saat ini kondisi berbagai jenis kebijakan tersebut masih perlu ditingkatkan untuk dapat dikatakan sebagai kebijakan yang berkualitas yang memiliki karakter forward looking (mengarah pada outcome dan mempertimbangkan dampak jangka panjang), joined up (proses perumusannya dikelola dengan baik, holistic view, berkoordinasi dengan institusi yang lain), serta communication (dalam proses perumusan juga mempertimbangkan strategi mengkomunikasikan kepada publik).

2.3.2.5 Proses Pembuatan Kebijakan

Keberhasilan analisis pembuatan kebijakan menurut Dunn, dapat dikembangkan melalui tiga proses, yaitu:

1. Proses pengkajian kebijakan, menyajikan metodologi untuk analisis kebijakan. Metodologi di sini adalah sistem standar, aturan, dan prosedur untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.
2. Proses pembuatan kebijakan, adalah serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda,

formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

3. Proses komunikasi kebijakan, merupakan upaya untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya. Dalam hal ini sebagai penciptaan dan penilaian kritis, pengetahuan yang relevan dengan kebijakan (Dunn, 2018).

2.3.2.6 Model-Model Kebijakan

Berikut ini adalah model-model kebijakan menurut William Dunn:

1. Model Deskriptif

Model-model kebijakan dapat dibandingkan dan dikontraskan dari berbagai dimensi yang paling penting diantaranya adalah membantu membedakan tujuan, bentuk ekspresi dan fungsi metodologi dari model. Dua bentuk utama model kebijakan adalah deskriptif dan normative.

2. Model Normatif

Sebaliknya, tujuan model normative bukan hanya untuk menjelaskan dan/atau memprediksi tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas (nilai).

3. Model Verbal

Model Verbal (Verbal models) diekspresikan dalam bahasa sehari-hari. Model verbal secara relatif mudah dikomunikasikan di mata para ahli dan orang awam, dan biayanya murah. Keterbatasan model verbal adalah bahwa masalah-masalah yang dipakai untuk memberikan prediksi dan rekomendasi bersifat implisit atau tersembunyi, sehingga sulit untuk memahami dan memeriksa secara kritis argumen-argumen tersebut sebagai keeseluruhan

4. Model Simbolis

Model simbolis menggunakan simbol-simbol matematis untuk menerangkan hubungan di antara variabel-variabel kunci yang dipercaya menjadi suatu masalah. Prediksi atau solusi yang optimal diperoleh dari model-model simbolis dengan meminjam metode-metode matematika, statistika, dan logika. Model-model simbolis sulit untuk dikomunikasikan di antara orang awam, termasuk para pembuat kebijakan

5. Model prosedural

Model prosedural (Prosedural models) menampilkan hubungan yang dinamis di antara variabel-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan

2.3.2.7 Aspek -aspek Pelaksanaan Kebijakan Publik

Menurut Edwards III dalam, pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (output, outcome). Lebih lanjut, Edward III mengidentifikasikan aspek-aspek yang diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya (Geurts, 2015).

1. Komunikasi

Komunikasi adalah aktivitas yang mengakibatkan orang lain menginterpretasikan suatu ide/ gagasan, terutama yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis melalui sesuatu sistem yang biasa (lazim) baik dengan simbol-simbol, signal- signal, maupun perilaku. Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dimana komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan dampak-dampak buruk bagi pelaksanaan kebijakan.

2. Kewenangan/ Struktur Birokrasi

Kewenangan merupakan otoritas/ legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi/ strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan. Karakteristik utama dari birokrasi umumnya tertuang dalam prosedur kerja atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi organisasi (Warjio Afandi, 2015).

3. Sumberdaya

Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya (manusia, materi, dan metoda). Pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan, maka pelaksanaan kebijakan akan cenderung tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa dukungan sumberdaya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat, atau upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Dengan demikian, sumberdaya merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: staf yang memadai, informasi, pendanaan, wewenang, dan fasilitas pendukung lainnya (Warjio Afandi, 2015).

4. Disposisi atau sikap dari pelaksana

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis (Warjio Afandi, 2015). Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia diduga kuat akan menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan maksud dan arah dari kebijakan, maka dimungkinkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif dan efisien.

2.3.2.8 Dimensi Pelaksanaan Kebijakan Publik

Berdasarkan beberapa konsep dan sifat tindakan yang berkenaan dengan pelaksanaan Good Governance, menurut pemahaman penulis maka pelaksanaan kebijakan dapat diukur atau dievaluasi berdasarkan dimensi-dimensi: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, partisipatif, efektivitas, dan efisiensi (Rian. N.D, 2017).

1. Konsistensi

Pelaksanaan kebijakan berlangsung dengan baik apabila pelaksanaan kebijakan dilakukan secara konsisten dengan berpegang teguh pada prosedur dan norma yang berlaku.

2. Transparansi

Transparansi merupakan kebebasan akses atas informasi yang patut diketahui oleh publik dan/ atau pihak-pihak yang berkepentingan (Rian. N.D, 2017). Informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan, dan disediakan secara memadai, serta mudah dimengerti.

3. Akuntabilitas

Setiap aktivitas pelaksanaan kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun substantif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Rian. N.D, 2017).

4. Keadilan

Keadilan secara umum dapat dipahami sebagai kebaikan, kebajikan, dan kebenaran, yang mengikat antara anggota masyarakat dalam mewujudkan keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban. Keadilan dalam kebijakan publik diwujudkan pada aktivitas pelayanan yang tidak diskriminatif. Pelaksanaan kebijakan publik tidak membedakan kualitas pelayanan pada kelompok sasaran berdasarkan pertimbangan suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain.

5. Partisipatif

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat disamping menopang percetapan pelaksanaan kebijakan, pada sisi lain akan berdampak pada proses evaluasi/ kontrol atas kinerja pemerintah dan dapat mampu menimalisir penyalahgunaan wewenang. Partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan kebijakan publik karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud di sini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislative. Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan kebijakan sebaiknya bersifat partisipatif, yaitu pelaksanaan kebijakan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan, dan harapan masyarakat (Rian. N.D, 2017).

6. Efektivitas

Efektifitas berkenaan dengan pencapaian hasil yang telah ditetapkan, atau pencapaian tujuan dari dilaksanakannya tindakan, yang berhubungan dengan aspek rasionalitas teknis, dan selalu diukur dari unit produk atau layanan. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, efektifitas diukur dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada kebijakan public.

7. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah penggunaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan penggunaan sumberdaya. Indikator ukuran yang dapat digunakan pada dimensi efisiensi adalah penggunaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yang bisa diukur dengan tingkat penggunaan waktu, biaya, manusia, peralatan, dan sumberdaya lainnya.

Tindakan implementasi kebijakan dapat pula dibedakan ke dalam "*Policy inputs and policy process*". Policy inputs berupa masukan sumber daya, sedangkan *policy process* bertalian dengan kegiatan administratif, organisasional, yang membentuk transformasi masukan kebijakan ke dalam hasil-hasil (*outputs*) dan dampak (*impact*) kebijakan (William Dunn, 2018).

Dengan demikian, dapat diuraikan bahwa fungsi dan tujuan implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik (politik) agar dapat diwujudkan sebagai hasil akhir (*outcome*) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

2.3.2.9 Unsur-unsur dalam Implementasi Kebijakan

1. Unsur Pelaksana (*Implementor*)

Unit-unit administratif atau unit-unit birokratik merupakan pihak yang mempunyai kewajiban utama melaksanakan kebijakan publik (Ripley & Grace A. Franklin, 1986). Hal ini karena unit-unit tersebut memiliki fungsi sebagai alat atau sarana dalam berbagai kegiatan administratif yang berkaitan dengan terselenggaranya proses kebijakan publik.

2. Program

Penyusunan program dalam implementasi kebijakan public, harus bersifat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional. Oleh karenanya, salah satu hal yang harus jelas dalam penyusunan program adalah penggambaran tentang jenis kegiatan yang harus dilakukan dituangkan dalam bentuk uraian kegiatan yang jelas, baik uraian kegiatan bagi setiap satuan kerja maupun uraian kegiatan dari setiap orang yang terlibat di dalamnya.

Hasil akhir dari kegiatan tahap pertama dari unit administrative tersebut, jika dilihat sebagai suatu sistem maka akan berupa kebijakan-kebijakan administratif, yaitu kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis operasional yang untuk selanjutnya dituangkan ke dalam program-program operasional, sehingga terbentuk struktur program (Lemay, 2002: 33). Pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program. Hal ini seperti dikemukakan oleh Grindle (1980: 6) bahwa : "Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect"

Program-program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Program tersebut tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani.

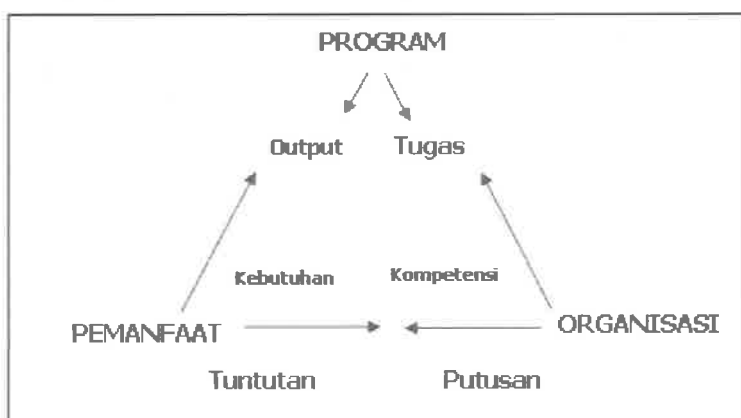
3. Target Groups

Target groups atau sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan, bergantung kepada kesesuaian isi dari kebijakan (program) tersebut, dengan harapan mereka. dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Karakteristik yang dimiliki oleh mereka (kelompok sasaran) seperti: besaran kelompok sasaran, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia dan keadaan sosial-ekonomi berpengaruh terhadap efektifitas implementasi. Adapun

karakteristik tersebut sebagian dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka hidup baik lingkungan geografis maupun lingkungan sosial-budaya. Faktor komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga jeleknya proses komunikasi ini akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektifitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penyebarluasan isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan berpengaruh terhadap efektifitas implementasi kebijakan.

2.3.3. Aplied Theory Model Kesesuaian Implementasi Kebijakan Menurut David C. Korten

Menurut David C. Korten, suatu program dari kebijakan akan berhasil jika telah terdapat kesesuaian dari 3 (tiga) unsur implementasi program kebijakan, yakni: a. Kesesuaian antara program kebijakan dengan pemanfaat b. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana c. Kesesuaian antara organisasi pelaksana dengan program (Ramadhani & Nawangsari, 2023). Sejalan dengan pendapat di atas, Korten membuat Model Kesesuaian implementasi kebijakan atau program dengan memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. (baca dalam Tarigan, 2000: 19).



Sumber : Haedar Akib dan Anonius Tarigan , 2018

Gambar 2.2 Model Kesesuaian

Korten menggambarkan Model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program, yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program.

Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). organisasi pelaksana. Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. Ketiga, kesesuaian antara organisasi pelaksana dengan program.

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa jika tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan, kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran jelas outputnya tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Model kesesuaian implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Korten memperkaya model implementasi kebijakan yang lain. Hal ini dapat dipahami dari kata kunci kesesuaian yang digunakan. Meskipun demikian, elemen yang disesuaikan satu sama lain – program, pemanfaat dan organisasi – juga sudah termasuk baik dalam dimensi isi kebijakan (program) dan dimensi konteks implementasi (organisasi) maupun dalam outcomes (pemanfaat) pada model proses politik dan administrasi dari Grindle.

2.3.4. Applied Theory Model Implementasi Kebijakan Menurut George Edwards III

Model implementasi kebijakan menurut George Edwards III adalah model implementasi yang bersifat “top down” yang ditentukan berdasarkan

empat variabel, terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal dengan merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor sekaligus. Oleh karenanya, tidak ada faktor/variabel tunggal dalam proses implementasi, sehingga perlu kejelasan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Berikut variabel yang memengaruhi proses implementasi kebijakan :

1. Komunikasi

- a. Petunjuk yang jelas, Menurut Edward persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Dibutuhkan komunikasi efektif agar keputusan-keputusan kebijakan dapat diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan itu dapat diikuti. Komunikasi harus akurat dan harus bisa dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan harus jelas, jika tidak maka akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.
- b. Konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Jika tidak konsisten maka akan mendorong para pelaksana kebijakan mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan dan mereka pasti tidak mampu dalam menghadapi semua tuntutan yang terjadi. Mereka mungkin secara efektif lumpuh, atau mereka memilih antara petunjuk-petunjuk atas dasar apa yang mereka pilih. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat konsistensi keputusan menyangkut kerumitan kebijakan publik, masalah-masalah yang mengawali program-program baru dan akibat banyaknya ketidakjelasan tujuan.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan mungkin sudah cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi inipun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber daya dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan. Sumber daya ini meliputi:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dilihat dari kualitas, kecakapan serta keterampilan-keterampilan yang dimiliki para pelaksana. Mereka dituntut untuk memiliki keterampilan dan motivasi yang tinggi agar meminimalisir hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan dan agar dapat menjangkau banyak pembaruan. Sebagai contoh, rendahnya kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia menjadi perhatian khusus yang dinilai lamban dan tidak efisien. Bukan karena kurangnya personil tetapi kurangnya personil yang terlatih dan mempunyai keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan.

b. Anggaran

Suatu program kebijakan seringkali diprakarsai oleh badan-badan legislatif dan pembiayaan mengenai program tersebut diserahkan kepada eksekutif. Akibatnya, para administrator kebijakan sering kali tidak menerima dana yang memadai untuk membayar jumlah dan tipe personil yang dibutuhkan guna melaksanakan kebijakan tersebut. Namun demikian, anggaran tidak selalu merupakan jawaban terhadap kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul. Dalam kenyataannya dana yang besar tidak selalu mudah mendapatkan personil yang terampil.

c. Informasi

Para pelaksana perlu mengetahui bagaimana melaksanakan kebijakan-kebijakan sesuai petunjuk dari pejabat atasan. Jika kebijakan bersifat inovatif dan teknis maka kesulitan terbesar yang dihadapi adalah mendapatkan seseorang yang mengetahui bagaimana melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dengan baik. Informasi mengenai program-program adalah penting terutama bagi kebijakan-kebijakan baru atau kebijakan-kebijakan yang melibatkan persoalan-persoalan teknis. Kurangnya pengetahuan atau

informasi bagaimana mengimplementasikan kebijakan mempunyai konsekuensi yaitu beberapa tanggung jawab secara sungguh-sungguh tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat dipenuhi tepat waktu serta ketidakefisienan dengan tidak menghentikan kegiatan-kegiatan yang tidak diperlukan.

d. Wewenang

Wewenang ada dalam banyak bentuk, dari memberi bantuan sampai memaksakan perilaku tetapi tetap dibatasi dalam penggunaannya. Otoritas ini agar menjamin kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan sasaran tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.

e. Fasilitas

Penyediaan fasilitas-fasilitas yang layak untuk mendukung implementasi yang efektif. Fasilitas ini berupa fisik (gedung kantor, perlengkapan, sarana prasarana dsb) maupun berupa staff yang memahami apa yang harus dilakukan, dan mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya.

3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap pelaksana yang memiliki kekuasaan yang besar dalam melaksanakan kebijakan. Komunikasi dari para pejabat di tingkat atas sering kali tidak jelas atau tidak konsisten dan sebageian besar pelaksana menyukai kebebasan yang besar dari pejabat diatasnya. Akibatnya, pembuat kebijakan sering berhadapan dengan tugas-tugas yang dimanipulasi. Jika sikap pelaksana implementasi kebijakan bersikap baik maka kebijakan berjalan sesuai kesepakatan atau tujuan awal. Namun, jika sikap maupun perspektif pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses implementasi kebijakan tidak sesuai arah dan tidak jelas.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dalam birokrasi yakni prosedur-prosedur kerja atau ukuran-ukuran dasar yang disebut dengan Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. Dengan adanya SOP, dapat menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan dalam penerapan peraturan-peraturan. Sedangkan fragmentasi organisasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi,

seperti komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat eksekutif dan sifat kebijakan yang memengaruhi organisasi birokrasi. Fragmentasi ini dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan proses implementasi kebijakan. Karena implementasi kebijakan membutuhkan kerjasama yang melibatkan banyak orang. Sedangkan banyak para birokrat sering menghindari koordinasi dengan badan-badan lain. Hal ini mengakibatkan pandangan yang terlalu sempit dari banyak lembaga birokrasi dan akan menimbulkan konsekuensi yang merugikan bagi implementasi yaitu tidak ada orang yang akan mengakhiri implementasi kebijakan dengan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu karena tanggungjawab bagi suatu bidang kebijakan terpecah-pecah. Kemudian, pandangan yang sempit juga akan menghambat perubahan

2.3.5. Aplied Theory Model Implementasi Kebijakan Menurut Meter dan Horn

Model yang diperkenalkan oleh duet Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (dalam Subarsono, 2005: 99), menegaskan bahwa “Implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik”. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi dan yang menyangkut dalam proses kebijakan publik adalah:

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
- b. Karakteristik dan agen pelaksana/ implementor.
- c. Kondisi ekonomi, sosial dan politik dan
- d. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementor.

Implementasi kebijakan dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi dan berlangsung dalam antar hubungan berbagai faktor. Suatu kebijakan menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan.

2.3.6. Aplied Theory Model Implementasi Kebijakan Menurut Hoogwood & Gun

Model Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun (dalam Nugroho, 2006: 131) mengetengahkan bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat, yaitu:

- a. Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
- b. Syarat kedua, apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai termasuk sumber daya waktu.
- c. Syarat ketiga, apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada.
- d. Syarat keempat, apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal.
- e. Syarat kelima adalah seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya semakin sedikit hubungan sebab akibat semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai.
- f. Syarat keenam adalah apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi, implementasi tidak akan dapat berjalan secara efektif.
- g. Syarat ketujuh, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Syarat kedelapan, tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.
- i. Syarat kesembilan, komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- j. Syarat kesepuluh adalah pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

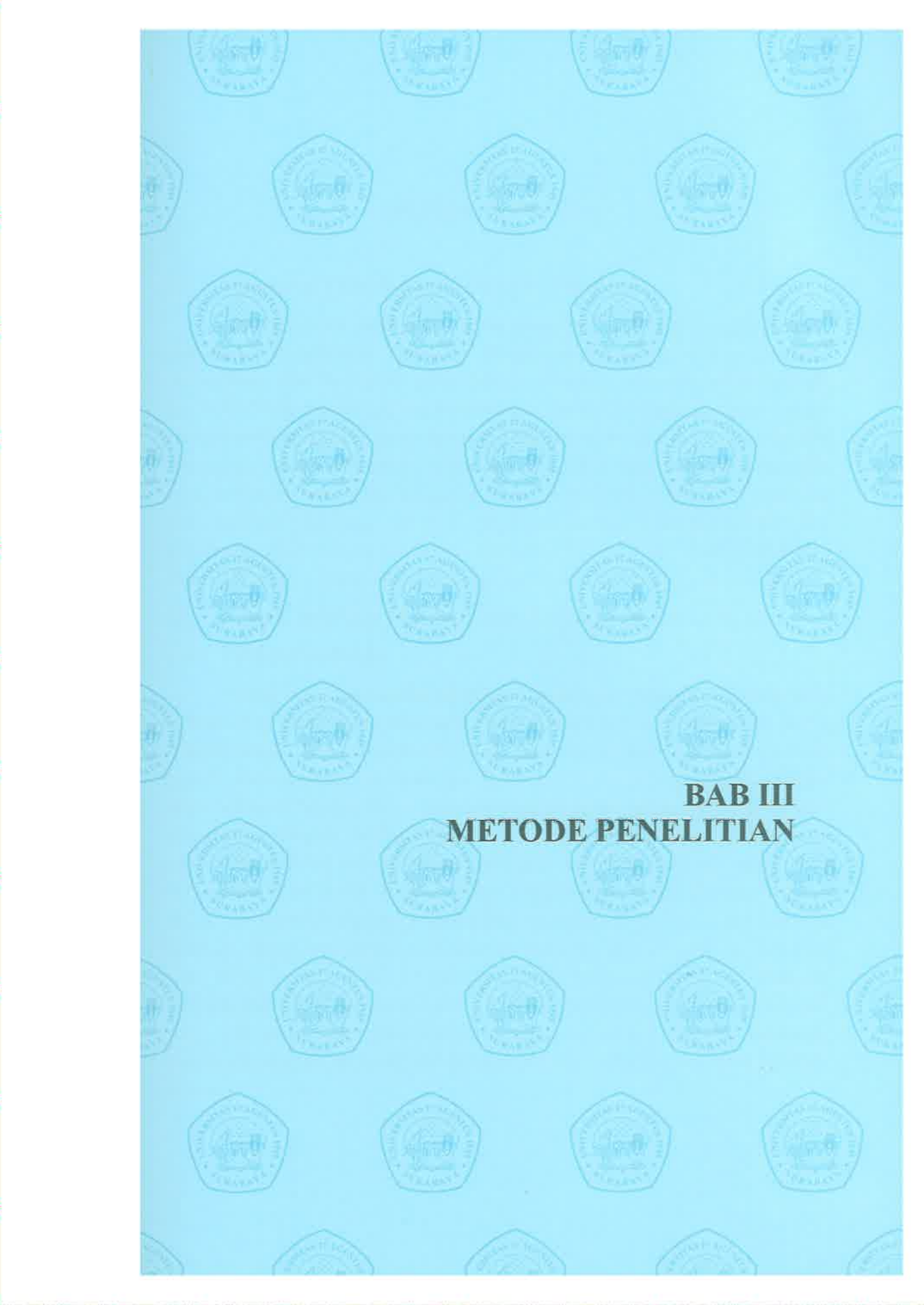
2.3.7. Aplied Theory Model Implementasi Kebijakan Menurut Jan Merse

Jan Merse (dalam Koryati, 2004: 16) mengemukakan bahwa “Model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Informasi
- b. Isi kebijakan
- c. Dukungan masyarakat (fisik dan non fisik), dan
- d. Pembagian potensi.

Khusus dukungan masyarakat, berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksanaan program. Penegasan di atas membuktikan bahwa setiap implementasi program tetap membutuhkan dukungan masyarakat atau partisipasi masyarakat sebagai *stakeholder*.

Dari beberapa uraian tentang model kesesuaian Implementasi kebijakan diatas maka penulis memilih model Implementasi Kebijakan menurut David C Korten karena model kesesuaian Implementasi Kebijakan ini sesuai dengan permasalahan yang di teliti oleh penulis. Dimana model kesesuaian Implementasi Kebijakan menurut David C Korten ini menggambarkan tentang kesesuaian antara program kebijakan dengan pemanfaatan, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian antara organisasi pelaksana dengan program sehingga memudahkan penulis dalam menganalisis permasalahan yang diteliti yaitu tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bima. Selain itu dalam teori menurut David C Korten mengemukakan tentang program pemanfaat dan organisasi dimana sesuai dengan Perda No.3 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah membahas tentang program pengurangan dan penanganan sampah dalam pengelolaan sampah sehingga relevan dengan teori David C Korten. Sedangkan model Implementasi Kebijakan yang lainnya tidak membahas keterkaitan antara proram pemanfaat dan organisasi pelaksana.



BAB III

METODE PENELITIAN

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Landasan Filosofi dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan Naturalistik. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif didasarkan, oleh beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapana dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikana secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola – pola nilai yang dihadapi (Sugiyono , 2016:5). Penelitian kualitatif merupakana prosedur penelitianana yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.

3.2 Objek, Informan Penelitian dan Tehnik Pengambilan Sampel

3.2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima yang terletak di Jl.Dam Rontu Kelurahan Rabangodu Utara Kec.Raba Kota Bima Adapun alasan peneliti memilih objek penelitian ini karena fenomena yang terjadi pada Analisis Implementasi Kebijakan Pengolahan Sampah di Kota Bima belum terlaksana secara optimal terutama dalam proses penanganan atau pengelolaan sampah. Indikasi masalah yang perlu diteliti dalam penelitian ini seperti Banyaknya inovasi-inovasi maupun program yang di gagas oleh pemerintah Kota Bima melalui Dinas Lingkungan Hidup Belum Berjalan secara maksimal,Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan program dan inovasi dalam menjalankan program yang di gagas pemerintah Kota Bima melalui Dinas Lingkungan Hidup,Belum tegasnya Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2018 tentang penanganan sampah yang ada pada Kota Bima,Belum adanya sosialisasi terbuka mengenai pemilahan sampah yang organik dan non organik kepada masyarakat sebelum dibuang.

3.2.2 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, informan penelitian adalah orang yang berpartisipasi dalam memberikan informasi tentang situasi dan kondisi ataupun orang yang dianggap benar-benar tahu dan menguasai masalah serta terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2016:34). Informan penelitian ini adalah:

1) Informan kunci

Informan kunci adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi penting dan krusial serta terlibat secara langsung terkait dengan topik permasalahan yang diteliti.

2) Informan pendukung

Informan pendukung adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi tambahan dan sifatnya dapat mendukung data serta terlibat secara tidak langsung terkait dengan topik permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tabel Informan

No	Jabatan	Nama	Jumlah
Informan Kunci			
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima	Syarief Rustaman, S.Sos.M.Ap	1 Orang
2	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima	Drs. Tamsil	1 Orang
3.	Inspektur Inspektorat Kota Bima	Drs.H.M.Fakharunraji.ME	1 Orang
4	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Aries Dedy Bayu,SE	1 Orang
Informan Pendukung			
1	Ka. UPT TPA	Iskandar Masjrun,ST	1 Orang

No	Jabatan	Nama	Jumlah
2	Direktur Bank Sampah	Herlistiatuti,ST	1 Orang
3	Tokoh Masyarakat	Ahyar, S.sos, M.Ap	1 Orang
Informan Media			
1	Garda Asakota (wartawan)	Suhardin	1 Orang
Informan Swasta			
1	BUMN (Kepala Pegadaian) Cabang Bima	Isti Ariyani, SE	1 Orang
Informan Komunitas			
1	LSM	Dian Jamaludin Adam	1 Orang
Jumlah			10 Orang

Penulis mengambil informan penelitian diatas sebagai orang yang memberikan informasi mengenai pengelolaan sampah yang ada pada Kota Bima dikarenakan informan penelitian tersebut memahami dan menguasai tentang masalah penelitian yang penulis teliti yaitu tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Kota Bima.

3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel

Tehnik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dimana, menurut Sugiyono (2016:89) adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan, dalam bahasa sederhana purposive sampling itu dapat dikatakan sebagai secara sengaja mengambil sampel tertentu sesuai persyaratan atau karakteristik yang diinginkan dan dianggap benar- benar terlibat, dan memahami permasalahan atau topik penelitian yang diangkat.

3.3 Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiono, 2015). Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data melalui:

1. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiono, 2015).

2. Dokumentasi

Dokumentasi Sugiono (2015:240) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritra, biografi, peraturan, kebijakan. Dengan dokumen yang berbentuk karya misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lainlain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain (Sugiono, 2015).

3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung pada objek penelitian guna memperoleh data yang actual untuk dibandingkan dengan data yang diperoleh dari narasumber (Sugiono, 2015).

3.3.2 Uji Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah salah satu unsur penting di dalam sebuah penelitian. Keabsahan data berperan sebagai penentu apakah penelitian dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. lidasi adalah sebuah usaha untuk memeriksa akurasi dari penelitian melalui prosedur tertentu. Di dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan proses validasi untuk mengetahui apakah penelitian sudah akurat baik dari sudut pandang peneliti, informan, maupun pembaca secara umum.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini peneliti merencanakan untuk melakukan wawancara secara tidak struktur kepada informan kunci, informan pendukung dalam memberikan informasi yang mendukung penelitian ini. Dalam melakukan penelitian sebaiknya menggunakan satu atau lebih strategi untuk memastikan validitas data. Di

dalam penelitian ini strategi yang digunakan adalah triangulasi data yang dibedakan menjadi tiga jenis triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Selain melakukan wawancara mendalam dengan pihak Informan Penelitian, peneliti juga akan turut melakukan wawancara dengan pihak-pihak pendukung lainnya.

2. Triangulasi Teknik

Sumber data harus bervariasi untuk mencocokkan setiap data yang diperoleh. Dalam penelitian ini selain melakukan wawancara dengan Instrumen Penelitian, peneliti juga akan melakukan studi pada dokumen-dokumen yang ada untuk membantu menyambungkan data yang diperoleh dengan penelitian ini.

3. Triangulasi Waktu

Pengumpulan data akan dilakukan di waktu dan tempat yang berbeda karena tidak dapat dipungkiri waktu akan mempengaruhi kualitas informasi yang didapatkan. Jawaban saat malam hari dan siang hari akan berbeda, jawaban saat sebelum dan sesudah pelaksanaan akan berbeda.

3.3.3. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Husein Umar, 2013:42). Sedangkan menurut (Nur Indrianto dan Bambang Supono, 2013:142) data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.

2. Data Sekunder

Menurut (Husein Umar, 2013:42) data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram". Sedangkan menurut (Nur Indrianto dan Bambang Supomo, 2013:143) data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)". Contoh data sekunder misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data model Miles dan Huberman (dalam Sugiono, 2018), yang terdiri atas beberapa tahap yaitu:

1. Pengumpulan Data

Umumnya peneliti melakukan studi pustaka terlebih dahulu untuk memverifikasi dan melakukan pembuktian awal bahwa permasalahan yang akan diteliti benar-benar ada. Kemudian selanjutnya melakukan wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data lapangan. Setiap proses seperti membangun raport, berinteraksi dengan subjek dan informan yang dilakukan diawal penelitian merupakan proses dari pengumpulan data.

2. Reduksi data

yaitu proses merangkum, memilih dan memilah segala bentuk data yang diperoleh lapangan untuk dibentuk menjadi tulisan yang akan dianalisis. Hasil dari rekaman wawancara yang dilakukan pada subjek akan dibentuk menjadi verbatim dan hasil obserbasi akan dibentuk menjadi tabel observasi.

3. Penyajian Data (Display data)

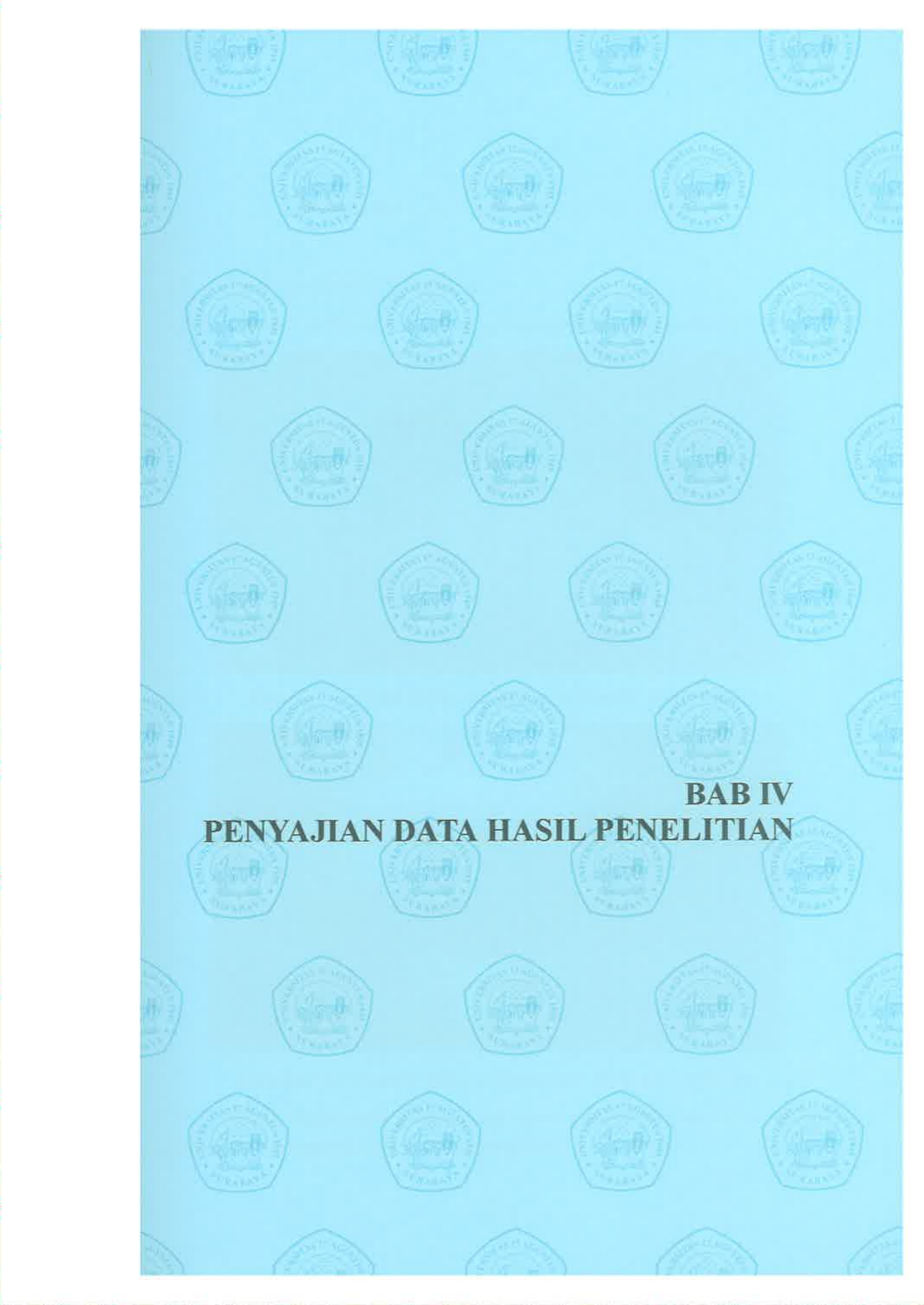
Setelah semua data yang diperoleh disusun dalam bentuk naskah, selanjutnya adalah melakukan penyajian data untuk mengolah data setengah jadi tersebut dalam bentuk tulisan yang memiliki alur tema yang jelas,

kemudian akan dikelompokkan serta dikategorikan kedalam bentuk yang lebih konkret dan diakhiri dengan memberikan kode. Proses pemberian kode ini berfungsi untuk memasukkan dan mencantumkan setiap pernyataan subjek dan informan sesuai dengan kategori tema dan subkategori serta memberikan kode-kode tertentu dari setiap pernyataan yang diberikan oleh subjek

4. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi

Mengambil kesimpulan atau verifikasi, merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data model Miles dan Huberman. Kesimpulan mengarah pada pertanyaan yang penelitian yang telah diajukan sebelumnya. Pengambilan kesimpulan dalam penelitian kualitatif mencakup uraian dari seluruh subkategorisasi tema yang tercantum disertai dengan quote verbatim wawancara. Setelah diuraikan maka hasil penelitian perlu dijelaskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang didasarkan pada aspek, komponen, faktor dan dimensi penelitian.

Halaman Ini Sengaja Dikosongi



BAB IV

PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN

BAB IV

PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima



Gambar 4.1 Peta Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima



Gambar 4.2 Kantor Dinas Lngkungan Hidup Kota Bima

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima terletak di Jalan Dam Rontu Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima adalah salah satu dinas di bawah Pemerintah Kota Bima yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup di wilayah kota. Dinas ini memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, mengatur kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam, serta mengawasi implementasi peraturan lingkungan di Kota Bima. (<https://dlh.bimakota.go.id/>)

Sejak Tahun 2003 pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup. Kemudian pada tahun 2013 dibentuk Badan Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima. Sedangkan pelaksanaan pelayanan kebersihan dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman. Selanjutnya pada Tahun 2016 terjadi lagi perubahan nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup tipe A sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan di bidang lingkungan hidup. (<https://dlh.bimakota.go.id/>)

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Bima Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima. (<https://dlh.bimakota.go.id/>)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Lingkungan

Hidup Kota Bima dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok “membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang lingkungan hidup”. (<https://dlh.bimakota.go.id/>)

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
4. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di bidang lingkungan hidup; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Kota Bima saat ini, terutama dalam aspek pemanfaatan potensi dan permasalahan pengelolaan lingkungan, serta untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Walikota Bima Sampai saat ini maka visi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima adalah:

“Menuju Kota Bima Yang Ramah Lingkungan”

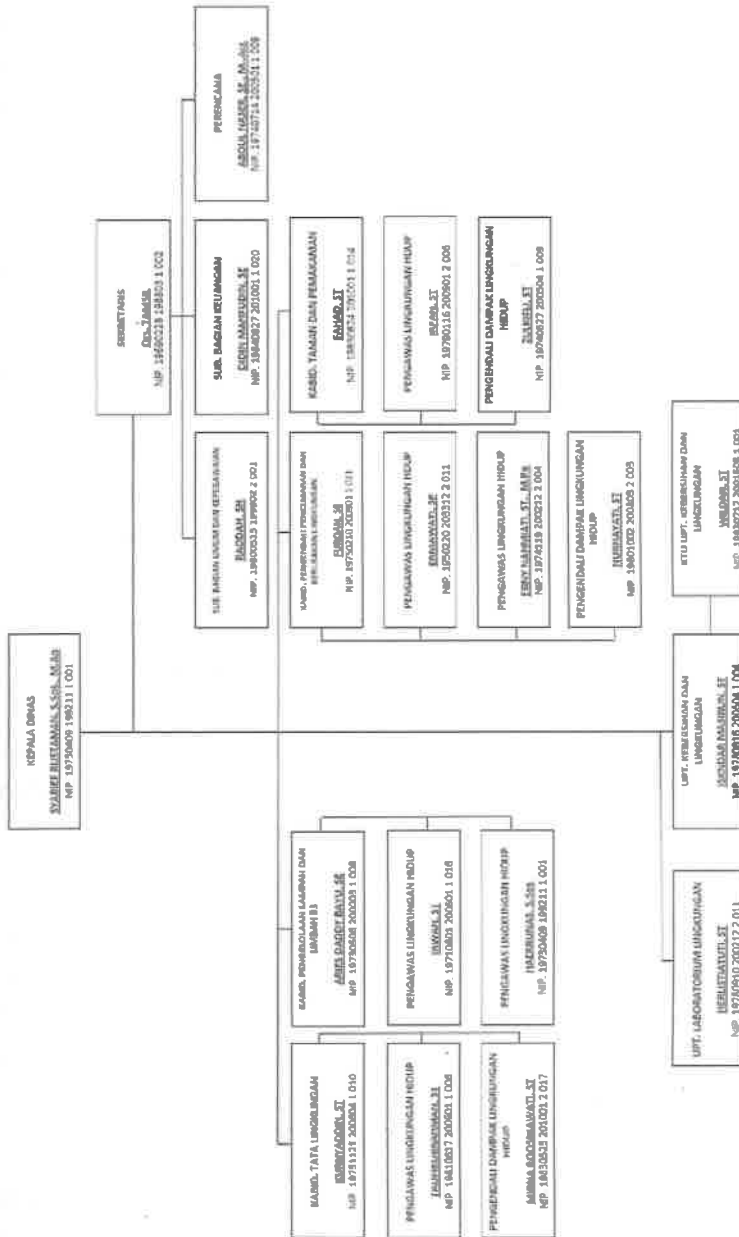
Dalam upaya mewujudkan visinya, ditetapkan 5 (lima) misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu dan kinerja DLH yang berwibawa dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
2. Meningkatkan pengelolaan kebersihan Kota yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan melalui pelestarian, pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup.

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (<https://dlh.bimakota.go.id/>)

Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 peraturan pelaksanaan PERDA Kota Bima No.3 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah meliputi :

1. Menetapkan target pengurangan sampah dan merumuskan ke kebijakan pengurangan dan penanganan sampah
2. Menyusun informasi pengelolaan sampah
3. Membina dan meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat dalam mengurangi timbulan sampah
4. Membina dan mempraktikan contoh baik dalam penggunaan produk dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaurulangan dan pemanfaatan Kembali sampah
5. Mengordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah
6. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah
7. Penetapan lokasi dan pengawasan TPS, TPST dan TPA
8. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat sampah
9. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah
10. Pelaksanaan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya serta kemitraan dengan badan usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah
11. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah
12. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan swasta
13. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain /badan usaha
14. Melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan nol sampah sesuai dengan tugas dan fungsinya
15. Melakukan koordinasi antara Lembaga pemerintah baik di pusat dan daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Gambar 4.3 Struktur Organisasi DLH Kota Bima

4.2. Penyajian Data

Data yang disajikan ini akan diuraikan secara deskriptif yang diperoleh dari hasil wawancara, yaitu 10 Orang informan. Adapun informan yang dimaksud terdiri dari 4 informan kunci yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, Kepala Dinas Inspektorat Kota Bima, Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan limbah B3. Selain itu tiga orang informan pendukung yaitu Kepala UPT TPA, Direktur Bank Sampah dan Tokoh Masyarakat. Kemudian satu orang informan media dari Garda Asakota, satu orang inforan swasta yaitu Kepala Pegadaian Cabang Bima dan satu orang informan komunitas dari LSM.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bima Berdasarkan Hasil wawancara Tanggall 22 Oktober 2024 dengan Bapak Syarief Rustaman Selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima yaitu Program pengelolaan sampah di Kota Bima meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah dimana penanganan sampah memastikan bahwa produksi sampah yang terangkut dan terlayani sedangkan pengurangan sampah yaitu mengaktifkan Kembali bank sampah induk, TPS3R Bank Sampah Induk, Bank Sampah Kelurahan serta Bank Sampah Unit yang ada di Sekolah. Sehingga diharapkan pengurangan yang ingin dilakukan tersebut sesuai dengan target nasional. Namun pada saat ini yang baru maksimal yaitu penanganan pelayanan dimana pada saat ini baru terlayani 36 kelurahan dari 41 kelurahan dengan system pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir. Dalam hal aspek pembiayaannya masih perlu diperhatikan melalui APBD.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tamsil selaku sekertaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima pada hari senin tanggal 4 november 2024 yaitu program yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima adalah pengurangan sampah dan penanganan sampah namun pengurangan sampah masih tidak berjalan dikarenakan membutuhkan sumberdaya yang memadai serta keterbatasan anggaran.

Model Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bima berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Ahyar selaku tokoh masyarakat pada hari minggu tanggal 24 November 2024 yaitu adalah keterlibatan masyarakat masih sangat kurang dikarenakan kurangnya sosialisasi yang

dilakukan oleh dinas lingkungan hidup Kota Bima tentang kebijakan pengelolaan sampah. Selain itu tempat pembuangan sampah masih sangat terbatas dan belum adanya tempat pembuangan sampah organik dan an organik. Selain itu keterbatasan anggaran yang tersedia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima sehingga membuat pengelolaan sampah belum maksimal.

Berikut pelayanan sampah harian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima:

Tabel 4.1 Timbulan Sampah dan Jumlah penduduk

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Produksi Sampah/ Orang/ Hari (Kg)	Timbulan (Ton)	Terangkut (Ton)	Tidak Terkelola (Ton)	Ket
1	2021	156.224	0,5	78.112	538,65	77.573	Hari
2	2022	157.362	0,5	78.681	581,21	78.100	Hari
3	2023	161.362	0,5	80.681	581,21	80.100	Hari

Sumber: Bidang PSLB3 DLH Kota Bima, 2023

Keterangan :

- Sampah terangkut : Sampah dari sumber sampah yang dibawa ke TPA dengan menggunakan Sarana pengangkutan sampah
- Sampah Tidak Terkelola : Sampah yang merupakan selisih sampah dari timbulan sampah dikurangi sampah yang terangkut

Tabel tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan SNI 3242-2008 tentang pengelolaan sampah di permukaan, Kota Bima masuk dalam kategori Kota Sedang dimana produksi sampah per orang per hari sebesar 0,5 Kg per orang per hari. Angka produksi sampah per orang per hari ini dikalikan dengan jumlah penduduk (dalam jiwa) sehingga didapatkan angka timbulan sampah (dalam Ton).

Timbulan sampah adalah sejumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu aktifitas dalam kurun waktu tertentu atau dengan kata lain banyaknya sampah yang dihasilkan dalam satuan berat (kg) gravimetri atau volume (liter)

volumetri (Tchobanoglous et al, 2014). Dalam persampahan istilah yang lumrah digunakan adalah Timbulan dan bukan timbunan.

Selanjutnya, timbulan sampah yang ada, dibuang ke TPA dengan memanfaatkan sarana yang ada tersebut dalam tabel tersebut di bawah ini :

Tabel 4.2 Sarana Penanganan Sampah DLH Kota Bima

Jenis Peralatan	Jumlah (Unit)	Kapasitas (M ³)	Total Sampah Terangkut (M ³)	Berat Jenis Sampah	Sampah Terangkut (Ton)	Ket
Dump Truck	24	6	144	1,33	191,52	
Ambroll	5	6	30	1,33	39,9	
Motor 3 Roda	6	1,5	9	1,33	11,97	
Container	37	6	222	1,33	295,26	
Compactor	1	8	8	1,33	10,64	
Pick Up	8	3	24	1,33	31,92	
TOTAL			437		581,21	

Rata-rata peralatan penanganan sampah yang ada dilaksanakan dengan ritase 1 kali dalam 1 hari, sehingga didapatkan sampah terbuang sebanyak 437 Meter kubik per hari. Selanjutnya sesuai dengan standar SNI tersebut di atas, bahwa berat jenis sampah perkotaan adalah sebesar 0,33. Dari uraian tersebut bahwa jumlah kubikasi sampah yang dibuang dikalikan dengan berat jenis sampah yang ada didapatkan sampah terkelola dalam Ton sebesar 581,21 Ton per hari dan sampah yang tidak terkelola sebesar 235.773 Ton per Hari.

Tabel 4.3 Matriks Belanja pelayanan persampahan pada tahun 2021-2023

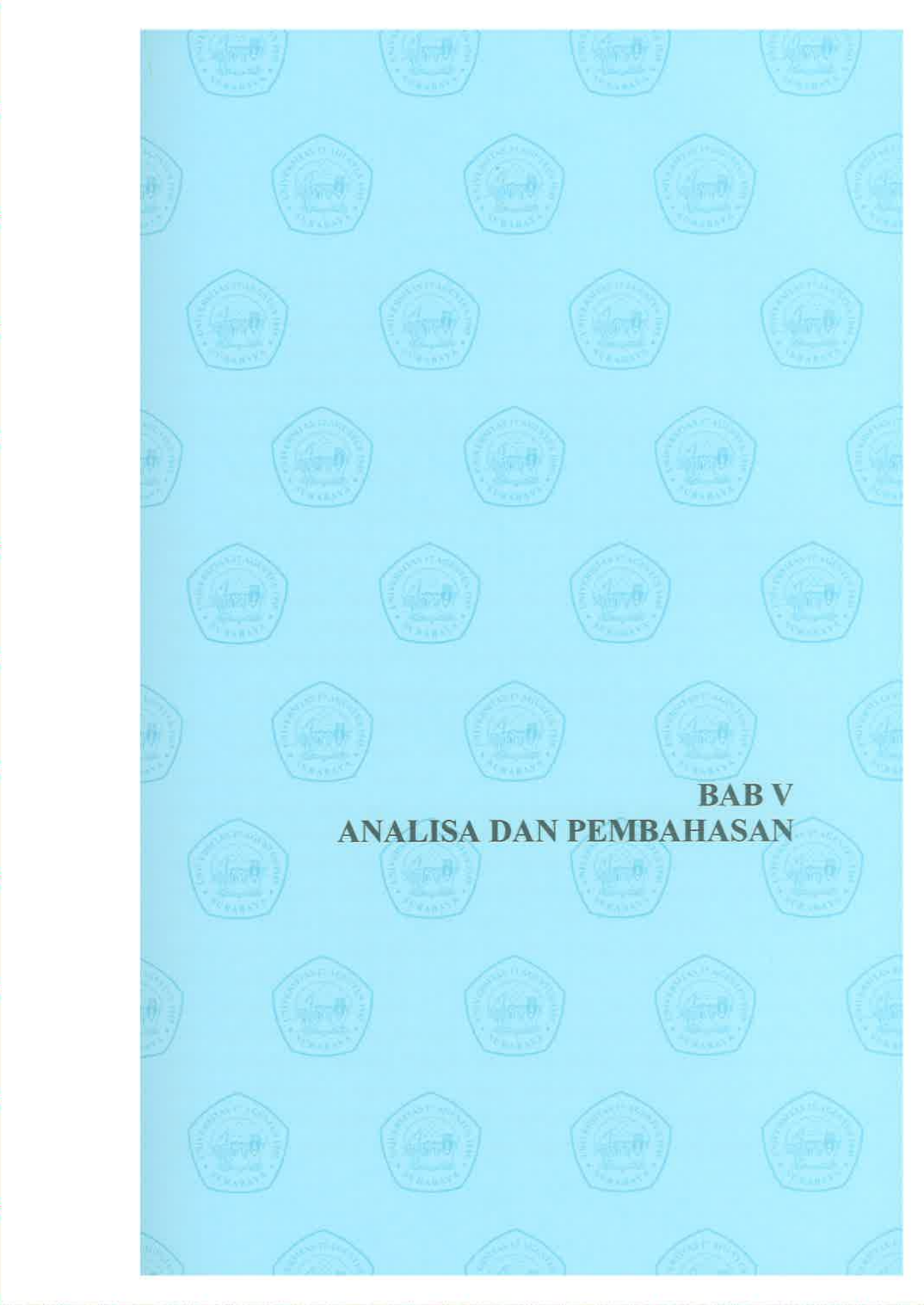
No	Uraian Belanja	Nilai Pagu (Rp.)		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
		3.109.871.500	3.374.707.744	4.981.704.000
1	Tanah Urugan Sanitary Landfill	69.400.000	79.555.300	65.000.000

2	Bahan Bakar dan Pelumas	757.464.500	717.928.850	880.973.000
3	Suku Cadang alat Angkut	617.376.000	703.760.000	678.010.000
4	Belanja Alat dan Bahan kerja	90.886.000	260.731.594	246.393.000
5	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.574.745.000	1.612.732.000	3.111.328.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DLH Kota Bima

Berdasarkan data tersebut di atas, tergambar jelas bahwa kegiatan penanganan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima hanya berfokus pada upaya pengumpulan, pengangkut dan pemrosesan akhir sampah. Sedangkan upaya pengurangan sampah, Pemilahan Sampah, dan Pengolahan Sampah tidak dilakukan. Sejatinya, pengelolaan sampah harus berbasis pada pengurangan sampah, pemilahan sampah dan pengolahan sampah karena kegiatan pengumpulan, pengangkut dan pemrosesan akhir sampah berimplikasi pada ketersediaan lahan pembuangan sampah yang cepat penuh.

Halaman Ini Sengaja Dikosongi

The background of the page is a light blue color with a repeating pattern of the University of Jember logo. The logo is a circular emblem featuring a building and the text 'UNIVERSITAS JEMBER' and 'Jember' below it.

BAB V

ANALISA DAN PEMBAHASAN

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bima

Salah satu wujudnya pengelolaan sampah oleh pemerintah Kota Bima adalah dengan diterbitkannya peraturan daerah Kota Bima No.3 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah sebagai Langkah dan cara dalam menangani permasalahan sampah di Kota Bima. Secara garis besar, isi kebijakan didalam perda ini memuat dua hal yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah.

1. Pengurangan Sampah

Untuk pengurangan sampah saat ini belum dilaksanakan secara optimal dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumberdaya. Terkait pengurangan sampah pada saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima melakukan pendekatan dengan mengaktifkan kembali Bank Sampah Induk (BSI), TPS3R, Bank Sampah Kelurahan serta Bank Unit yang ada di sekolah. Sehingga diharapkan pengurangan sampah sesuai dengan target nasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Syarief Rustaman yaitu Program “Pengelolaan sampah di kota Bima meliputi Pelayanan dan Pengurangan yang dimana Pelayanan memastikan Produksi sampah yang terangkut dan terlayani sedangkan pengurangannya pada saat ini melakukan pendekatan mengaktifkan kembali Bank Sampah Induk dan TPS3R, Bank Sampah Kelurahan serta Bank sampah unit yang ada di Sekolah. Bank sampah tersebut sudah berjalan, DLH sedang melakukan upaya dalam mengoptimalkan serta melakukan pendekatan terhadap Bank Sampah Induk maupun TPS3R, sehingga diharapkan pengurangan yang ingin dilakukan tersebut sesuai dengan target nasional dengan harapan bisa terpenuhi, namun pada saat ini yang baru maksimal yaitu penanganan pelayanan dari 41 Kelurahan yang baru terlayani adalah 36 Kelurahan dengan sistem Kumpul ,angkut dan buang.” (Selasa, 22 Oktober 2024). Sedangkan menurut Tamsil (Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima) mengatakan” sesuai yang dimuat dalam perda bahwa program yang dijalankan oleh DLH yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah, jadi kedua program tersebut yang sudah jalan di kota bima yaitu baru penanganan

sampah berupa Kumpul-Angkut- Buang Ke TPA dan di TPA dilakukan pemrosesan akhir sementara di program pengurangan ini masih mandek dijalankan atau masih tidak berjalan dikarenakan butuh lembaga, personil, sumberdaya yang memadai seperti adanya TPS3R maupun Bank sampah-Bank sampah Unit yang tersebar tetapi yang sekarang bank samapah tersebut sekitar 8 atau 9 bank sampah yang mati suri atau tidak berjalan sehingga untuk pengurangan sampah itu belum berjalan di kota bima dan belum maksimal dilakukan proses pengurangan”.(senin, 4 November 2024)

Kemudian hasil wawancara dengan Aries Dedy Bayu Kepala Bidang PLSB3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima ,mengatakan “ pengurangan sampah yang ada di Kota Bima seharusnya dilakukan melalui mesin-mesin ataupun pemilahan. Jadi volume sampah kita perhari dengan kondisi keadaan pada hari ini sekitar 80,6 ton untuk pengurangan masih dalam angka 1% yaitu melalui BSI. Sehingga dengan adanya TPST Diharapkan 50% sampah yang diangkut dari sumbernya ke TPA bisa berkurang “.(Rabu,27 Oktober 2024)

Penanganan sampah

Adapun untuk penanganan sampah dilakukan dengan cara :

- a. Pemilahan
- b. Pengumpulan
- c. Pengangkutan
- d. Pengolahan
- e. Pemrosesan akhir sampah

Pertama Pemilahan dimana proses ini belum dilakukan sepenuhnya oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dikarenakan keterbatasan anggaran sesuai dengan pernyataan dari

Herliastuti, selaku (Direktur Bank Sampah Induk) yaitu “program yang dijalankan Bank sampah dalam pengolahan sampah, yang pertama karena bank sampah itu masih nol budget dan tidak ada anggaran dia lebih cenderung ke sosialisasi – sosialisasi pada saat ini sosialisasi dilakukan pada sekolah – sekolah pada tempat vasum diharapkan dengan adanya edukasi ke warga dan siswa kita sama- sama paham

bahwa pilah sampah dari sumber adalah alternatif terbaik dalam pengelolaan sampah kita. Tantangannya karna sampah yang masuk ke bank sampah atau ke TPA misalnya itu sampah campran nah pemilahan sampah yang Ketika tercampur itu butuh waku, butuh keinginan besar karena sampah yang tercampur itu nilai ekonomisnya tidak ada dan ada rasa ke enggan untuk mengelolanya nah karna itu kami akan coba terus melakukan sosialisasi agar pemilahan sampah itu di lakukan dari sumbernya misalnya sampah rumah tangga di pilah an organic dari sumbernya daru rumah tangga begitupun dengan sekolah – sekolah jangan mencampur bekas makanan kantin dengan sampah an organiknya seperi botol dan gelas kemasanya. Bank sampah Induk ini berkolaborasi degan dlh kota bima saat ini bank sampah sangat terbantuan sebagai unit kegiatan yang dibawah naungan dari dlh kami selalu berupaya mengkordinasikan kegiatan-kegiatan kami ke dlh. bank sampah memanfaatkan sampah yangdi Kelola seperti produk daur ulang atau bahan mentah lainnya untuk sampah an organic sendiri kami coba membuat untuk saset saset itu seperi tisu,karpet untuk meningkatkan nilai ekonomisnya” .(Selasa, 12 November 2024)

Selain itu salah satu cara dalam pemilahan sampah yang ada di Kota Bima seharusnya menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan an organik di setiap rumah tangga, Kawasan permukiman , Kawasan komersial, Kawasan industry, Kawasan khusus , fasilitas umum , fasilitas sosial dan fasilitas lainnya. Namun pada kenyataanya hal tersebut belum maksimal dikarebakan belum terdapat di setiap wilayah yang ada di kota bima sesuai dengan pernyataan

Kemudian menurut Ahyar selaku Tokoh Masyarakat “apabila melihat secara makro, masih ada beberapa yang perlu dibenahi seperti ketersediaan tempat sampah pada tempat tempat umum atau keramaian, Dalam hal fasilitas atau sarana kebersihan seperti tempat pembuangan sampah Menurut saya masih sangat kurang. Terutama pada tempat tempat keramaian

seeperti taman amahami. Nah dalam hal ini saya masih belum melihat adanya pemilahan sampah, apakh itu sampah organik atau nonorganik” perlu membuat dan mengaplikasikan pemilahan sampah organic dan non organic. Pemilahan ini bukan sebatas pemilahan pada saat sampah di ambil di tempat.Sampai saat ini perubahan belum secara signifikan, sampah palstik masih berserakan pada tempat-tempat umum.Begitupun dengan prilaku masyarakat belum banyak mengalami perubahan (Minggu,24 November 2024)

Selain itu pernyataan yang sama pula disampaikan oleh Syarief Rustaman. kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima yaitu “Namun dalam kenyataannya tong sampah yang diberikan tersebut mudah hilang sehingga DLH menghimbau agar masyarakat bersama-sama ikut menjaga karena partisipasi masyarakat juga penting”. (Selasa, 22 Oktober 2024).

Selanjudnya Iskandar Masjrun Selaku Ketua TPA mengatakan Bahwa pemilahan dan pengolahan sampah belum di jalankan diakibatkan kurangnya SDM dan Anggaran yang ada. Dalam hal ini kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat kota bima bahwa budaya yang ada di kota bima telah memahami pemilahan sampah dari budayanya namun semakin kesini masyarakat tidak sadar dengan sampah tersebut , dalam menjawab Langkah-langkah khusus tersebut dinas harus turun dan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarkat yang dimana kegiatan tersebut mencari tempat untuk dijadikan sebagai daerah binaan sebagai percontohan dalam pemilahan sampah. Selain itu belum ada kolaborasi antara DLH dengan masyarakat untuk melakukan pemilahan dimana belum ada keterikatan dengan masyarakat langsung masih lewat perantara kantor lurah tidak mengena secara langsung kepada masyarakat sehingga orang-orang yang di undang saja yang mengetahui ,alangkah baiknya sosialisasi langsung terhadap masyarakat. Adapun dampak yang disosialisasikan tersebut tidak ada perubahan melainkan sampahnya tetap konsisten dan

terus meningkat. Kalupun ada kegiatan melakukan pemilahan DLH sering mengadakan CSRAN dengan pihak suwasta hanya dalam satu kegiatan saja. (Rabu, 27 Oktober 2024)

Berdasarkan wawancara dari narasumber-narasumber tersebut diatas bahwa masih kurangnya fasilitas berupa tempat sampah organik dan an organik yang tersedia di wilayah Kota Bima. Sehingga kenyataannya dilapangan masih banyak sampah yang berserakan.

Kedua : Pengumpulan dimana sampah yang ada pada kota bima dikumpulkan oleh masing-masing rumah tangga yang kemudian menunggu jadwal untuk diangkut oleh Dump Truck Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima. Sampah-sampah yang ada pada masyarakat masih bercampur dan dikumpulkan menjadi satu kedalam karung dan kantong plastik, Sehingga sampah plastik semakin bertambah dikarenakan belum adanya komitmen yang tegas oleh pemerintah daerah dan belum adanya surat edaran tentang pembatasan penggunaan sampah plastik.

Menurut Ahyar selaku tokoh masyarakat" Masyarakat hanya membuat semua sampah pada satu karung yang didalamnya semua sampah jadi satu" (Minggu 24 November 2024)



Gambar 5.1 Pengumpulan Sampah di Rabadompu Barat

Gambar 5.1. memperlihatkan kondisi pengumpulan sampah yang berada di wilayah Rabadompu Barat dimana tumpukan sampah terlihat masih bercampur dan dikumpulkan kedalam plastik. Sedangkan Gambar 5.2 dibawah ini memperlihatkan pengumpulan sampah yang berada di wilayah taman paruga na'e. dimana sampah dikumpulkan kedalam kantong plastic besar dan di tumpuk antara sampah yang satu dengan yang lainnya.



Gambar 5.2 Pengumpulan Sampah di taman paruga na'e



Gambar 5.3 Pengumpulan Sampah di Rabangodu Utara.

Gambar 5.3 diatas menunjukkan tentang pengumpulan sampah diwilayah rabangodu utara. Dimana sampah- sampah tersebut dikumpulkan menggunakan karung besar yang disimpan di depan jalan.

Ketiga : Pengangkutan dimana pengangkutan sampah yang ada pada Kota Bima dijadwalkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dimulai dai pukul 05.00 wita s/d 07.00 wita.

Hasil wawancara dengan Safrudin selaku Wartawan Garda Asakota *“Sejauh ini yang sering dipersoalkan masyarakat mengenai waktu pengambilan sampah di titik penjemputan sampah yang terkadang kurang pagi dan tepat waktu.”* (Jumaat,25 Oktober 2024)

Selain itu menurut pernyataan Ahyar selaku Tokoh Masyarakat. jika melihat secara mikro pada lingkungan tempat tinggal saya di mana dalam satu minggu terjadwal dengan baik selama 3 hari dalam seminggu. Sejauh ini hanya terkait pengangkutan saja yang telah dilakukan” (Minggu,24 November 2024)

Kemudian menurut LSM yang bernama DiyanJmaludin Adam *“penanganan sampah yang diterapkan oleh DLH kota bima belum sesuai dengan harapan masyarakat kota bima bahkan masih jauh dari harapan masyarakat kota bima karena pengambilan sampah juga masih satu kali sehari itupun pagi dan belum di tertipkan pembuangan sampah kadang masyarakat malam di buang sudah di hambur- hamburkan oleh binatang seperti kucing,anjing”* (Rabu,06 November 2024)

Jadi bisa disimpulkan bahwa jadwal pengangkutan sampah yang ada pada kota bima berbeda- beda di setiap wilayahnya dan belum tertib dalam waktu pengambilan sampahnya. Ada yang di ambil dalam seminggu tiga hari, ada yang di ambil sekali dalam satu minggu sehingga belum ada keseragaman dalam hal jadwal pengangkutan di setiap wilayah yang ada di Kota Bima.

Gambar 5.4. Memperlihatkan proses pengangkutan sampah yang berada diwilayah sadia. Sampah – sampah di angkut kedalam Dumptruck oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.

Gambar 5.5 memperlihatkan tentang pengangkutan sampah diwilayah BTN santi. Sampah- sampah dikumpulkan menggunakan kardus, karung dan plastik. Sampah tersebut kemudian diangkut kedalam Dumptruck oleh petugas

kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima. Sampah-sampah tersebut terlihat diletakan di pinggir jalan.



Gambar 5.4 Pengangkutan Sampah di Sadia



Gambar 5.5 Pengangkutan Sampah di BTN Santi



Gambar 5.6 Pengangkutan Sampah di Kelurahan Dara

Gambar.5.6 memperlihatkan pengangkutan sampah di wilayah kelurahan Dara. Sampah-sampah tersebut terlihat berserakan dan dikumpulkan kedalam plastik-plastik yang kemudian dimasukan kedalam dumptruck.



Gambar 5.7 Pengangkutan Sampah di Kelurahan Paruga

Selanjutnya gambar 5.7 memperlihatkan tentang pengangkutan sampah di wilayah kelurahan paruga. Sampah tersebut dikumpulkan

menggunakan karung-karung yang kemudian di ambil oleh petugas kebersihan.

Keempat : Pengolahan Sampah dimana pengolahan sampah yang dimaksud adalah dilakukan dengan cara pemadatan , pengomposan daur ulang dan pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan. Akan tetapi pengolahan sampah yang dimaksud tersebut belum maksimal dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dikarenakan banyak faktor salah satunya adalah keterbatasan anggaran. Kemudian keterbatasan lahan juga menjadi kendala dalam proses pengolahan sampah. Selain itu pemerintah Kota Bima melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima belum memprioritaskan persoalan pengolahan sampah sebagai sesuatu yang mendesak.

Sejalan dengan pernyataan KUPT TPA Iskandar Masjrur,. Bahwa *“pemilahan dan pengolahan belum di jalankan diakibatkan kurangnya SDM dan anggaran yang ada”*. (Rabu,27 Oktober 2024)

Selanjutnya menurut Aries Dedy Bayu, Kepala Bidang PLSB3 Dinas Linkungan Hidup Kota Bima, *“Sampai saat ini program pengelolaan sampah masih berbasis pada pelayanan Pungut-angkut- buang, untuk pemilahan dan pengolahan masih dalam proses pengajuan proposal ke KEMENPUPR tetapi terkendala pada lahan karena untuk pengolahan sampah itu memerlukan lahan lebih kurang sekitar 5 Hektar”*. (Rabu,27 Oktober 2024)

Selain itu Ahyar.S.sos. mengatakan bahwa *Terkait pengolahan sampah juga setau saya sejauh ini belum ada sama sekai. Dimana sampah hanya dikumpulkan saja untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir sementara selanjutnya akan bagaimana dan dibagaimanakan sampai itu saya tidak tau dan tidak mendengar sama sekali terkait pengolahan lanjutan sampah tersebut* (Minggu,24 November 2024)

Maka dari pernyataan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa untuk pengolahan sampah yang ada pada Kota Bima belum dilakukan sesuai dengan yang sudah dituangkan dalam perda no.3 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah Kota Bima.

Kelima : Pemrosesan Akhir sampah dimana dilakukan dengan cara mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Sampah yang sudah diangkut oleh Dump

Truck Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima di lakukan pemrosesan akhir pada TPA. Kondisi saat ini di TPA adalah banyaknya sampah residu yang menumpuk yang tidak bisa di daur ulang karena tidak terjadinya proses pemilahan.

Hal tersebut diatas dapat dilihat dari pernyataan Iskandar Masjrun (KUPT TPA) *“Adapun dampak kebijakan pengelolaan sampah di kota bima dengan adanya sampah yang terpilah itu ada nilainya sehingga sampah yang dibuang di TPA semakin sedikit tidak memenuhi TPA, Tapi sampah di kota bima saat ini belum ada pemilahan dan pengolahan tetapi masih melakukan kegiatan pengangkutan langsung dibuang ke TPA sehingga TPA itu penuh. TPA sebenarnya mengikuti SNI yaitu sanitarilandfil karena anggaran tidak cukup pihak TPA menggunakan open DUMPING yang menggunakan terima sampah Buangan yang dimana sistem open DUMPING itu terima sampah buangan penutupanya walaupun ada anggaranya kami tutup walaupun tidak ada kami biarkan begitu saja, Dalam menangani hambatan – hambatan ini pihak DLH menanganinya dengan ketergantungan pada anggaran, kebijakan perda harus kuat dilakukan oleh pemerintah walaupun perda berhasil pasti sudah terbentuknya Bank Sampah unit, terbentuknya TPS3R tiap kecamatan itu Langkah yang paling utama untuk memilahkan sampah namun yang dilakukan selama ini hanya pembuangan saja.”* (Rabu, 27 Oktober 2024) .



Gambar 5.8 Kondisi Sampah di TPA Kota Bima



Gambar 5.9 Kondisi Sampah di TPA Kota Bima



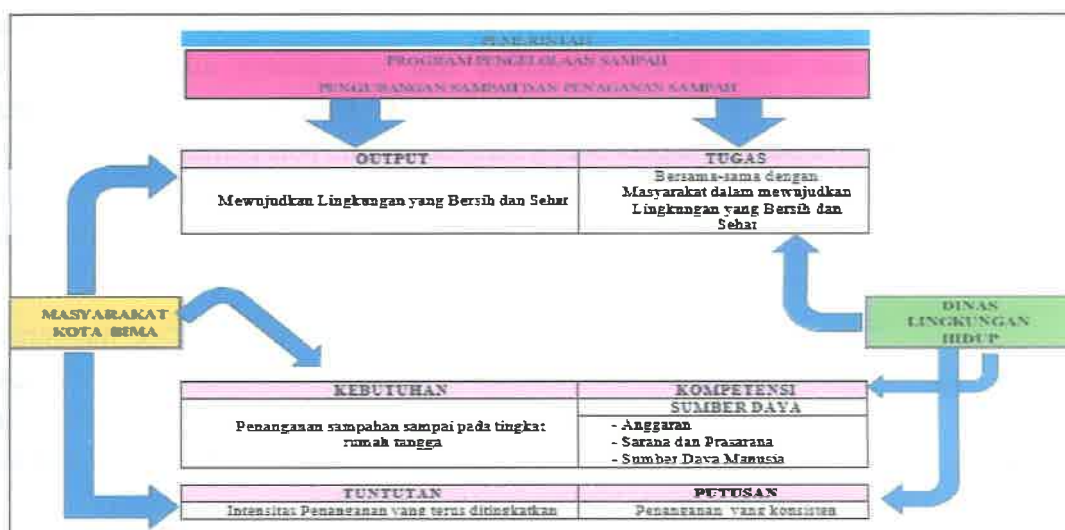
Gambar 5.10 Kondisi Sampah di TPA Kota Bima

Gambar di atas memperlihatkan kondisi sampah di TPA kota Bima. Sampah-Sampah tersebut terlihat bercampur antara sampah organik dan anorganik karena belum ada proses pemilahan pada rumah tangga. Bisa dilihat pada gambar tersebut bahwa timbunan sampah semakin menumpuk sehingga membuat lama kelamaan kapasitas TPA sudah tidak bisa menampung dikemudian hari.

5.2. Model Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bima

Dengan menggunakan pendekatan David C. Korten, ada tiga unsur implementasi Program kebijakan, yaitu: Satu, kesesuaian antara program kebijakan dengan pemanfaatan; kedua, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi Pelaksana; ketiga, kesesuaian antara organisasi pelaksana dengan program. (baca dalam Tarigan, 2014: 19)

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan apabila tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi program. Hal ini disebabkan apabila hasil program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, maka jelas hasil tidak dapat dimanfaatkan atau memberdayakan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan hasil program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan hasil program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.



Gambar 5.11 Model Kesesuaian

Berdasarkan pernyataan dari beberapa narasumber di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk pengurangan sampah di Kota Bima belum dilakukan, Sejatinya ada beberapa komponen indikator yang harus dipenuhi dalam upaya pengurangan sampah.

Langkah awal yang mutlak harus dilakukan adalah membangun kesadaran dan komitmen dari masyarakat selaku produsen sampah untuk memastikan bahwa tidak ada sampah yang terbuang sembarangan, selanjutnya juga melakukan pemilahan mulai dari tingkat rumah tangga. Pada DLH Kota Bima, bahkan upaya awal inipun belum dilakukan secara menyeluruh dan intensif.

Selanjutnya, Butuh komitmen yang kuat dari DLH selaku operator pelayanan persampahan di Kota Bima untuk menyiapkan sarana yang menunjang upaya pengurangan sampah dimaksud, yang diawali dari penyediaan sarpras di TPS/TPST, BSU dan BSI serta armada pengangkutan yang telah berbasis 3 R. Kondisi eksisting bahwa sampah yang ada masih belum dipilah sama sekali, yang artinya bahwa seluruh sampah baik organik maupun anorganik diangkut dengan media yang sama pada waktu yang bersamaan juga.

Ketika dikorelasikan dengan model kesesuaian yang disadur dari teori David C. Korten bahwa pada tingkat pemanfaat dalam hal ini adalah masyarakat Kota Bima, kebutuhan dan tuntutan adalah bagaimana lingkungannya bersih tanpa sampah tanpa mempedulikan apakah dilakukan dengan pola pungut, angkut buang ataupun dengan pola pengurangan. Menurut hasil investigasi, mereka tidak terlalu peduli dengan ini yang terpenting lingkungannya bersih dan dapat mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Output mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat dan program ini mulai menunjukkan hasil yang terus membaik, walaupun masih dilakukan dengan upaya konvensional berupa pungut, angkut dan buang. Namun bagi DLH sebagai operator harus mampu memastikan bahwa upaya pengurangan sampah harus menjadi prioritas.

1. Kesesuaian antara program kebijakan dengan pemanfaatan

Pemanfaat yang dimaksud disini adalah masyarakat Kota Bima yang menginginkan hidup bersih dan sehat. Hal tersebut harus didukung oleh program pengelolaan sampah yang ada pada Kota Bima. Akan tetapi pada kenyataannya masyarakat Kota Bima masih belum merasakan kehidupan yang bersih dan sehat seperti dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan

Selain itu hasil wawancara dengan LSM yang bernama Diyan Jmaludin Adam menyatakan bahwa “Kebijakan pengelolaan sampah di kota bima dalam memperhatikan aspek Lingkungan dan Kesehatan kalau dikaitkan dengan Kesehatan masyarakat masih jauh dari harapan dan masih menjadi PR besar untuk Dinas Lingkungan Hidup. Mestinya masyarakat juga di berikan tambahan sosialisasi oleh pemerintah untuk kesadaran membuang sampahnya dan membuang sampah pada waktu mobil sampah akan lewat di pagi hari mungkin dari DLH harus lebih mensosialisasi untuk pembuangan sampah agar lebih evektif. (06 November 2024).

Kemudian Salah satu tokoh masyarakat yang bernama Ahyar S.Sos.M.Ap mengatakan bahwa “yang perlu lebih diperhatikan lagi adalah bagaimana cara atau upaya kongkrit dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap masalah sampah dan lingkungan Seperti sampah- sampah plastik.”(Selasa,22 Oktober 2024)

Selanjudnya menurut Safrudin selaku Wartawan Garda Asakota berpendapat bahwa “Dampak kebijakan pengelolaan sampah terhadap lingkungan dan Kesehatan masyarakat sangat penting sekali seharusnya pemerintah melakukannya karena sangat penting dalam penanganan sampah”.(Jumaat,25 Oktober 2024)

Dari beberapa hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan belum ada kesesuaian antara program dengan pemanfaat . Jika output program tidak sesuai dengan kebutuhan pemanfaat maka jelas outputnya tidak dapat

dimanfaatkan. Output program yang dimaksud disini adalah meningkatnya upaya pengelolaan sampah dan kesadaran atau kepedulian masyarakat kota bima untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

2. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi Pelaksana

Pengelolaan sampah yang ada pada Kota Bima diselenggarakan dengan asas tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dan masyarakat di Kota Bima sesuai dengan asas yang berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadran, asas keselamatan , asas keamanan dan asas nilai ekonomi guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber seperti yang dijabarkan dibawah ini :

Ahyar selaku Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa “Saat ini dalam hal sosialisasi Sejauh ini saya melihat belum ada sama sekali, dan hal inilah menurut saya yang sangat perlu untuk dilakukan. Dengan membangun kesadaran pada akar rumput masyarakat. Kendala atau hambatan yang dialami masyarakat dalam mengikuti kebijakan penanganan sampah di Kota Bima mungkin hambatannya adalah kurangnya informasi atau edukasi yang dilakukan oleh pihak terkait. Menurut saya hal ini dapat diminimalisir dengan memaksimalkan fungsi-fungsi pada unit- unit kebersihan pada tingkat kelurahan jika ada. Saya rasa penting pada tingkat kelurahan untuk dibentuk unit kebersihan tersendiri. DLH Kota Bima dalam meningkatkan pengelolaan sampah yaitu memperkuat dan memperbaiki manajemen pengelolaan sampah dari rumah tangga hingga tempat pembuangan akhir. Dan merangkul komunitas komunitas lokal dalam mengkampanyekan masalah kebersihan lingkungan. Menurut saya cara terbaik agar masyarakat lebih terlibat dan peduli terhadap penanganan sampah di Kota Bima saat ini satu Dengan merangkul komunitas-komunitas lokal yang memiliki fokus yang sama terhadap isu-isu lingkungan untuk ikut mengkampanyekan masalah kebersihan dan

lingkungan hidup. Dua maksimalkan fungsi media sosial sebagai media edukasi dan publikasi terkait Langkah-langkah apa saja yang penting dilakukan terkait masalah sampah dan lingkungan melihat sejauh ini penggunaan sosial media di Bima sangat tinggi sehingga hal ini bisa sangat berdampak. Tiga sering-sering membuat satu kegiatan yang melibatkan masyarakat umum terkait isu lingkungan seperti mungkin jalan sehat dan olahraga bersama pada pusat keramaian yang kemudian dibarengi dengan kegiatan- kegiatan bersih lingkungan.”(Minggu, 24 November 2024)

Kemudian menurut Isti Ariyani, selaku Kepala Pegadaian Cabang Bima. “Kalau untuk program yang mendukung pengelolaan sampah oleh pihak BUMN pegadaian ada, jadi di beberapa daerah itu ada namanya bank sampah yang dibina oleh pegadaian cuman kalau di Kota Bima ini sendiri belum ada, tetapi kemarin sudah ada upaya dari pemerintah kota kalau tidak salah bank sampah induk yang di Kelola oleh pemerintah itu sendiri dan itu kita sudah mulai kerjasama tetapi karena bank sampah ini bukan pegadaian yang punya itukan pemerintah jadi inikan hanya bentuk dukungan, kita kemarin sudah jadi binaan cuman sejauh ini progresnya seperti apa saya juga belum sempat komunikasikan lagi dengan bank sampah induknya tapi kemarin mereka sudah daftarkan sebagai mitra binaan pegadaian. Program pengelolaan sampah ini tergantung kesadaran masyarakatnya walaupun kami dan pemerintah melakukan kolaborasi untuk pelayanan yang baik kepada masyarakat tapi kalau masyarakatnya kurang sadar akan kebersihan yang ada disekirnya maka program-program tersebut percuma” (Jum’at, 08 November 2024)

Selanjutnya menurut LSM yang bernama Diyan Jmaludin Adam “efektifitas kebijakan penanganan sampah yang diterapkan oleh DLH Kota Bima belum sesuai dengan harapan masyarakat Kota Bima bahkan masih jauh dari harapan

masyarakat Kota Bima. DLH Kota Bima belum memberikan edukasi kepada masyarakat terkait keterlibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan penanganan sampah serta memberikan edukasi atau program tertentu untuk melibatkan masyarakat.”(Rabu, 06 November 2024)

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dari berbagai sumber diatas dapat disimpulkan bahwa belum ada kesesuaian antara pemanfaat dengan organisasi pelaksana karena belum maksimal, Hal tersebut dapat dilihat dari asas-asas yang belum terealisasi, seperti asas manfaat dimana masyarakat Kota Bima belum menerima manfaat akan hidup bersih dan sehat. Selain itu asas kesadaran belum terpenuhi dikarenakan masih minimnya kesadaran masyarakat Kota Bima untuk berperan aktif dalam hal pengelolaan sampah. Kemudian asas nilai ekonomi guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan juga belum dilaksanakan dapat dilihat dari belum optimalnya Bank Sampah Induk dan TPS3R di Kota Bima. Jika organisasi pelaksana program belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program sudah dapat dipenuhi oleh pemanfaat maka pemanfaat tidak mendapatkan output program.

3. Kesesuaian antara organisasi pelaksana dengan program

Program berdasarkan kebijakan yang terdapat di dalam peraturan daerah Kota Bima No.3 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah Kota Bima adalah pengurangan sampah dan penanganan sampah.

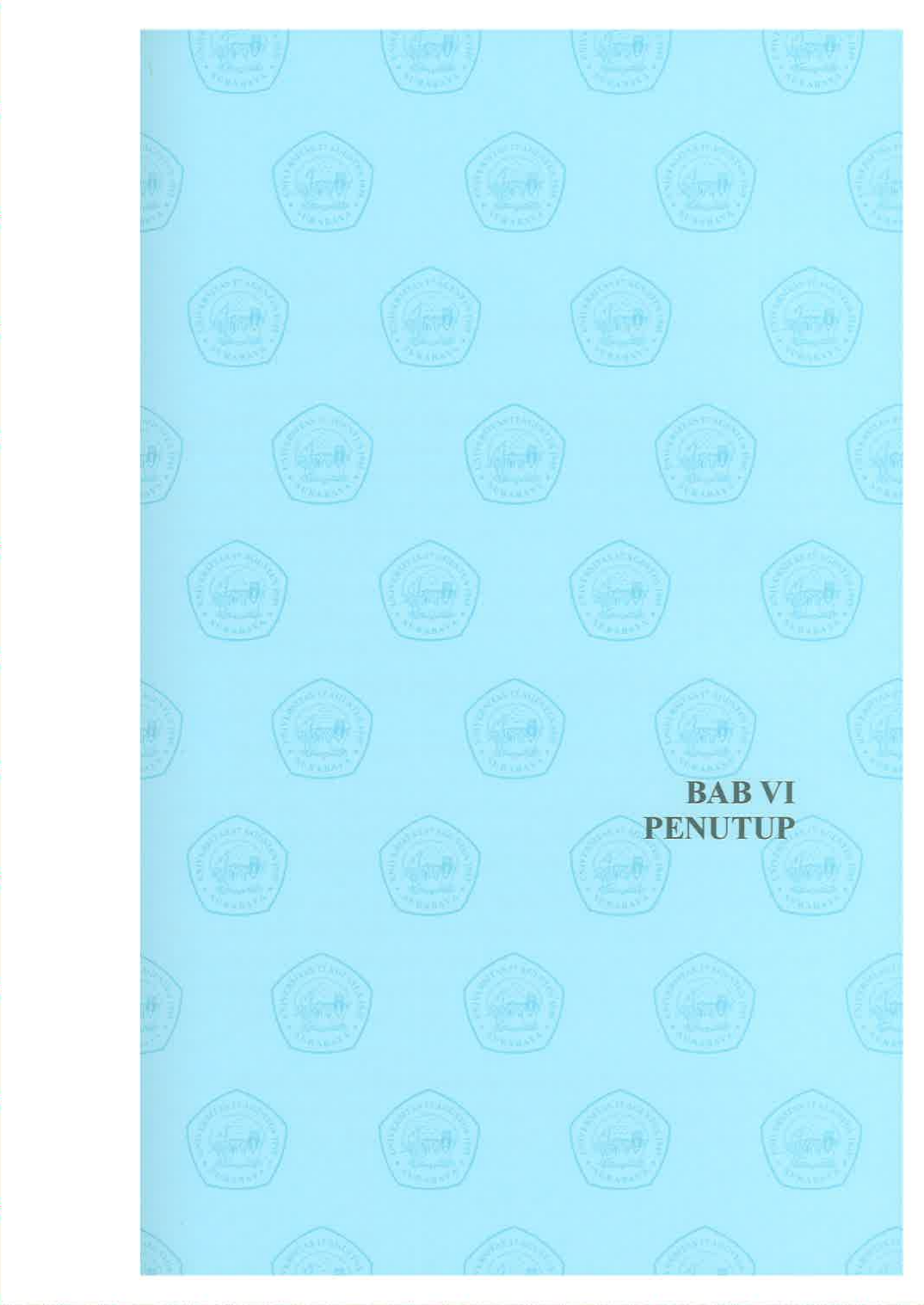
Tugas pengelolaan sampah pada Kota Bima meliputi perencanaan dan Pelaksanaan. Dimana perencanaan pengelolaan sampah di implementasikan melalui program pengurangan sampah dan penanganan sampah. Jika kita lihat dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan belum adanya kesesuaian antara organisasi dengan program dikarenakan program pengurangan sampah masih belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumberdaya. Selain itu penanganan sampah masih ada yang belum dilaksanakan yaitu pemilahan dimana proses 3R (Reduce, Reuse, Recycle) belum dijalankan secara optimal. Kemudian terkait dengan

pengolahan sampah yang berupa proses pemadatan, pengomposan, daur ulang dan pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan belum juga dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut diatas sesuai dengan hasil wawancara dengan Informan kunci yang terlibat dalam pembuatan Perda No.3 Tahun 2018 yaitu:

H.M.Fakharunraji Inspektur Inspektorat Kota Bima Tantangan yang dihadapi yaitu memang tantangan utamanya adalah masyarakat belum siap menerima perda ini atau kebijakan ini masih ada perilaku masyarakat untuk membuang sampah di sembarang tempat belum familiernya masyarakat untuk melakukan pengolahan sampah atau pemilahan sampah termasuk mendaur ulang sampah yang ada di rumah tangga untuk mengatasi ini memang pemerintah khususnya DLH harus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar pengelahuan masyarakat terhadap pengolahan persampahan semakin hari semakin baik. memang harus disadari bahwa partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah saat ini masih sangat rendah ini yang menjadi tantangan buat pemerintah khususnya dlh untuk terus mendorong agar partisipasi masyarakat terus meningkat melalui kerja sama dengan PKK khususnya pokja dasarisma yang mana dari dasarisma inilah di harapkan mampu mendorong ibu ibu PKK yang ada di pengelolaan dasarisma itu bisa berpartisipasi secara maksimal dan meningkatkan kesadaranya untuk melakukan pengolahan sampah. (Senin, 11 November 2024)

Sedangkan menurut Aries Dedy Bayu Kepala Bidang PLSB3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Faktor penghambat yang membuat pengolahan dan pemilahan belum berjalan sesuai amanat perda dikarenakan hal ini masih merupakan hal yang baru di NTB itupun baru kota mataram saja. Pengelolaan belum dijalankan secara optimal sesuai dengan perda yang berlaku dikarenakan kurangnya tempat pengelolaan sampah terpadu di kota bima. Kendala utamanya paada lahan jika tersedia lahan maka kita bisa menyediakan tempat pengelolaan

sampah terpadu yang di bantu PUPR.(Rabu,27 Oktober 2024)

The background of the entire page is a repeating pattern of the University of Sarawak logo. The logo is a circular emblem with a blue border. Inside the circle, there is a depiction of a traditional Sarawak house (longhouse) on stilts, with a river and palm trees in the background. The text 'UNIVERSITI SARAWEK' is written in a circular path around the central image.

BAB VI PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

6.1.1 Kesimpulan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bima

Implementasi kebijakan pemerintah Kota Bima dalam pengelolaan sampah masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena dari perencanaan dan pelaksanaan tentang pengelolaan sampah pada Kota Bima masih ada yang belum dijalankan yaitu pertama dalam hal pengurangan sampah dimana belum dilakukan secara maksimal upaya untuk mengurangi sampah seperti pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah. Selain itu dalam hal penanganan sampah baru dilakukan dengan system pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah, sedangkan untuk system pemilahan dan pengolahan masih belum dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.

6.1.2 Kesimpulan Model Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bima

Model implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bima dilakukan dengan 2 (dua) pola yaitu pola pengurangan dan juga pola pungut, angkut dan buang. Pola Pengurangan sama sekali belum tersentuh, sedangkan pola pungut angkut dan buang sudah mulai menunjukkan peningkatan ke arah yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat pada teori yang disadur sebagai berikut :

Langkah awal yang mutlak harus dilakukan adalah membangun kesadaran dan komitmen dari masyarakat selaku produsen sampah untuk memastikan bahwa tidak ada sampah yang terbuang sembarangan, selanjutnya juga melakukan pemilahan mulai dari tingkat rumah tangga. Pada DLH Kota Bima, bahkan upaya awal inipun belum dilakukan secara menyeluruh dan intensif.

Selanjutnya, Butuh komitmen yang kuat dari DLH selaku operator pelayanan persampahan di Kota Bima untuk menyiapkan sarana yang menunjang upaya pengurangan sampah dimaksud, yang diawali dari

penyediaan sarpras di TPS/TPST, BSU dan BSI serta armada pengangkutan yang telah berbasis 3 R. Kondisi eksisting bahwa sampah yang ada masih belum dipilah sama sekali, yang artinya bahwa seluruh sampah baik organik maupun anorganik diangkut dengan media yang sama pada waktu yang bersamaan juga.

Ketika dikorelasikan dengan model kesesuaian yang disadur dari teori David C. Korten bahwa pada tingkat pemanfaat dalam hal ini adalah masyarakat Kota Bima, kebutuhan dan tuntutan adalah bagaimana lingkungannya bersih tanpa sampah tanpa mempedulikan apakah dilakukan dengan pola pungut, angkut buang ataupun dengan pola pengurangan. Menurut hasil investigasi, mereka tidak teralu perduli dengan ini yang terpenting lingkungannya bersih dan dapat mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Dinas lingkungan Hidup selaku operator penanganan sampah di tingkat Kota Bima berperan besar dan harus tetap berkomitmen dalam mewujudkan pengurangan sampah setidaknya 30% dari jumlah timbulan sampah yang ada.

6.2 SARAN

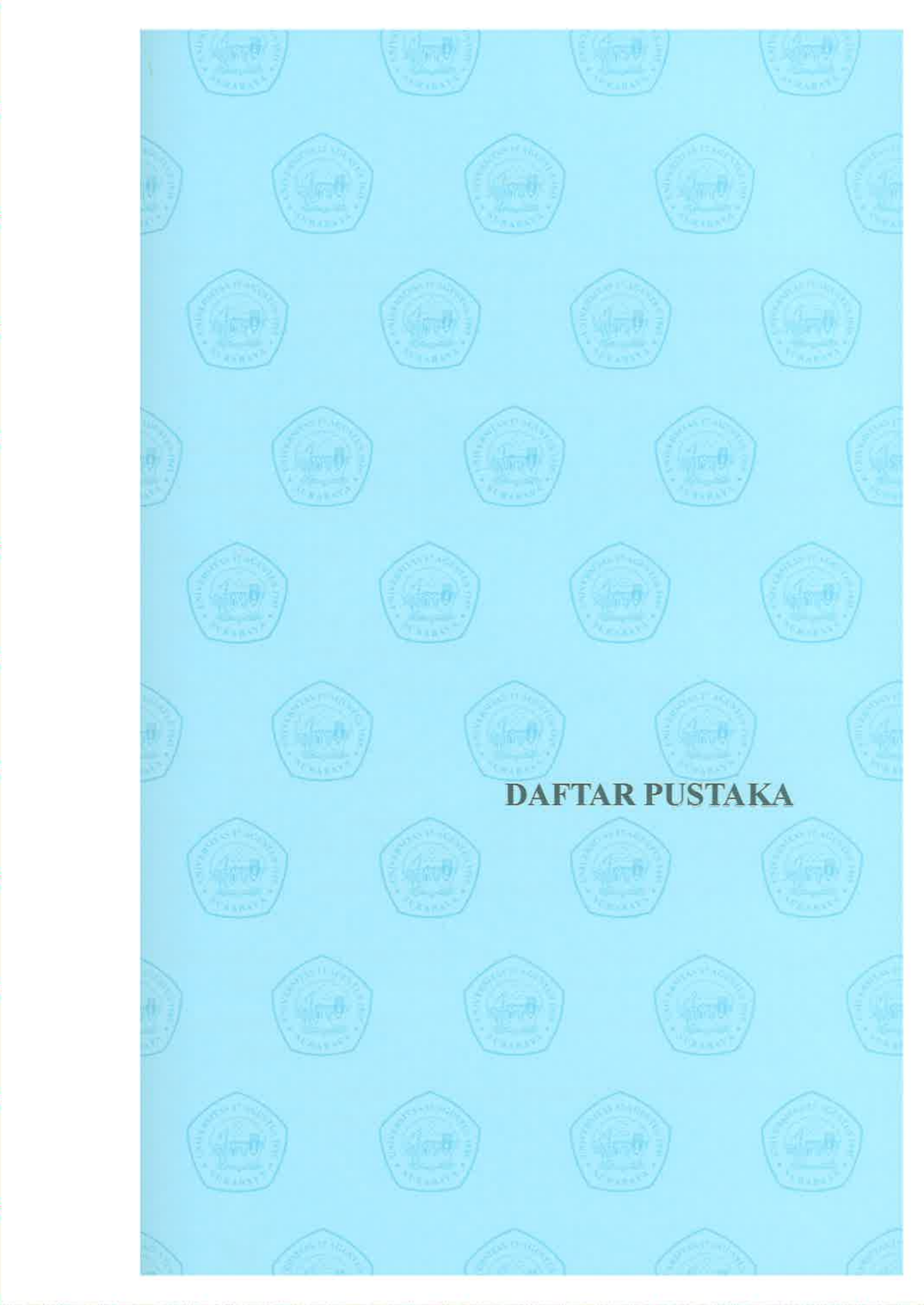
Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah pada Kota Bima studi kasus Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam pengelolaan sampah butuh komitmen bersama semua pihak, baik masyarakat, pemerintah dan pentahelix. Idealnya penanganan sampah harus berbasis pengurangan yang dimulai dari tingkat rumah tangga (sumber sampah), TPS/TPS3R, BSU, BSI sampai pada TPA. Pengurangan sampah harus dilakukan minimal 30 % dari jumlah timbulan sampah yang ada.
2. Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bima tentang pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima sebaiknya memaksimalkan Kinerjanya seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara pengelolaan sampah dari sumbernya,
3. Sehingga Masyarakat paham bagaimana cara memilah sampah organik dan non organik. Sampah organik bisa mereka jadikan pupuk kompos

atau membuat biopori di rumah mereka, Sedangkan sampah non organik dapat mereka daur ulang Kembali sehingga bernilai ekonomis.

4. Model Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bima akan tercipta apabila Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima mengaktifkan kembali Bank Sampah Induk, TPS3R, Bank Sampah Kelurahan serta Bank Sampah Unit yang ada di sekolah.
5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Harus lebih aktif dalam melakukan kerja sama dengan beberapa pihak seperti BUMN, LSM, Akademisi, Masyarakat dan Pihak swasta.
6. Mengenai PERDA No.3 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah pada Kota Bima dibutuhkan evaluasi apakah Perda ini masih cukup relevan atau tidak dengan kondisi Kota Bima saat ini . Jika dinilai perda ini sudah tidak relevan lagi maka dibutuhkan revisi terhadap perda ini.
7. Pemerintah Kota Bima harus membuat penghargaan dan hukuman terhadap penerapan PERDA ini bagi yang dapat menjaga kebersihan lingkungannya akan mendapatkan penghargaan sebaliknya bagi yang melanggar atau membuang sampah tidak pada tempatnya atau merusak lingkungan maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman.

Halaman Ini Sengaja Dikosongi



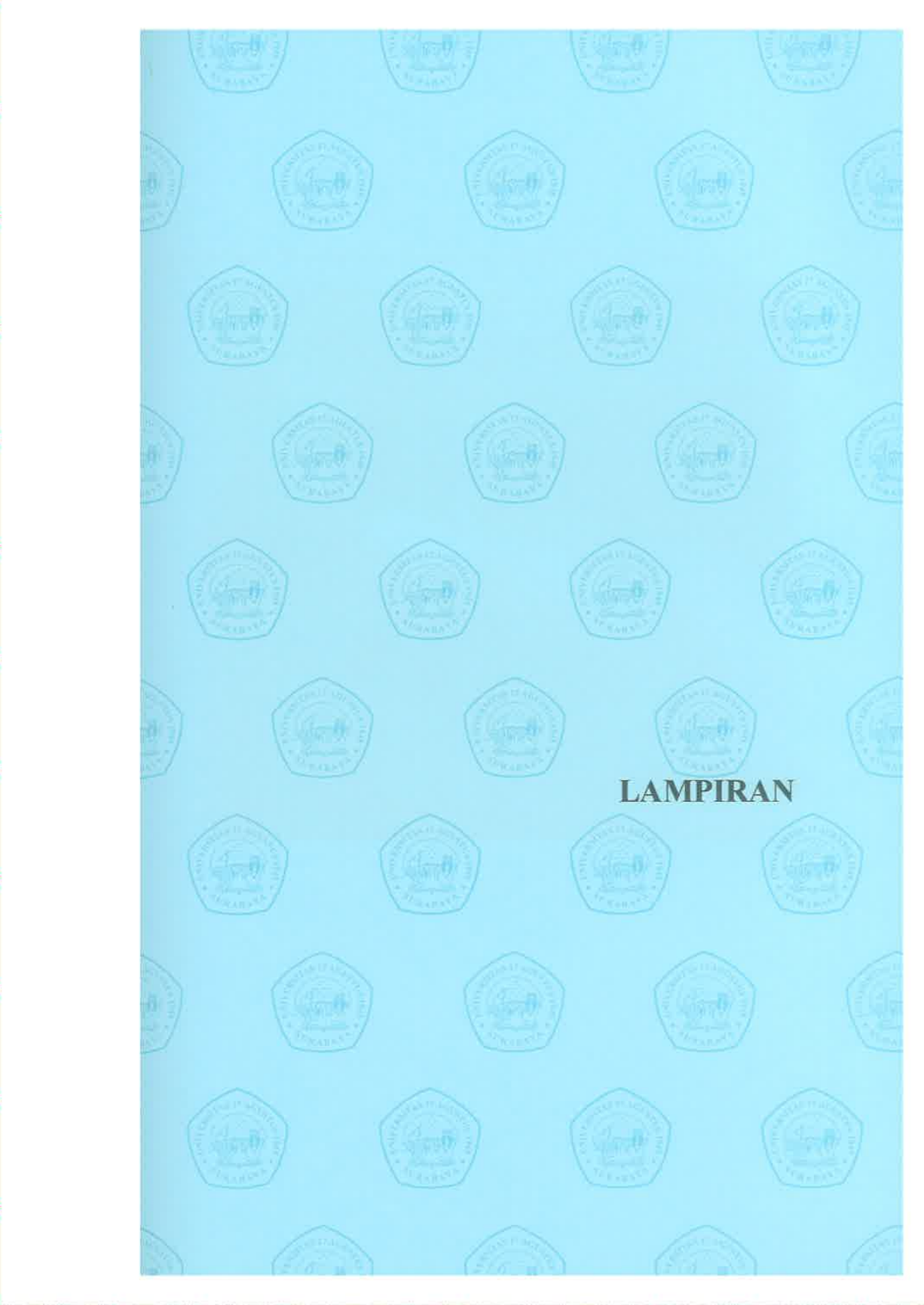
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Andani, A. T. V., Setyowati, E., & Amin, F. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(3), 328-336.
- ANETA, A. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).
- Dunn, Analisis dan Implementasi 2023
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2021). *The New Public Service: Serving, Not Steering* (4th ed.). Routledge
- Dunn, W. N. (2020). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. 6th Edition. New York: Routledge.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2019). *The New Public Service: Serving, No Steering*. Routledge.
- Dunleavy, P., & Margetts, H. (2020). *Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and E-Government*. Oxford University Press
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge
- Frederickson, H. G. (2020). *Public Administration with an Attitude: A Critical History of Public Administration*. Routledge.
- Frederickson, H. G. (2020). *New Public Administration*. University of Alabama Press.
- Heeks, R. (2020). *Digital Government: Managing Public Sector IT Projects*. Sage Publications.

- Harbani Pasalong. (2014), *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2020). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford University Press.
- Hermanto Suaib, A Sakti R, S Rakia, Arie Purnomo Hayat M, Chorella, (2022) <https://dlh.bimakota.go.id/>
- Korten, D. C. (2014). *Getting to the 21st Century: Voluntary Action and the Global Agenda*. Kumarian Press.
- Korten, D. C. (2014). *Getting to the 21st Century: Voluntary Action and the Global Agenda*
- Kajdi, Yulianto.2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo
- Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2024
- Larasati, D., Kismartini, K., & Suwitri, S. (2024). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek (Kasus Bus Trans Anggrek di Kota Tangerang Selatan). *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(3), 689-709.
- Mthethwa, R. M. (2018). Critical Dimensions for Policy Implementation. *African Journal of Public Affairs*, Vol.5. no.2. ISSN: 0136-1142. Diakses Pada Tanggal 10 Juli 2023 Pukul 21.30 WIB
- Margono. (2014). *Metodelogi Penelitian*. Rieneka Cipta. Jakarta
- Moleong , Lexy J. (2017). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Osborne, S. P. (2019). *Public Governance and Public Management: Theories and Concepts*. Routledge.

- Osborne, S. P. (2021). *Public Management Reform: A Comparative Analysis - New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State*. Routledge.
- Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 8 Pengantar Kebijakan Publik, Makassar: Humanities Genius,
- Penulis Korten, D. C. (2018). The management of social transformation. In *Democracy, bureaucracy, and the study of administration* (pp. 476-497). Routledge.
- Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 8 Purwo Santoso :Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik
- Rian. N.D, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017.
- Sugioyono, 2018. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung
- Turner, M. (2020). *Decentralization, Democracy, and Development in Southeast, Asia*. Palgrave Macmillan.
- Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit AIPI Bandung, 2014
- Penulis Korten, D. C. (2018). The management of social transformation. In *Democracy, bureaucracy, and the study of administration* (pp. 476-497). Routledge.
- William H. Dunn, Penterjemah: Samudra Wibawa, dkk, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018
- Yanti Fatmariyanti, Anis Fauzi : *Kebijakan Publik Versi William Budi, Winarno*. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

The background of the entire page is a repeating pattern of the University of Surabaya (UNESA) logo. The logo is a blue pentagon containing a stylized building and the text "UNIVERSITAS SURABAYA" and "ESTABLISSMENT 1962".

LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran 1 Wawancara dengan Kepala DLH Kota Bima



Lampiran 2 Wawancara dengan Sekertaris DLH Kota Bima



Lampiran 3 Wawancara dengan Kabid PSLB3 DLH Kota Bima



Lampiran 4 Wawancara dengan KUPT TPA DLH Kota Bima



Lampiran 5 Wawancara dengan Direktur BSI



Lampiran 6 Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kota Bima



Lampiran 7 Wawancara dengan pihak wartawan



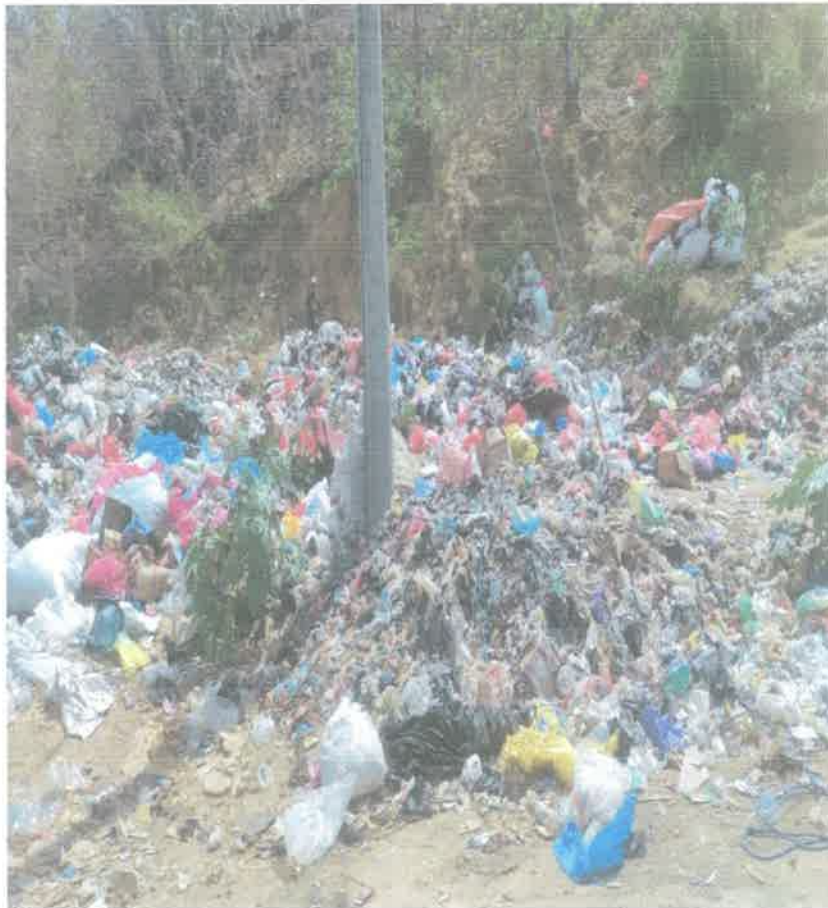
Lampiran 8 Wawancara dengan Pihak Pegadaian



Lampiran 9 Wawancara dengan Pihak LSM



Lampiran 10 Kondisi Sampah Di Kota Bima







Min, 08, Des, 2024
06:32:12AM









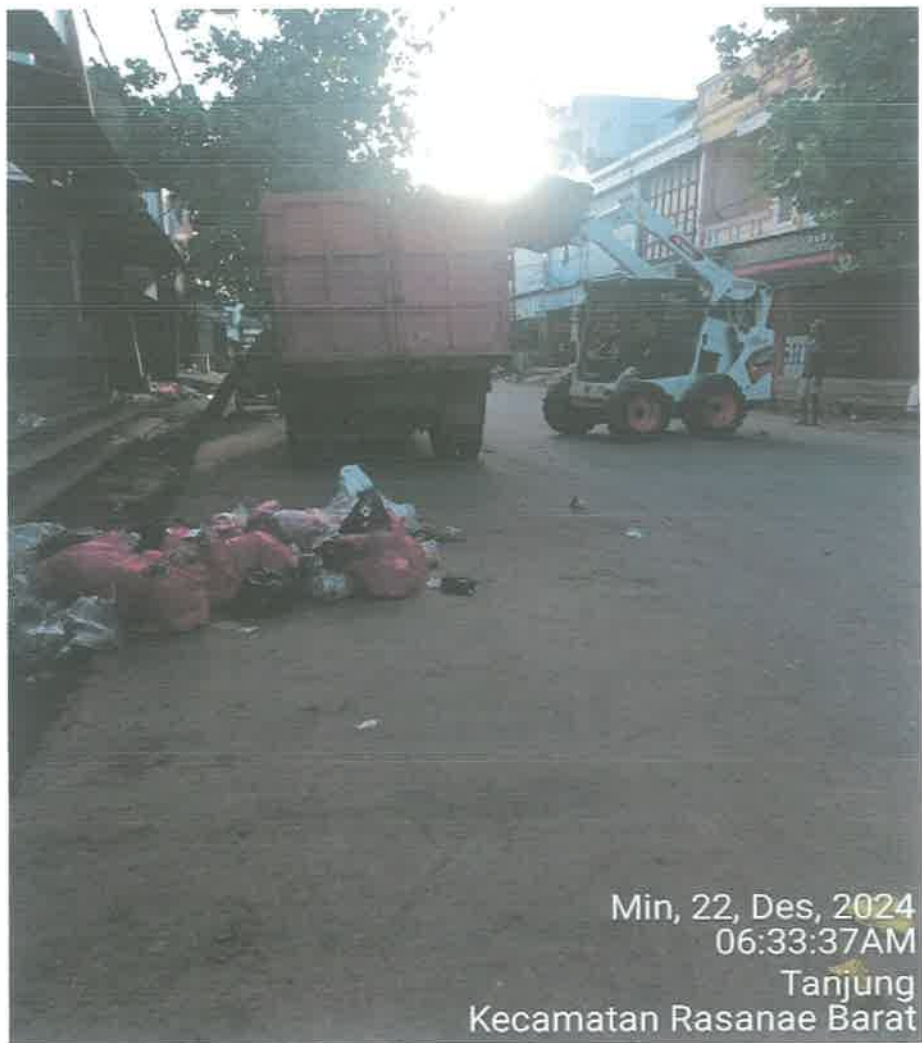


























Rab, 25, Des, 2024
01:17:55PM
Manggemaci





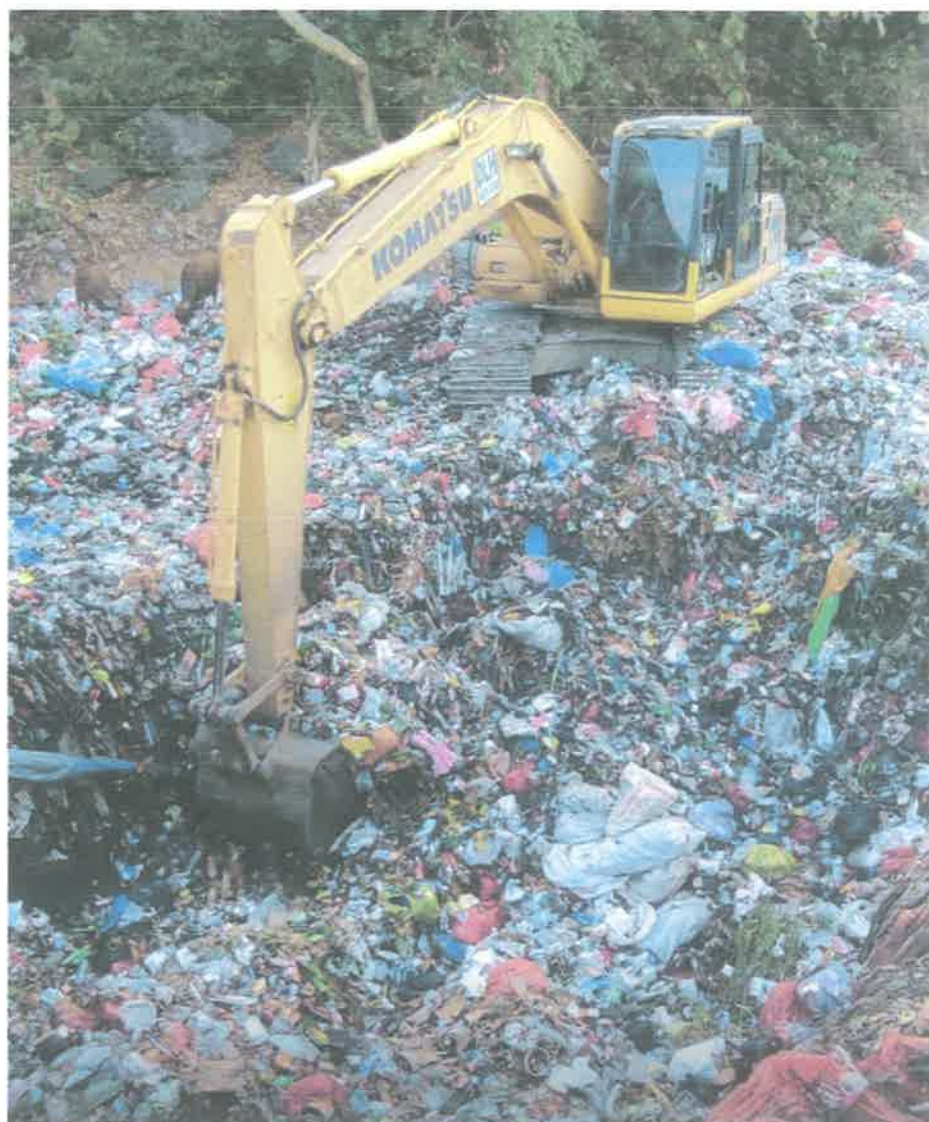
Lampiran 11 Kondisi Sampah Di Tpa

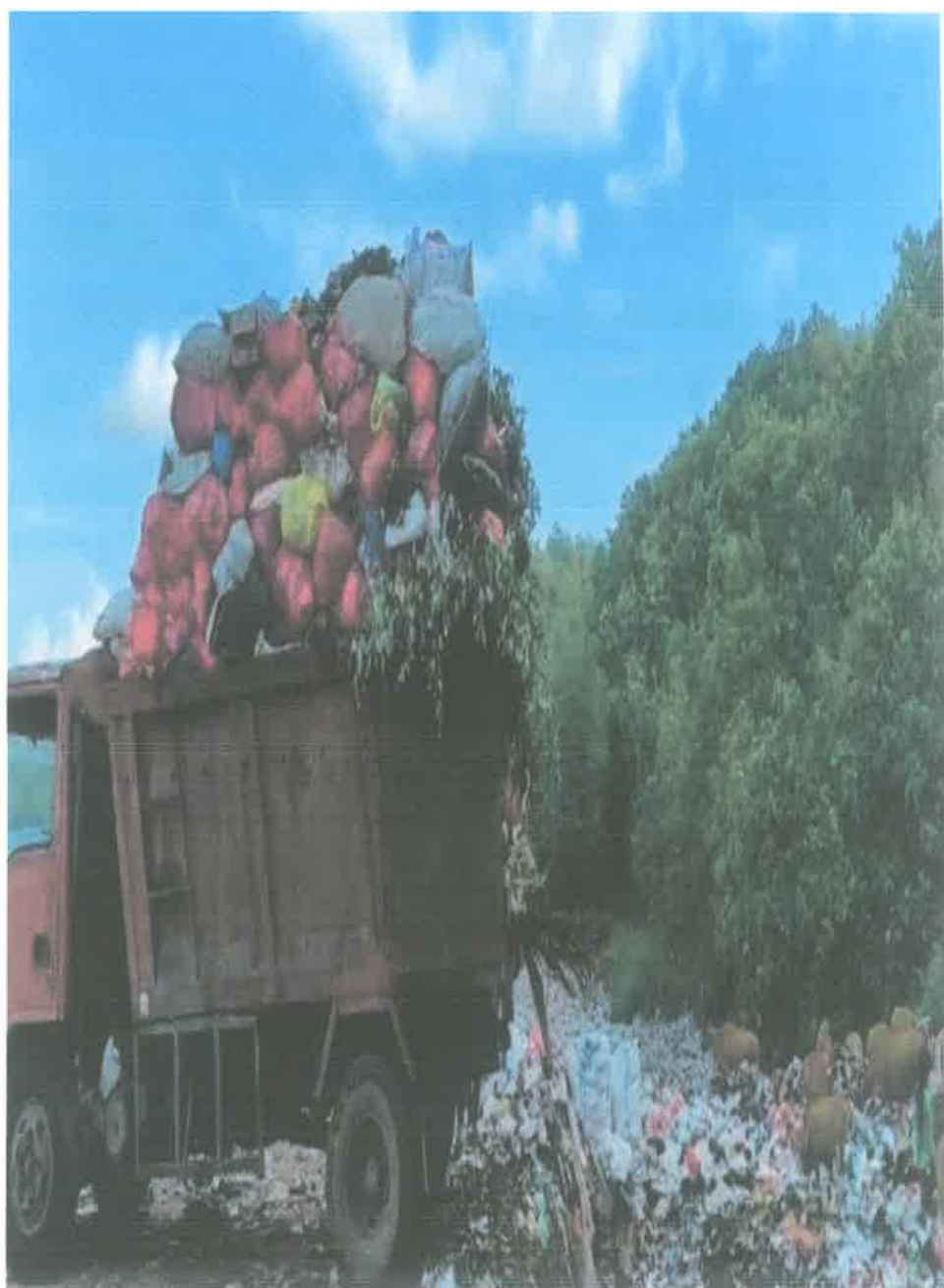














Kabar Bima

Bima Kita

Hiburan

Hukum & Kr

Kabar Bima

Sering Studi Banding Soal Sampah, Apa Dampaknya Untuk Kota Bima

Kahaba.net  2 Min Baca
19 Februari 2019



Storage Almost Full

You can manage your storage in Settings.

Done Settings

Tricks For More Cloud Storage Below

Running low on phone storage? Expand Your Cloud Storage Now

sponsored by: Cloud Storage | Ads [LEARN M...](#)

DLH Kota Bima Masih Kekurangan 75-100 Orang Tenaga Lapangan untuk Atasi Masalah Sampah



NTDSatu

16 Februari 2024



145



1

minute read



PJ WALIKOTA BIMA DINILAI BELUM MENJAWAB TANTANGAN KEHIDUPAN RAKYAT TERKAIT PENGELOLAAN SAMPAH DI LOKASI TPA

By Londa Post 

Rabu, 29 November 2023, November 29, 2023



Bank Sampah Induk Kota Bima Terkendala Dana Operasional

Oleh: Sofian Asy'ari Editor: Nasrudin 05 Aug 2024 - 19:45 📍 Mataram



Volume Sampah di kota Bima Meningkat, Tempat Pembuangan Sampah Ilegal Bermunculan

 Nurdin  08.02.00 



Volume Sampah Kota Bima Meningkat 30 Persen di Momen Lebaran

Rafin - detikBali

Jumat, 12 Apr 2024 23:30 WIB



Lampiran 13 Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR : 200

TAHUN 2018

SERI :

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABIMA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di wilayah Kota Bima diperlukan upaya-upaya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan terpadu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pertindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor 130, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 130);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTABIMA
dan
WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
11. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.

12. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
13. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat di laksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
14. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
15. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
16. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
17. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
18. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
19. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
20. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
21. Pelaku usaha dan/atau kegiatan ialah orang atau badan yang dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berpotensi dan/atau menghasilkan sampah.
22. Pengelola sampah adalah orang dan/atau badan yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu.
23. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
25. Pembuangan sampah tidak pada tempatnya adalah pembuangan sampah yang dilakukan di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat penampungan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur-ulang sampah.
27. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis sampah.
28. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS.
29. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah, dari tempat sampah rumah tangga dan/atau TPS ke TPA.
30. Pengolahan atau Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
31. Izin kegiatan usaha pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan usaha pengelolaan sampah.

32. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan asas tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan penghasil sampah atau masyarakat, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan sampah adalah meningkatnya upaya pengelolaan sampah dan kesadaran dan/atau kepedulian masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan daerah ini adalah pengelolaan sampah rumah tangga dan pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga.

BAB II PENGLOLAAN SAMPAH Bagian Kesatu Pengelolaan Sampah Paragraf 1 Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah merencanakan pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan pada PD yang melaksanakan urusan persampahan.
- (2) Target pengurangan sampah yang dibuang ke TPA sebagaimana dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan pada ayat (1) melalui :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah yang ramah lingkungan mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA; dan
 - b. pengembangan partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah yang ramah lingkungan meliputi pembiayaan dan teknologinya.

Paragraf 2 Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :

- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
- b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.

Pasal 8

Penanganan sampah dilakukan dengan cara :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 9

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8huruf a dilakukan dengan cara mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 10

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 11

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8huruf c dilaksanakan dengan cara :
 - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk RT/RW/Kelurahan;
 - b. sampah rumah tangga dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab PD yang melaksanakan urusan persampahan;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab PD yang melaksanakan urusan persampahan.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.
- (4) Dalam hal lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c belum dibentuk, pengangkutan sampah dilakukan oleh PD yang melaksanakan urusan persampahan.

Pasal 12

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.

- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang;
 - d. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 13

Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan dengan cara mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Kedua Lembaga Pengeloladan Jenis Usaha

Pasal 15

Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 16

Jenis lembaga pengelola persampahan dapat berupa :

- a. dasa wisma tingkat RT/RW;
- b. KSM tingkat kelurahan;
- c. Bank sampah;
- d. UPTD; dan
- e. lembaga lainnya yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 di RT, RW, kelurahan, kecamatan, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Fasilitasi yang dimaksud pada ayat satu dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pendidikan pelatihan, bimbingan teknis dan dukungan pembiayaan lembaga pengelola serta dukungan sarana dan prasarana.

Pasal 18

Jenis usaha pengelolaan sampah terdiri dari :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;

Lampiran 14 Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan Wawancara Terhadap Informan Kunci Yang Ada Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima

1. Syarief Rustaman, S.Sos.M Ap (Kepala Dinas DLH)
2. Drs Tamsil (Sekertaris Dinas DLH)
3. Aris Dedy Bayu, SE (Kabid PSLB3 DLH)

Model Pertanyaan

1. Apa yang menjadi program pengelolaan sampah di kota Bima?
2. Bagaimana Implementasi Program tersebut?
3. Bagaimana Pemanfaatan program tersebut kepada masyarakat?
4. Bagaimana Pengelolaan sampah oleh DLH?
5. Bagaimana Pemanfaatan pengelolaan sampah di kota Bima?
6. Berapa SDM yang ada di DLH ?
7. Organisasi yang menjadi pelaksana program apakah ada pihak ke tiga atau tidak? seperti kelurahan atau Kerjasama dengan pihak lain?
8. Bagaimana struktur organisasi dan pembagian tugas di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dalam mendukung implementasi kebijakan ini?
9. Apakah ada program khusus atau strategi tambahan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk lebih mendorong keberhasilan Perda ini di lapangan?

Pertanyaan Wawancara Terhadap Informan Kunci Yang Terlibat Dalam Pembuatan Perda No.3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah

1. Drs.H.Fakharun.Raji ,ME (Kepala Dinas Inspektorat Kota Bima)

Model Pertanyaan

1. Apa latar belakang dikeluarkannya kebijakan pengelolaan sampah Nomor 3 Tahun 2018 di Kota Bima?
2. Bagaimana proses pembuatan kebijakan tersebut? Siapa saja pihak yang dilibatkan?
3. Apa saja tujuan utama dari kebijakan ini, dan bagaimana penerapannya sejak diresmikan?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan ini? Bagaimana tantangan tersebut diatasi?
5. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan ini?
6. Apakah ada upaya khusus yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam kebijakan ini?
7. Apa manfaat yang diharapkan dari penerapan kebijakan ini, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi?
8. Bagaimana kebijakan ini mendorong pengelolaan sampah yang bernilai ekonomi, seperti daur ulang atau pemanfaatan sampah menjadi produk baru?
9. Apakah kebijakan ini memengaruhi pola konsumsi atau gaya hidup masyarakat dalam mengelola sampah?
10. Apa kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan sampah sesuai kebijakan ini, dan bagaimana solusi yang dilakukan?
11. Bagaimana peran kepemimpinan dalam lingkup pemerintah daerah dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini?
12. Apa strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah?
13. Bagaimana cara mengukur keberhasilan implementasi kebijakan ini?
14. Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi dalam menerapkan Perda ini di tingkat operasional?
15. Apakah ada mekanisme evaluasi atau indikator keberhasilan yang digunakan untuk menilai efektivitas Perda ini?

16. Bagaimana Perda ini mengatur keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan apakah masyarakat sudah cukup terlibat dalam implementasinya?
17. Apakah pemerintah daerah memberikan dukungan anggaran dan infrastruktur yang cukup untuk mendukung pelaksanaan Perda ini?
18. Bagaimana koordinasi antara berbagai pihak, seperti dinas terkait, BUMN, LSM, dan masyarakat dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bima?
19. Apa harapan Anda ke depan terkait pelaksanaan Perda ini, dan apakah ada rencana revisi atau pengembangan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini?

Pertanyaan Wawancara Terhadap Informan Pendukung Ketua TPA DLH Kota Bima

1. Iskandar Majrond,ST

Model Pertanyaan

1. Bagaimana menurut Anda, relevansi kebijakan pengelolaan persampahan yang diterapkan
2. oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dengan kebutuhan masyarakat saat ini?
3. Apakah kebijakan ini sudah cukup menjawab permasalahan persampahan di Kota Bima?
4. Sejauh mana kebijakan ini disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Kota Bima?
5. Apakah ada langkah-langkah khusus dalam kebijakan ini yang dirancang untuk menjawab
6. kebutuhan atau karakteristik unik dari masyarakat di Kota Bima?
4. Apakah kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten oleh Dinas Lingkungan Hidup? Jika belum, apa saja kendala yang dihadapi?
5. Apakah program pengelolaan persampahan ini memiliki dampak nyata dalam mengurangi masalah sampah di Kota Bima?
7. 7. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah ini?
8. Apakah ada program edukasi atau kampanye yang dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat? Bagaimana efektivitasnya?
9. Apakah Dinas Lingkungan Hidup memiliki sumber daya (tenaga kerja, dana, dan infrastruktur) yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan ini?
10. Apakah ada kerjasama dengan pihak lain seperti sektor swasta atau LSM untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini?
11. Apakah terdapat mekanisme evaluasi atau pemantauan terhadap kebijakan ini untuk memastikan keberhasilan pelaksanaannya?
12. Bagaimana hasil dari pemantauan atau evaluasi tersebut? Apakah ada upaya untuk perbaikan kebijakan atau strategi pelaksanaan?

13. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Bima? Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup mengatasi hambatan-hambatan ini?
14. Sejauh mana kebijakan ini berhasil menciptakan perubahan positif dalam pengelolaan sampah di Kota Bima?
15. Apakah ada perubahan signifikan dalam perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah sejak kebijakan ini diterapkan?

Pertanyaan Wawancara Terhadap Informan Pendukung Direktur Bank Sampah Induk Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima

1. Herliastuti,ST

Model Pertanyaan

1. Apa latar belakang pembentukan Bank Sampah Induk di Kota Bima, dan bagaimana prosesnya?
2. Apa Visi dan Misi Bank Sampah Induk di Kota Bima, dan bagaimana visi ini sesuai dengan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bima
3. Program apa saja yang saat ini dijalankan oleh Bank Sampah dalam pengelolaan sampah?
4. Bagaimana pelaksanaan program-program tersebut, dan sejauh mana partisipasi masyarakat dalam program ini?
5. Apa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah, dan bagaimana cara mengatasinya?
6. Bagaimana Bank Sampah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan program ini?
7. Bagaimana Bank Sampah memanfaatkan sampah yang dikelola, seperti produk daur ulang atau bahan mentah lainnya?
8. Apakah ada nilai ekonomi yang diperoleh dari pemanfaatan sampah? Jika ya, bagaimana dampaknya bagi masyarakat?
9. Apakah Bank Sampah menyediakan pelatihan atau edukasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan sampah?
10. Apa kendala yang dihadapi dalam proses pemanfaatan sampah, dan bagaimana solusinya?
11. Bagaimana Bank Sampah mengevaluasi keberhasilan pemanfaatan sampah dan dampaknya terhadap lingkungan dan ekonomi lokal?
12. Bagaimana struktur organisasi Bank Sampah dalam mendukung pelaksanaan program pengelolaan sampah?
13. Apa saja peran dan tanggung jawab anggota organisasi dalam menjalankan program-program ini?
14. Apa Kendala yang dihadapi oleh BSI saat ini?

Pertanyaan Wawancara Terhadap Informan Pendukung Wartawan Garda Asakota

1. Suhardin

Model Pertanyaan

1. Bagaimana media memandang implementasi kebijakan penanganan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima? Apakah media menilai kebijakan ini sudah efektif?
2. Apa saja isu atau masalah utama yang sering diliput oleh media terkait pengelolaan sampah di Kota Bima?
3. Bagaimana respons masyarakat berdasarkan laporan-laporan yang telah Anda liput terkait kebijakan penanganan sampah ini?
4. Menurut Anda, apakah ada perhatian yang cukup dari pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Bima? Apa saja tantangan utama yang dihadapi?
5. Apakah Anda pernah menemukan bukti ketidaksesuaian antara kebijakan yang diterapkan dan kondisi di lapangan? Jika ya, seperti apa bentuknya?
6. Seberapa aktif Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima melibatkan media dalam sosialisasi atau publikasi kebijakan pengelolaan sampah kepada masyarakat?
7. Bagaimana media meliput peran LSM atau kelompok masyarakat dalam mendukung atau mengkritik kebijakan penanganan sampah ini?
8. Menurut Anda, apakah ada aspek yang belum terungkap atau kurang terekspos di media terkait kebijakan penanganan sampah di Kota Bima?
9. Apakah ada inovasi atau strategi dari pemerintah daerah yang pernah Anda liput dan menarik perhatian publik dalam penanganan sampah di Kota Bima?
10. Dari hasil pengamatan Anda, bagaimana dampak kebijakan ini terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kota Bima?

Pertanyaan Wawancara Terhadap Informan Pendukung LSM

1. Dian Jamaludin Adam

Model Pertanyaan

1. Bagaimana Anda menilai efektivitas kebijakan penanganan sampah yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima? Apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penanganan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup?
3. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan penanganan sampah di Kota Bima? Apakah Dinas Lingkungan Hidup memberikan edukasi atau program tertentu untuk melibatkan masyarakat?
4. Apa peran LSM dalam mendukung atau mengawasi implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Bima?
5. Apakah LSM pernah melakukan kajian atau penelitian terkait dampak kebijakan ini di lapangan? Jika ya, apa saja temuan utamanya?
6. Bagaimana kolaborasi antara LSM dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dalam mengatasi isu penanganan sampah?
7. Bagaimana kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bima memperhatikan aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat?
8. Adakah langkah yang perlu diperbaiki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dalam implementasi kebijakan ini berdasarkan hasil evaluasi LSM?
9. Apakah alokasi anggaran dari pemerintah untuk penanganan sampah sudah memadai, menurut pengamatan LSM?
10. Apa saja inovasi yang diusulkan atau diharapkan oleh LSM untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Bima?

Pertanyaan Wawancara Terhadap Informan Pendukung Tokoh Masyarakat

1. Ahyar, S.sos, M.Ap

Model Pertanyaan

1. Apakah Anda merasa kebijakan penanganan sampah yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima sudah efektif? Apa alasannya?
2. Bagaimana pandangan Anda tentang kondisi kebersihan lingkungan di Kota Bima sejak kebijakan penanganan sampah ini diberlakukan?
3. Seberapa sering Anda melihat atau mengalami layanan pengangkutan sampah di lingkungan Anda? Apakah pelayanannya memadai?
4. Apakah Anda atau masyarakat sekitar mendapatkan sosialisasi atau edukasi dari Dinas Lingkungan Hidup terkait cara pengelolaan sampah?
5. Menurut Anda, apa saja kendala atau hambatan yang dialami masyarakat dalam mengikuti kebijakan penanganan sampah di Kota Bima?
6. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan ini? Apakah ada inisiatif lokal atau komunitas untuk menjaga kebersihan lingkungan?
7. Apa harapan Anda terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dalam meningkatkan pengelolaan sampah?
8. Apakah fasilitas atau sarana kebersihan, seperti tempat pembuangan sampah, sudah mencukupi di sekitar lingkungan Anda?
9. Bagaimana dampak kebijakan ini terhadap kualitas lingkungan hidup di sekitar Anda? Apakah ada perubahan yang signifikan?
10. Menurut Anda, bagaimana cara terbaik agar masyarakat lebih terlibat dan peduli terhadap penanganan sampah di Kota Bima?

Pertanyaan Wawancara Terhadap Informan Pendukung BUMN

1. Isti Ariyani, SE (Kepala Pegadaian Cabang Raba)

Model Pertanyaan

1. Apa bentuk dukungan yang diberikan BUMN dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bima?
2. Apakah BUMN memiliki program atau kegiatan spesifik yang mendukung pengelolaan sampah? Jika ya, apa saja program tersebut?
3. Bagaimana proses koordinasi antara BUMN dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dalam menjalankan program ini?
4. Apa tantangan yang dihadapi oleh BUMN dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah, dan bagaimana cara mengatasinya?
5. Apakah BUMN mendukung masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan sampah (misalnya, melalui pelatihan atau pemberian alat)?
6. Apakah ada divisi atau tim khusus yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah ini?
7. Bagaimana BUMN berkolaborasi dengan pihak lain, seperti pemerintah daerah, LSM, atau komunitas masyarakat, dalam pelaksanaan program pengolahan sampah ?

Lampiran 15 Hasil Wawancara dengan Informan Penelitian

Hasil wawancara implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bima

Waktu wawancara : Selasa, 22 Oktober 2024

Narasumber : Syarif Rustaman, S.Sos., M.Ap

Hasil Wawancara :

(Kepala DLH Kota Bima) Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Syarif Rustaman S.Sos. M.Ap yaitu Program pengelolaan sampah di kota Bima meliputi Pelayanan dan Pengurangan yang dimana Pelayanan memastikan Produksi sampah yang terangkut dan terlayani sedangkan pengurangannya pada saat ini melakukan pendekatan mengaktifkan kembali Bank Sampah Induk dan TPS3R, Bank Sampah Kelurahan serta Bank sampah unit yang ada di Sekolah. Bank sampah tersebut sudah berjalan, DLH sedang melakukan upaya dalam mengoptimalkan serta melakukan pendekatan terhadap Bank Sampah Induk maupun TPS3R, sehingga diharapkan pengurangan yang ingin dilakukan tersebut sesuai dengan target nasional dengan harapan bisa terpenuhi namun pada saat ini yang baru maksimal yaitu penanganan pelayanan dari 41 Kelurahan yang baru terlayani adalah 36 Kelurahan dengan sistem Kumpul, angkut dan buang. Implementasi Pengelolaan Sampah yang dilakukan saat ini berdasarkan amanat peraturan daerah dilakukan secara partisipatif dan terkordinir oleh DLH sesuai dengan tugas fungsinya tetapi diharapkan juga adanya Kerjasama dengan kelurahan maupun elemen masyarakat bisa ikut terlibat sehingga penanganan kebersihan tersebut bukan hanya tugas DLH tetapi ada partisipasi masyarakat dalam menjaga, mengelola dan membuang sampah pada tempatnya. Selain itu pernyataan yang sama pula disampaikan oleh Syarif Rustaman. S.Sos.M.Ap Sebagai kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima yaitu “Namun dalam kenyataannya tong sampah yang diberikan tersebut mudah hilang sehingga DLH menghimbau agar masyarakat bersama-sama ikut menjaga karena partisipasi masyarakat juga penting. Sedangkan untuk pelayanan berkelanjutan dilakukan oleh BSI dengan mengerakan TPS3R dan Bank Sampah Kelurahan beserta Bank Sampah Unit, Peranan BSI Masih perlu di optimalkan, Aspek pembiyaan nya masih perlu diperhatikan melalui APBD.

Waktu wawancara : Senin, 04 November 2024

Narasumber : Drs. Tamsil (Sekertaris DLH Kota Bima)

Hasil Wawancara :

Sesuai yang dimuat dalam perda bahwa program yang dijalankan oleh DLH yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah, jadi kedua program tersebut yang sudah jalan di kota bima yaitu baru penanganan sampah berupa Kumpul-Angkut- Buang Ke TPA dan di TPA dilakukan pemrosesan akhir sementara di program pengurangan ini masih mandek dijalan atau masih tidak berjalan dikarenakan butuh sumber daya ,suatu lembaga, personil, sumberdaya yang memadai seperti adanya TPS3R maupun Bank sampah-Bank sampah Unit yang tersebar tetapi yang sekarang bank samapah tersebut sekitar 8 atau 9 bank sampah yang mati suri atau tidak berjalan sehingga untuk pengurangan sampah itu belum berjalan di kota bima dan belum maksimal dilakukan proses pengurangan. selain itu BSI yang sekarang menjadi bank sampah induk di kita itu belum beroperasi sampai sekarang dikarenakan keterbatasan anggaran, personilnya pengelolanya, struktur organisasinya kenapa begitu karna bsi ini diluar struktur organisasi pemerintah jadi dia sifatnya mandiri sehingga dia paling tidak nanti ada interfensi dari pemerintah ini untuk menghidupkan BSI ini berupa bantuan – bantuan berupa anggarannya , personilnya mungkin nanti akan di coba di tahun berikut. implementasi program pengolaan sampah di kota bima masih menggunakan metode pemungutan, pengangkutan, pengump ulan dan pemrosesan akhir di TPA atau pembuangan ke TPA. untuk pemanfaatan program kepada masyarakat belum maksimal di lakukan oleh dlh diakibatkan anggaran masih terbatas, dikatakan memberi manfaat untuk masyarakat itu apabila bisa memberikan nilai ekonomis jadi sampah itu dilakukan suatu prosesannya itu dalam bentuk kompos atau berupa gas atau yang di olah yang berbentuk kerajinan dan lain-lain ini yang belum berjalan. untuk pihak ke tigaitu sendiri secara normatifnya pihak ke tiga itu belum ada

Waktu wawancara : Rabu, 27 Oktober 2024

Narasumber : Aries Dedy Bayu, SE (Kepala Bidang PLSB3)

Hasil Wawancara :

Menurut beliau pengurangan sampah yang ada di Kota Bima seharusnya dilakukan melalui mesin-mesin ataupun pemilahan. Jadi volume sampah kita perhari dengan kondisi keadaan pada hari ini sekitar 80,6 ton untuk pengurangan masih dalam angka 1% yaitu melalui BSI. Sehingga dengan adanya TPST Diharapkan 50% sampah yang diangkut dari sumbernya ke TPA bisa berkurang. Sampai saat ini program pengelolaan sampah masih berbasis pada pelayanan Pungut- angkut-buang, untuk pemilahan dan pengolahan masih dalam proses pengajuan proposal ke KEMENPUPR tetapi terkendala pada lahan karena untuk pengolahan sampah itu memerlukan lahan lebih kurang sekitar 5 Hektar. Jika sistim angkut buang masih terus di terapkan maka akan terjadi overkapasitas pada TPA 2 tahun mendatang , jadi di tahun 2026 DLH tidak bisa menggunakan TPA lagi. Adapun strategi untuk mengatasi masalah overkapasitas di TPA kita harus melakukan pengelolaan sampah secara terstruktur mulai dari rumah tangga sampai pengurangan sampah yang melalui mesin-mesin ataupun pemilahan. Faktor penghambat yang membuat pengolahan dan pemilahan belum berjalan sesuai amanat perda dikarenakan hal ini masih merupakan hal yang baru di NTB itupun baru kota mataram saja. Pengelolaan belum dijalankan secara optimal sesuai dengan perda yang berlaku dikarenakan kurangnya tempat pengelolaan sampah terpadu di kota bima. Kendala utamanya paada lahan jika tersedia lahan maka kita bisa menyediakan tempat pengelolaan sampah terpadu yang di bantu PUPR. Dalam hal pengawasan tersebut memang belum maksimal karena belum adanya perangkat yang bertugas untuk mengawasi hal tersebut, akan tetapi kami sudah mendiskusikan dengan pihak terkait untuk bentuk pengawasan (tim satgas) paada tahun 2025

Waktu wawancara : Selasa, 12 November 2024

Narasumber : Herliastuti,ST (Direktur Bank Sampah Induk)

Hasil Wawancara :

Program yang dijalankan Bank sampah dalam pengolahan sampah, yang pertama karena bank sampah itu masih nol budget dan tidak ada anggaran dia lebih cenderung ke sosialisasi – sosialisasi pada saat ini sosialisasi dilakukan pada sekolah-sekolah pada tempat vasum diharapkan dengan adanya edukasi ke warga dan siswa kita sama- sama paham bahwa pilah sampah dari sumber adalah alternatif terbaik dalam pengelolaan sampah kita. Tantangannya karna sampah yang masuk ke bank sampah atau ke TPA misalnya itu sampah campran nah pemilahan sampah yang Ketika tercampur itu butuh waku , butuh keinginan besar karena sampah yang tercampur itu nilai ekonomisnya tidak ada dan ada rasa ke enggan-an untuk mengelolanya nah karna itu kami akan coba terus melakukan sosialisasi agar pemilahan sampah itu di lakukan dari sumbernya misalnya sampah rumah tangga di pilah anorganic dari sumbernya daru rumah tangga begitupun dengan sekolah-sekolah jangan mencampur bekas makanan kantin dengan sampah anorganiknya seperi botol dan gelas kemasanya.

Waktu wawancara : Minggu, 24 November 2024
Narasumber : Ahyar, S.Sos. M. Ap (Tokoh Masyarakat)
Hasil Wawancara :

Menurut Ahyar, S.Sos., M.Ap selaku Tokoh Masyarakat “apabila melihat secara makro, masih ada beberapa yang perlu dibenahi seperti ketersediaan tempat sampah pada tempat-tempat umum atau keramaian, Dalam hal fasilitas atau sarana kebersihan seperti tempat pembuangan sampah Menurut saya masih sangat kurang. Terutama pada tempat-tempat keramaian seperti taman umum. Jika melihat secara mikro pada lingkungan tempat tinggal saya di mana dalam satu minggu terjadwal dengan baik selama 3 hari dalam seminggu. Masyarakat hanya membuat semua sampah pada satu karung yang didalamnya semua sampah jadi satu. Kalau terkait pengurangan hal ini saya melihat bahwa kebijakan yang tetuag dengan apa yang ada dilapangan belum sepenuhnya efektif. Karena berdasarkan pengamatan saya dari apa yang ada dilapangan masih belum terlihat efektivitas dari pengelolaan sampah dalam hal merubah sampah-sampah dari tiap rumah tangga menjadi bahan bernilai ekonomis misalnya pupuk dan sejenisnya. Nah dalam hal ini saya masih belum melihat adanya pemilahan sampah, apakah itu sampah organik atau nonorganik. Sejauh ini hanya terkait pengangkutan saja yang telah dilakukan, Sementara pemisahan belum ada sama sekali dan terkait pengolahan sampah juga sejauh ini belum ada sama sekali, dimana sampah hanya dikumpulkan saja untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir sementara selanjutnya akan bagaimana dan dibagaimanakan sampah itu saya tidak tau dan tidak mendengar sama sekali terkait pengolahan lanjutan sampah tersebut.

Waktu wawancara : Rabu, 27 Oktober 2024

Narasumber : Iskandar Masjrun, ST (Kepala TPA)

Hasil Wawancara :

Beliau mengatakan Bahwa pemilahan dan pengolahan sampah belum di jalankan diakibatkan kurangnya SDM dan Anggaran yang ada. Dalam hal ini kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat kota bima bahwa budaya yang ada di kota bima telah memahami pemilahan sampah dari budayanya namun semakin kesini masyarakat tidak sadar dengan sampah tersebut, dalam menjawab Langkah-langkah khusus tersebut dinas harus turun dan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarkat yang dimana kegiatan tersebut mencari tempat untuk dijadikan sebagai daerah binaan sebagai percontohan dalam pemilahan sampah. Selain itu belum ada kolaborasi antara DLH dengan masyarakat untuk melakukan pemilahan dimana belum ada keterikatan dengan masyarakat langsung masih lewat perantara kantor lurah tidak mengena secara langsung kepada masyarakat sehingga orang-orang yang di undang saja yang mengetahui, alangkah baiknya sosialisasi langsung terhadap masyarakat. Adapun dampak yang disosialisasikan tersebut tidak ada perubahan melainkan sampahnya tetap konsisten dan terus meningkat. Kalupun ada kegiatan melakukan pemilahan DLH sering mengadakan CSRAN dengan pihak suwasta hanya dalam satu kegiatan saja. Bahwa pemilahan dan pengolahan belum di jalankan diakibatkan kurangnya SDM dan anggaran yang ada. Dengan adanya pengelolaan sampah dikota bima diharapkan sampah yang terpilah itu ada nilainya sehingga sampah yang dibuang di TPA semakin sedikit tidak memenuhi TPA, Tapi sampah di kota bima saat ini belum ada pemilahan dan pengolahan tetapi masih melakukan kegiatan pengangkutan langsung dibuang ke TPA sehingg TPA itu penuh. TPA sebenarnya mengikuti SNI yaitu sanitarilandfil karna anggaran tidak cukup pihak TPA menggunakan open DUMPING yang menggunakan terima sampah Buangan yang dimana sistem open DUMPING itu terima sampah buangan penutupanya kalopun ada anggaranya kami tutup kalopun tidak ada kami biarkan begitu saja, Dalam menangani hambatan – hambatan ini pihak Dlh menanganinya dengan ketergantungan pada anggaran, kebijakan perda harus kuat dilakukan oleh pemerintah kalupun perda berhasi pasti sudah terbentuknya Bank Sampah unit, terbentuknya TPS3R tiap kecamatan itu Langkah yang paling utama untuk

memilahkan sampah namun yang dilakukan selama ini hanya pembuangan saja.

Waktu wawancara : Kamis, 24 Oktober 2024

Narasumber : Safrudin (Wartawan)

Hasil Wawancara :

Hasil wawancara dengan Safrudin selaku Wartawan Garda Asakota Sejah ini yang sering dipersoalkan masyarakat mengenai waktu pengambilan sampah di titik penjemputan sampah yang terkadang kurang pagi dan tepat waktu. Sampai saat ini penerapan perda nomor 3 tahun 2018 belum sesuai karena, metode pengelolaan sampah yang di gunakan masih menggunakan kumpul-angkut-buang.

Waktu wawancara : Rabu, 06 November 2024

Narasumber : Diyan Jmaludin Adam (LSM)

Hasil Wawancara :

Penanganan sampah yang diterapkan oleh DLH kota bima belum sesuai dengan harapan masyarakat kota bima bahkan masih jauh dari harapan masyarakat kota bima karena pengambilan sampah juga masih satu kali sehari itupun pagi dan belum ditertipkan pembuangan sampah kadang masyarakat malam di buang sudah di hambur-hamburkan oleh binatang seperti kucing, anjing. Sedangkan Implementasi terhadap kebijakan itu mestinya kebijakan – kebijakan tersebut mesti harus di sosialisasikan kepada masyarakat melalui RT, RW, Lurah agar kebijakan pengelolaan sampah lebih di ketahui dan di pahami oleh masyarakat. Peran LSM dalam mendukung ataupun mengawasi implementasi kebijakan penanganan sampah saat ini kalau secara umum belum maksimal di jalankan karena LSM juga masih sibuk dengan kegiatannya sendiri kalau untuk sampah sepertinya belum ada LSM yang melakukan pendampingan khusus tentang sampah, sampai saat ini belum ada LSM yang belum melakukan kajian atau penelitian terkait dampak kebijakan ini. Kalau Kolaborasi Antara Dlh dengan LSM sampai saat ini blm adanya kolaborasi tapi kedepannya dan idealnya mesti di lakukan secara Bersama oleh LSM dan Instansi terkait. langkah yang harus di perbaiki oleh dlh masih banyak sekali tapi memang mesti banyak waktu untuk duduk Bersama dalam membahas kebijakan pengelolaan sampah ini antara LSM dan DLH. untuk alokasi agar melalui pengamatan LSM pada saat ini alokasi anggaranya belum memadai di bandingkan dengan kota lain seperti di mataram contohnya mungkin 5 tahun lalu kota mataram blm tertata dgn baik tetapi dua tiga tahun belakangan ini sudah luarbiasa menunjukan kemajuan bahkan sudah sama seperti kota Surabaya yang mendapatkan penghargaan² berbeda dengan kota bima yang masih jauh dari apa di panggung mestinya alokasi dananya lebih di maksimalkan lagi untuk penanganan sampahnya. Harapannya inovasi untuk meningkatkan pengelolaan sampah saat ini LSM mengharapkan Instansi terkait harus mulai mensosialisasikan pemilahan sampah yang non organic dan organic untuk kedepannya.

Lampiran 16 Hasil Wawancara Model Implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bima

Waktu wawancara : Rabu, 06 November 2024

Narasumber : Diyan Jmaludin Adam (LSM)

Hasil Wawancara :

Evektifitas kebijakan penanganan sampah yang diterapkan oleh DLH kota bima belum sesuai dengan harapan masyarakat kota bima bahkan masih jauh dari harapan masyarakat kota bima. masyarakat juga di berikan tambahan sosialisasi oleh pemerintah untuk kesadaran membuang sampahnya dan membuang sampah pad waktu mobil sampah akan lewat di pagi hari mungkin dari dlh harus lebih mensosialisasi untuk pembuangan sampah agar lebih evektif. Dlh belum memberikan edukasi kepada masyarkat terkait keterlibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan penanganan sampah serta memberikan edukasi atau program tertentu untuk melibatkan masyarakat. Kebijakan pengelolaan sampah di kota bima dalam memperhatikan aspek Lingkungan dan Kesehatan kalu di kaitkan dengan Kesehatan masyarakat masih jauh dlh masih menjadi PR besar untuk dlh.

Waktu wawancara : Kamis, 24 Oktober 2024

Narasumber : Safrudin (Wartawan)

Hasil Wawancara :

Dampak kebijakan pengelolaan sampah terhadap lingkungan dan Kesehatan masyarakat sangat penting sekali seharusnya pemerintah melakukannya karena sangat penting dalam penanganan sampah

Waktu wawancara : Minggu, 24 November 2024

Narasumber : Ahyar, S.Sos. M.Ap (Tokoh Masyarakat)

Hasil Wawancara :

Tetapi yang perlu lebih diperhatikan lagi adalah bagaimana cara atau upaya kongkrit dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap masalah sampah dan lingkungan. Seperti sampah plastik, saat ini dalam hal sosialisasi sejauh ini saya melihat belum ada sama sekali, dan hal inilah menurut saya yang sangat perlu untuk dilakukan. Dengan membangun kesadaran pada akar rumput masyarakat. Kendala atau hambatan yang dialami masyarakat dalam mengikuti kebijakan penanganan sampah di Kota Bima. Mungkin hambatannya adalah kurangnya informasi atau edukasi yang dilakukan oleh pihak terkait. Menurut saya hal ini dapat diminimalisir dengan memaksimalkan fungsi-fungsi pada unit-unit kebersihan pada tingkat kelurahan jika ada. Saya rasa penting pada tingkat kelurahan untuk dibentuk unit kebersihan tersendiri. Harapan saya kepada DLH Kota Bima dalam meningkatkan pengelolaan sampah yaitu memperkuat dan memperbaiki manajemen pengelolaan sampah dari rumah tangga hingga tempat pembuangan akhir. Dan merangkul komunitas-komunitas lokal dalam mengkampanyekan masalah kebersihan lingkungan. Menurut saya masih sangat kurang. Terutama pada tempat-tempat keramaian seperti pasar. Dampak kebijakan terhadap kualitas lingkungan hidup di sekitar saya saya pikir sudah cukup signifikan dengan melihat telah berkurangnya masyarakat yang membuang sampah pada tempat yang tidak semestinya. Menurut saya acara terbaik agar masyarakat lebih terlibat dan peduli terhadap penanganan sampah di Kota Bima saat ini 1. Dengan merangkul komunitas-komunitas lokal yang memiliki fokus yang sama terhadap isu-isu lingkungan untuk ikut mengkampanyekan masalah kebersihan dan lingkungan hidup. 2. Maksimalkan fungsi media sosial sebagai media edukasi dan publikasi terkait langkah-langkah apa saja yang penting dilakukan terkait masalah sampah dan lingkungan. Melihat sejauh ini penggunaan media di Bima sangat tinggi sehingga hal ini bisa sangat berdampak. 3. Sering-sering membuat satu kegiatan yang melibatkan masyarakat umum terkait isu lingkungan seperti mungkin jalan sehat dan olahraga bersama pada pusat

keramaian yang kemudian dibarengi dengan kegiatan kegiatan bersih lingkungan.

Waktu wawancara : Jum'at, 08 November 2024

Narasumber : Isti Ariani, SE

Kepala Pegadaian Cabang Bima

Hasil Wawancara :

Kalu untuk program yang mendukung pengelolaan sampah oleh pihak bumn pegadaian ada jadi di beberapa daerah itu adanamanya bank sampah yang dibina oleh pegadaian cumin kalo di kota bima ini sendiri belum ada,tetapi kemari sudah ada upaya dari pemerintah kota kalo tidak salah bank sampah induk yang di Kelola oleh pemerintah itu sendiri dan itu kita sudah mulai kerja sama tetapi karna bank sampah ini bukan pegadaian yang punya itukan pemerintah jadi inikan hanya bentuk dukungan kita kemarin sudah jadi binaan cumin sejauh ini progresnya seperti apa saya juga belum sempat komunikasikan lagi dengan bank sampah induknya tapi kemrin mereka sudah daftarkan sebagai mitra binaan pegadaian. tergantung kesadaran masyarakatnya kalopun kami dan pemerintah melakukan kolabori untuk pelayanan yang baik kepada masyarakat tapi kalo masyarakatnya kurangsadar akan kebersihan yang ada di sekirnya maka program-program tersebut percuma

Waktu wawancara : Senin, 11 November 2024

Narasumber : Drs. H.M.Fakharunraji, ME

Kepala Dinas Inspektorat Kota Bima.

Hasil Wawancara :

Pemerintah khususnya dlh harus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar pengelahuan masyarkat terhadap pengolahan persampahan semakin hari semakin baik.memang harus disadari bahwa partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah saat ini masih sangat rendah ini yang menjadi tantangan buat pemerintah khususnya dlh untuk terus mendorong agar partisipasi masyarkat terus meningkat melalui kerja sama dengan PKK khususnya pokja dasarisma yang mana dari dasarisma inilah di harapkan mampu mendorong ibu ibu PKK yang ada di pengelolaan dasarisma itu bisa berpartisipasi secara maksimal dan meningkat kesadaranya untuk melakukan pengolahan sampah.

**inbound2275031987212787938
-1736875558008**

by By Turnitin

Submission date: 15-Jan-2025 12:27AM (UTC+0700)

Submission ID: 2564117347

File name: inbound2275031987212787938-1736875558008.pdf (436.56K)

Word count: 4309

Character count: 28247

inbound2275031987212787938-1736875558008

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | Rank | Source | Percentage |
|------|--|------------|
| 1 | www.suarantb.com
Internet Source | 3% |
| 2 | yogyakarta.bpk.go.id
Internet Source | 1% |
| 3 | doku.pub
Internet Source | 1% |
| 4 | docplayer.info
Internet Source | 1% |
| 5 | pt.scribd.com
Internet Source | 1% |
| 6 | Submitted to Politeknik STIA LAN
Student Paper | 1% |
| 7 | easpublisher.com
Internet Source | 1% |
| 8 | Fendy Artha Prissando, Tri Ambulanto.
"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA KEDIRI
SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2015", Jurnal Mediasosian : | 1% |

Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara,
2021
Publication

9	digilib.uns.ac.id Internet Source	1 %
10	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1 %
11	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	1 %
12	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
13	Rusmawaty Bte, Rusdin Rusdin. "KOMUNIKASI DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PALU", KINESIK, 2021 Publication	<1 %
14	Diana Imawati. "Makna Kebersyukuran Bagi Buruh Angkut di Pelabuhan Kota Samarinda", MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2024 Publication	<1 %
15	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
16	tci-thaijo.org Internet Source	<1 %
17	Iqbal Zuhdi, Azhari Syarief. "Analisis Spasial Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota	<1 %

- | | | |
|----|--|------|
| 18 | repository.ub.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 19 | repository.its.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 20 | sefidvash.net
Internet Source | <1 % |
| 21 | id.123dok.com
Internet Source | <1 % |
| 22 | repository.ar-raniry.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 23 | repository.radenintan.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 24 | www.neliti.com
Internet Source | <1 % |
| 25 | Audrey Callista Candra, Wiwik Nirmala Sari.
"Analisis Strategi Pengembangan Amenitas
dan Aksesibilitas Pariwisata di Jasmine Park
Cisauk", Jurnal Pariwisata dan Perhotelan,
2024
Publication | <1 % |
| 26 | abdiko.blogspot.com
Internet Source | <1 % |
| 27 | anzdoc.com
Internet Source | |

<1 %

28

e-journal.uniflor.ac.id

Internet Source

<1 %

29

jurnal.syntaximperatif.co.id

Internet Source

<1 %

30

Keisya Putri, Budi Setiawan. "Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kawasan Wisata Bahari Pantai Tanjung Paser", Jurnal Pariwisata dan Perhotelan, 2024

Publication

<1 %

31

Lia Puspa, Ju'im Thaap, Titi Darmi. "Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup", JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari, 2021

Publication

<1 %

32

Munari Kustanto, Fitriyatus Sholihah. "Persepsi Generasi Milenial Kabupaten Sidoarjo terhadap Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)", Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK, 2021

Publication

<1 %

33

Nio Song Ai, Grace Ega Yulianti Lumban Raja, Siti Marfuah, Karina Preyse Tumoka. "Realizing a Waste-Free Dream Entering the

<1 %

Era of Society 5.0 Towards a Smart City in
Manado City", Kalwedo Sains (KASA), 2021
Publication

34

Noviyanti Noviyanti, Hesti Inggrit Noviani,
Sovianti Octaviasari, Noor Kemalia et al.
"Implementasi Kebijakan Pengelolaan
Sampah Melalui Program Bank Sampah Induk
Surabaya (Studi Di Bank Sampah Unit
Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan
Wonokromo, Kota Surabaya)", Transparansi :
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 2023
Publication

<1 %

35

bengkulutoday.com
Internet Source

<1 %

36

bogordaily.net
Internet Source

<1 %

37

cicidamayanti.wordpress.com
Internet Source

<1 %

38

doczz.net
Internet Source

<1 %

39

es.scribd.com
Internet Source

<1 %

40

id.scribd.com
Internet Source

<1 %

41

radarlombok.co.id
Internet Source

<1 %

42

www.researchgate.net

Internet Source

<1 %

43

Dewi Rahayu, Abdul Riyansah, Dewi Sri Astuti, Faidurrizal Faidurrizal. "Gerakan Zero Waste Sebagai Bentuk Peduli Pada Lingkungan Hidup di Kota Tangerang Selatan", ijd-demos, 2021

Publication

<1 %

44

eprints.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On